

**TRANSFORMASI WACANA POLITIK PRABOWO SUBIANTO:
STUDI KOMPARATIF DEBAT CAPRES PEMILU 2019 DAN 2024
TERKAIT ISU HAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Penyusunan Skripsi S1

Program Studi Ilmu Politik



Oleh:

Siti Hotijah

(2106016012)

**PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisonongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Siti Hotijah

NIM : 2106016012

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Transformasi Wacana Politik Prabowo Subianto: Studi

Komparatif Debat Capres Pemilu 2019 Dan 2024 Terkait Isu HAM

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dilanjutkan untuk diujikan demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2025

Pembimbing



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198505022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TRANSFORMASI WACANA POLITIK PRABOWO

SUBIANTO:

**STUDI KOMPARATIF DEBAT CAPRES PEMILU 2019 DAN
2024 TERKAIT ISU HAM**

Di Susun Oleh:

Siti Hotijah

2106016012

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada Kamis, 12 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

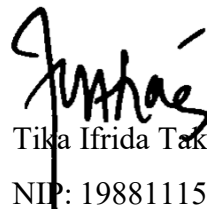
Ketua



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP: 198505022019031007

Sekretaris



Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP: 198811152019032018

Penguji I



Drs. H. Hur Syamsudin, M.A

NIP: 196805051995031002

Pembimbing



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Transformasi Wacana Politik Prabowo Subianto: Studi Komparatif Debat Capres Pemilu 2019 Dan 2024 Terkait Isu HAM” merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Juni 2025




Siti Hotijah

2106016012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas kehendak-Nya sehingga tugas akhir Skripsi dengan judul Transformasi Wacana Politik Prabowo Subianto: Studi Komparatif Debat Capres Pemilu 2019 dan 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Selesaiannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Padakeempatan ini ingin disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kedua orangtua saya, bapak Abdul Hannan dan Ibu Tirasmah yang sangat saya cintai terimakasih untuk segala bentuk doa, dukungan, kasih sayang, dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, serta terimakasih karena telah memberikan fasilitas pendidikan yang tidak semua orang dapatkan, terimakasih karena senantiasa menjadi orang tua yang hebat.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang Prof. Dr Imam Yahya, M.Ag yang sudah memberikan berbagai arahan serta nasehat selama penulis menempuh Pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP Uin Walisongo Semarang
4. Kepala Jurusan Ilmu Politik Uin Walisongo, Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana M.Si selaku kajar Ilmu Politik dan dosen pembimbing saya yang telah memberikan dukungan dan arahan serta berbagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen serta segenap jajaran civitas akademika FISIP UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan berbagai ilmu serta

pengalaman, membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan administrasi dalam penyusunan skripsi.

6. Sahabat SMA saya Annisa, Halimatus Sakdiyah dan kamilatus Sa'adati, terimakasih karena telah mendengarkan segala keluhan penulis, terimakasih karena selalu memberikan saya semangat dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Sahabat kuliah saya Denis Afri Endriawan, Risma sintya dewi, Inne Putri, Ahad Faisal Nazim, terimakasih karena telah menjadi penyemangat, tempat singgah, dan berbagi cerita dengan penulis
8. Seluruh teman kuliah saya khususnya kelas A 21 karena sudah memberikan kesan luar biasa selama kuliah.
9. Terimakasih untuk lagu dangdut, rock melayu dan lagu lagu Malaysia 90an dan lagu arabic karena sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini, serta yang secara tidak langsung memberikan semangat membara untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah berusaha yakin bahwa diri ini mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak dengan sempurna dan terimakasih karena tetap menjadi wanita cantik, ceria dan happy.

Semarang, 7 Mei 2025

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan doa dan Syukur atas Rahmat dan hidayah kepada Allah
SWT dan Rasulallah SAW

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya bapak Abdul
Hannan dan Ibu Tirasmah karena telah mendidik, memberikan dorongan dan
fasilitas dalam pendidikan dan moral. Serta untuk saya sendiri karena sudah
berjalan sejauh ini.

MOTTO

Merasa pintar bodoh saja tak punya

-cak dhalom

Kalau seseorang sungguh-sungguh menginginkan sesuatu. Seisi jagat raya bahu
membahu membantu orang itu mewujudkan impiannya

-sang alkmeis

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat calon presiden Pemilu 2019 dan 2024, khususnya terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM). Transformasi ini penting untuk dikaji karena prabowo telah mengikuti pemilu selama dua periode yaitu tahun 2019 dan 2024, serta prabowo juga memiliki kontroversi terkait dugaan pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) model Teun Van Dijk dengan tiga dimensi utama yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Data primer diperoleh dari transkrip debat capres pada Kompas TV sedangkan data skunder diperoleh dari literatur akademik, berita, serta dokumen visi misi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prabowo mengalami transformasi wacana pada tahun 2019 bersikap defensif dan menganggap bahwa isu HAM adalah serangan terhadap dirinya. Sementara pada tahun 2024 Prabowo tak menganggap HAM sebagai ancaman justru prabowo membingkai isu HAM dalam kerangka ekonomi, stabilitas dan nasionalis. Strategis ini dipengaruhi oleh posisi dirinya yang menjabat sebagai menteri pertahanan serta penggunaan sosial media dalam membentuk dirinya yang baru. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi wacana prabowo tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa, dinamika elektoral, dan strategi representasi politik di Indonesia. Penelitian ini memperkuat pendekatan AWK dalam membaca praktik politik kontemporer dan memberikan kontribusi bagi studi wacana politik serta refleksi kritis terhadap isu HAM di ruang publik indonesia.

Kata kunci: HAM, Debat Capres, Prabowo Subianto, Analisis Wacana Kritis, Teun Van Dijk.

ABSTRACT

This research discusses the transformation of Prabowo Subianto's political discourse in the 2019 and 2024 presidential debates, particularly on the issue of human rights. This transformation is important to study because Prabowo has participated in the elections for two periods, namely in 2019 and 2024, and Prabowo also has controversies related to alleged gross human rights violations in the past. This research uses a critical discourse analysis approach (AWK) model of Teun Van Dijk with three main dimensions, namely text structure, social cognition, and social context. Primary data was obtained from transcripts of presidential debates on Kompas TV while secondary data was obtained from academic literature, news, and vision and mission documents. The results of this study show that Prabowo underwent a discourse transformation in 2019 to be defensive and considered that the issue of human rights was an attack on him. While in 2024 Prabowo did not consider human rights as a threat, Prabowo framed the issue of human rights within the framework of economy, stability and nationalism. This strategy was influenced by his position as defense minister and the use of social media in shaping his new self. The findings show that the transformation of Prabowo's discourse cannot be separated from power relations, electoral dynamics, and political representation strategies in Indonesia. This research strengthens the AWK approach in reading contemporary political practices and contributes to the study of political discourse and critical reflection on human rights in the Indonesian public sphere.

Keywords: Human rights, presidential debate, Prabowo Subianto, Critical Discourse Analysis, Teun Van Dijk.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Kajian Pustaka.....	6
1. Wacana Politik	7
2. Debat Capres	11
F. Kerangka Teori.....	14
1. Definisi Konseptual.....	14
2. Teori Analisis Wacana	17
G. Metode Penelitian.....	21

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
2. Sumber dan Jenis Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II.....	29
KERANGKA TEORI ANALISIS WACANA KRITIS TEUN VAN DIJK	29
A. Teori Wacana dan Analisis Wacana Kritis (AWK)	29
B. Dimensi Analisis Wacana Teun Van Dijk	36
C. Diskursus, Konsep Wacana dan Representasi HAM	39
D. Dinamika Sosial-Politik dalam Praktik Wacana	44
BAB III	47
GAMBARAN UMUM DEBAT CAPRES CAWAPRES 2019 DAN 2024.....	47
A. Gambaran Umum Debat	47
B. Debat Capres 2019	48
C. Debat Capres 2024	52
D. Profil Prabowo Subianto	55
BAB IV	61
STRUKTUR WACANA KRITIS PRABOWO SUBIANTO DALAM DEBAT CAPRES TERKAIT ISU HAM TAHUN 2019 DAN 2024	61
A. Analisis Wacana Kritis Debat Capres pada Isu HAM Tahun 2019	61
1. Analisis wacana tentang Hukum dan Penegakan HAM	61
2. Analisis Wacana Mengenai Persepektif Gender	67
3. Analisis Wacana Mengenai Kalimat Penutup Pada Sesi Debat.....	70
B. Analisis Wacana Kritis Debat Capres pada Isu HAM Tahun 2024	72
1. Analisis Wacana Mengenai Kasus HAM di Papua.....	72
2. Analisis Wacana Mengenai Kasus HAM dimasa Lalu Prabowo.....	79
C. Komparasi Transformasi Wacana 2019 dan 2024	83
1. Perubahan Cara Prabowo Merepresentasikan Pelanggaran HAM.....	84
2. Pergeseran Aktor yang Dikritik atau Dibela	88

3. Implikasi Perubahan terhadap Posisi Politik.....	88
BAB V.....	90
KONTEKS SOSIAL POLITIK DALAM TRANSFORMASI WACANA KRITIS PRABOWO DALAM DEBAT 2019 DAN 2024	90
A. Konteks Sosial Politik Tahun 2019.....	91
1. Posisi Prabowo Sebagai Oposisi	92
2. Basis Pendukung Dan Persespi Publik.....	96
B. Konteks Sosial Politik pada Debat Capres 2024.....	97
1. Prabowo Sebagai Bagian Dari Pemerintah	97
2. Basis Pendukung Dan Persespi Publik.....	99
C. Persepsi Publik dan Respons Elektoral terhadap Isu HAM	101
1. Reaksi Media dan Public terhadap Pernyataan Prabowo	101
2. Peran Media dan Mediasi Wacana	104
BAB VI	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
1. Kesimpulan Utama.....	108
2. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sumber kpu.go.id	3
Gambar 1. 2 Sumber: https://www.youtube.com/live/E6G85GvVdzw?si=R-ORlpMfAJBcqbi8	69
Gambar 1. 3 Sumber: https://youtu.be/zB0RvKAc2kw?si=wHq5VGtqjJkCtYls .	76
Gambar 1. 4 Sumber: <i>https://youtu.be/zB0RvKAc2kw?si=wHq5VGtqjJkCtYls</i>	77

DAFTAR TABEL

Table 1 tema dan waktu debat capres 2019 dan 2024	2
Table 2 komparasi AWK Teun Van Dijk 2019 dan 2024.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilu menjadi momen krusial dalam kehidupan berdemokrasi di mana pemilih memiliki peran dalam menentukan arah politik negara. Pemilihan umum adalah pilar utama dari sistem demokrasi dan tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan perwakilannya (Rahayu, 2024). Pemilihan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 diselenggarakan tanggal 14 Februari, pemilihan presiden 2024 berlangsung di wilayah Indonesia, saat itu pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat utama, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat kedua, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai kandidat ketiga. Kandidat presiden dan wakil presiden untuk tahun 2019 adalah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal yang menarik dari debat pilpres pada dua periode terakhir ini adalah keikutsertaan Prabowo Subianto yang berpartisipasi secara berturut-turut dalam debat. Bahkan jika ditarik pada periode waktu yang lebih lama Prabowo juga sudah mengikuti debat sejak dirinya berpartisipasi dalam debat pemilihan presiden yaitu di tahun 2009 menemani Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Setelah itu berperan serta menjabat calon presiden melawan Joko Widodo di 2019 serta 2014 dan akhirnya menjadi calon presiden pada tahun 2024. (Isa, 2024).

Salah satu aspek yang krusial dalam debat capres adalah wacana politik yang tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi politik saja akan tetapi digunakan oleh para kandidat untuk membangun citra diri, merespon isu-isu tertentu, menyampaikan visi-misi, memperkenalkan program kerja untuk kedepannya serta mempengaruhi persepsi publik. Dalam setiap pemilu wacana politik seorang kandidat dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan perkembangan dinamika sosial dan politik. Pemilu 2019 dan 2024 menjadi titik fokus bagi banyak kalangan terutama dalam melihat bagaimana para calon

presiden, termasuk Prabowo Subianto mengartikulasikan isu-isu penting, merespon dan memberikan wacana politik pada setiap tema debat di tahun 2019 dan 2024.

Tema debat capres pada tahun 2019 dan 2024 telah ditetapkan oleh KPU Komisi Pemilihan Umum dalam setiap sesi debat seperti yang dapat dilihat melalui table berikut:

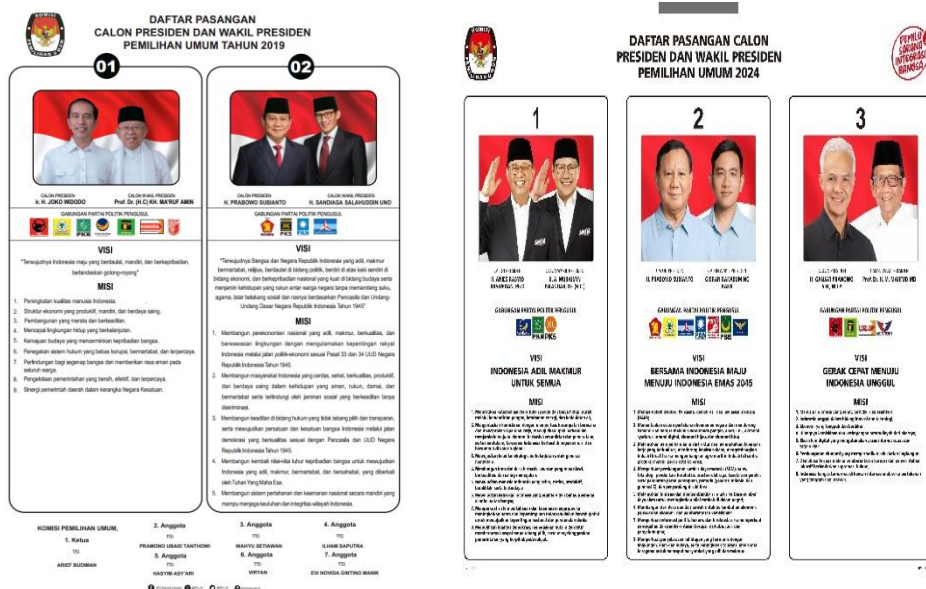
Table 1 tema dan waktu debat capres 2019 dan 2024

Waktu	Tema Debat 2019	Tema Debat 2024
17 januari 2019 12 Desember 2023	Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme	Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga
17 Februari 2019 22 Desember 2023	Energi pangan, Infrastruktur, SDM, Lingkungan hidup	Ekonomi, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN- APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan
17 Maret 2019 7 Januari 2024	Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan budaya	Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik
30 Maret 2019 21 Januari 2024	Ideologi, pemerintahan keamanan, hubungan internasional	Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan,

		Agraria, Masyarakat Adat dan Desa
13 April 2019 4 Februari 2024	Ekonomi dan Kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, dan industri	Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi.

Sumber: Website KPU RI

Tidak hanya tema debat yang berbeda akan tetapi pada tahun 2019 dan 2024 Prabowo memiliki visi-misi serta gagasan politik yang berbeda pula terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Sumber kpu.go.id

Isu HAM di Indonesia sering menjadi sorotan dan perbincangan publik sehingga tidak heran mengapa HAM dijadikan sebagai salah satu tema debat capres, terutama mengingat sejarah panjang pelanggaran HAM yang kerap

terjadi di beberapa periode. Tidak hanya itu, isu mengenai HAM memiliki bobot politik yang signifikan karena tidak hanya mencerminkan komitmen Masyarakat terhadap demokrasi dan keadilan sosial akan tetapi digunakan sebagai tolak ukur bagaimana kredibilitas dan rekam jejak politik. Oleh karena itu, bagaimana seorang kandidat merespons isu ini dalam debat capres dapat berdampak besar terhadap citra dirinya di mata pemilih. Selain itu, dalam setiap pemilu, wacana HAM sering kali mengalami pergeseran narasi, baik karena perubahan kebijakan pemerintah, tuntutan masyarakat sipil, maupun strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh masing-masing kandidat.

Prabowo Subianto, sebagai salah satu kandidat yang ikut serta dalam debat capres 2019 dan 2024 memiliki riwayat yang kerap dikaitkan dengan isu HAM, sehingga cara dia membangun wacana politik dalam menanggapi isu ini menjadi sorotan penting. Pada debat capres 2019 saat itu Prabowo lebih bersikap defensive atau mempertahankan diri ketika diserang terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Saat itu Prabowo Subianto berusaha menghindari perdebatan mengenai isu HAM tersebut dan fokus terhadap pembelaan diri dengan menekankan bahwa tidak adanya bukti hukum yang jelas atas keterlibatannya. Pada tahun 2024 dalam debat capres wacana politik Prabowo Subianto mengenai HAM bisa dikatakan cukup mengalami transformasi dalam merespon karena tidak lagi bersifat defensif melainkan menggeser pembahasan ke arah yang lebih strategis dengan mengaitkannya pada ekonomi karena menurutnya jika ekonomi stabil maka kasus HAM akan meminimalisir.

Transformasi wacana politik yang dialami Prabowo Subianto di tahun 2019 hingga tahun 2024 tidak terjadi begitu saja melainkan terdapat factor sosial politik yang mempengaruhinya salah satu factor utama di tahun 2019 adalah posisi politiknya yang sebagai oposisi di pemerintahan Jokowi dan di tahun 2024 faktor yang mempengaruhinya adalah perubahan kelompok pendukung Prabowo yang saat itu lebih di dominasi oleh anak muda sehingga strategi komunikasi yang dilakukan Prabowo perlu lebih adaptif dan tidak terjebak dimasa lalu.

Asumsi sementara peneliti, dalam debat calon presiden yang dilakukan Prabowo Subianto pada tahun 2019 dan 2024 yang terdapat di latar belakang penelitian ini akan mengkaji bagaimana transformasi wacana politik Prabowo Subianto serta menganalisis hal apa yang berubah dalam wacana politik Prabowo dalam debat 2019 dan 2024 mengenai isu HAM, serta menganalisis bagaimana pengaruh sosial politik yang mempengaruhi perubahan wacana tersebut. Dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Teun Van Dijk untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti.

B. Rumusan masalah

Penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan masalah yang akan dibahas, dengan fokus pada masalah yang dikaji dan diteliti berdasarkan latar belakang penelitian.

1. Bagaimana perubahan struktur wacana politik Prabowo Subianto dalam membahas isu HAM pada debat capres 2019 dan 2024?
2. Bagaimanakah dinamika sosial politik yang mempengaruhi transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat 2019 dan 2024 dalam isu HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perubahan struktur wacana politik Prabowo Subianto dalam membahas isu Hak Asasi Manusia (HAM) pada debat calon presiden Pemilu 2019 dan 2024.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor sosial serta politik yang mempengaruhi transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat capres Pemilu 2019 dan 2024, khususnya dalam isu HAM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis merupakan keuntungan yang berkaitan dengan peningkatan ilmu pengetahuan, terlebih di ilmu bahasa dan ilmu sosial politik.

- a) Menambah kajian dalam bidang analisis wacana kritis, khususnya dalam melihat perubahan wacana politik dalam konteks debat capres di Indonesia.
- b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi politik dan komunikasi politik dengan pendekatan Teori Wacana Kritis Teun Van Dijk.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dalam menganalisis transformasi wacana politik dalam debat capres
- b) Memberikan referensi bagi jurnalis, analis politik, dan masyarakat dalam memahami bagaimana seorang kandidat presiden membentuk serta mengubah wacananya sesuai dengan dinamika sosial-politik yang berkembang.
- c) Memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi pemilih terkait perubahan cara seorang kandidat membingkai isu HAM dalam debat politik.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka menunjukkan seberapa dekat sebuah penelitian dengan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka menurut John W. Creswell, terdiri dari kumpulan artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang memberikan penjelasan tentang teori dan informasi saat ini dan masa lalu. Tinjauan pustaka disusun dengan mempertimbangkan topik dan dokumen yang diperlukan untuk

proposal penelitian. Studi tentang analisis wacana kritis dalam sebuah debat dan komunikasi politik sudah dilakukan oleh sarjana atau peneliti lain dalam hal ini peneliti melihat serangkaian peneliti terdahulu dan melakukan pembaruan dalam peneliti ini.

1. Wacana Politik

Literatur yang membahas mengenai wacana politik telah dibahas oleh peneliti terdahulu diantaranya ialah Adriansyah, Erlina Yuli & Charlina (2024), Wati Kurniawati, dkk (2022), Farid Iskandar (2020), Fendi Setiawan, dkk (2022), Hajran, dkk (2024). Kajian milik Adriansyah menjelaskan saat Indonesia memasuki periode politik yang sangat kompetitif maka bermunculan narasi politik yang disampaikan oleh para pengamat politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden di Indonesia menjadi topik pembicaraan yang hangat di panggung politik. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan analisis wacana yang dibuat oleh Teun Van Dijk. Analisis ini berguna untuk mengeksplorasi isi pidato yang disampaikan oleh Bapak Anies Rasyid Baswedan, calon presiden yang dicalonkan oleh Partai NasDem, di media Tempo. Menurut peneliti dalam kampanye politik, partai politik biasanya menggunakan bahasa yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran lawannya. Dengan kata lain bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan ide, pesan, atau cara pandang terhadap sesuatu untuk kepentingan individu atau partai politik. Menurut Andriansyah dkk ketika seseorang memberikan informasi dan isi pesannya mengandung unsur-unsur yang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan memanfaatkan keahlian dalam mendesain isu atau wacana, maka ia menggunakan bahasa politik terhadap lawan bicaranya. Hal ini merupakan bukti yang dapat dipercaya bahwa seseorang menggunakan bahasa politik terhadap lawan bicaranya. Metode Teun A. Van Dijk akan menyelidiki hal ini melalui elemen superstruktur, struktur makro, dan struktur mikro.

Literatur selanjutnya yaitu milik Wati Kurniawati, dkk (2022) Debat politik menunjukkan sikap seorang tokoh dari sebuah partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsi partai. Sudut pandangnya dapat dilihat dari

cara dia berbicara dalam debat politiknya dan bagaimana dia menjalankan tugas-tugas partainya. Bahasa yang digunakan oleh sebuah partai politik secara dominan membentuk eksistensinya dalam menjalankan fungsinya penggunaan bahasa menunjukkan ideologi yang diusung. Bahasa akan bersifat diskursif jika ideologi didefinisikan sebagai pembentukan realitas melalui berbagai bentuk praktik politik. Teori yang peneliti gunakan dalam meneliti topik ini adalah dengan teori analisis wacana kritis oleh Van Dijk dan Fairclough yang tidak jauh berbeda dengan penelitian pertama, akan tetapi pada penelitian kedua ini peneliti fokus terhadap bagaimana bahasa yang digunakan dalam debat politik sangat menarik dan perlu diteliti karena partai berkaitan erat dengan bahasa yang digunakan oleh pembicara serta membahas bagaimana bahasa dipengaruhi oleh ideologi partai dalam debat politik karena hal ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa politisi dilihat dari sudut pandang kekuatan semantik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bahasa politisi berdasarkan kekuatan semantik. Secara tekstual, wacana dan sosial menunjukkan fitur-fitur semantik yang digunakan untuk melancarkan proses sosial, yaitu menciptakan citra positif sebuah partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Proses dan praktik sosial yang disalurkan oleh para tokoh partai politik ini sangat erat kaitannya dengan latar belakang sosial, politik, dan nilai-nilai budaya, khususnya budaya Indonesia.

Kajian ketiga yaitu milik Farid Iskandar (2020). Penelitian ini menyelidiki fenomena komunikasi politik selama pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019. Dalam hal kampanye, tidak adanya argumentasi, tidak memenuhi janji, dan berjanji untuk berkomunikasi melalui debat merupakan hal yang umum terjadi. Teori kampanye debat fungsional yang dikemukakan oleh William L. Benoit digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pada debat capres, sebagian besar dari sudah mengetahui rekam jejak masing-

masing kandidat, namun belum mengetahui bagaimana cara mereka melihat isu-isu nasional. Oleh karena itu, debat antara capres sangat penting bagi penonton untuk memilih pasangan mana yang terbaik, meskipun debat ini akan lebih banyak dipengaruhi oleh kelas menengah dan orang-orang terpelajar. Meskipun pada kenyataannya faktor yang sangat penting dalam debat capres di televisi adalah kepribadian (daya tarik), proyeksi citra, dan pengembangan isu. Kaitan antara hasil penelitian ini dengan teori argumentasi dan debat menunjukkan bahwa dalam debat, pernyataan dan argumen selalu memenuhi komunikasi. Salah satu kelemahan dalam penampilan debat capres kali ini adalah ketidakmampuan dalam membuat pernyataan dan berargumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kandidat dalam pilpres 2019 mencoba membuat wacana politik mereka lebih fokus pada kebijakan daripada menyoroti sifat-sifat mereka yang bisa digunakan sebagai pembeda.

Kajian milik Patricia Robin, Shella Fendista dan Alvin Adiwinata (2020) membahas tentang salah satu video blog Jokowi, "Jalan Pagi Bareng Jan Ethes", yang diunggah pada 21 September 2019. Yang menarik adalah tanggal pengunggahan video serta menampilkan keakraban kakek dan cucu saat Indonesia menghadapi masalah negatif dan bencana. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori fairclough. Michel Foucault menunjukkan bahwa pemahaman tentang kekuasaan sebagai kekuatan hubungan yang mapan dan terstruktur menembus tubuh sosial melalui mekanisme pengaturan yang melibatkan profesionalisme, institusi, dan disiplin. Kekuasaan dapat menghasilkan diskusi dan kebenaran melalui pembentukan hierarki dan pengetahuan yang tidak terlihat dan tersembunyi. Kehadiran video blog dalam penelitian ini bukan tanpa alasan hal ini merupakan suatu cara Jokowi untuk menunjukkan eksistensinya di kalangan remaja melalui pengunggahan video yang dapat diterima oleh orang-orang dari semua umur. Video blog ini menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, terlepas dari kenyataan bahwa itu terkesan

menunjukkan ketidakpedulian seorang pemimpin negara saat negara tersebut menghadapi kesulitan atau sebagai "tukang pengalih masalah".

Kajian milik Fendi Seriawan, dkk (2022) mengangkat kasus tentang pemberitaan pencabulan santri oleh anak kiai di Jombang dalam media online pada literatur ini membahas bagaimana teori Van Dijk menganalisis stuktur teks, kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat di media online, menurutnya dalam memaparkan analisis wacana kritis akan membahas bagaimana hubungan antara wacana dengan tokoh yang terdapat dalam wacana tersebut, karena dalam teori Van Dijk sendiri terdapat banyak aspek seperti kekuasaan, dominasi, ideologi, dan hegemoni. Berdasarkan hasil analisis pada tiga portal berita online Berita-berita tersebut memenuhi tiga tingkatan analisis wacana, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Analisis struktur makro dari ketiga berita tersebut menunjukkan bahwa judul yang diangkat oleh masing-masing portal berita berbeda.

Setelah melakukan analisis kognisi sosial, Adapun ditemukan bahwa skema peristiwa adalah yang paling dominan. Hal ini sesuai dengan alur cerita yang digunakan oleh Tribunnews.com, Detik.com, dan Kompas.com yang masing-masing menitikberatkan pada bagaimana para tersangka yang terlibat dalam kasus pencabulan santri ditangkap. Selain itu, kasus pencabulan oleh anak kiai merupakan salah satu fenomena sosial yang memprihatinkan karena terjadi di lingkungan yang agamis dan dilakukan oleh orang yang seharusnya bermoral. Selain itu, pemberitaan ini semakin memperburuk reputasi pesantren yang selama ini dianggap aman dari tindak kriminalitas hal tersebut menunjukkan adanya konteks sosial yang sesuai dengan analisis wacana kritis Van Dijk. Kajian selanjutnya yaitu milik Hajran, dkk (2024) membahas tentang isi pidato presiden pada tahun 2022 dengan teori wacana milik Norman Fairclough Dalam pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, strategi berbahasa seperti struktur, tata bahasa, koherensi, dan konjungsi menunjukkan bahwa bahasa tersebut terdapat timbal balik dengan citra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan audiens.

Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggunakan tiga jenis konjungsi. Pertama, kata "tetapi" digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara dua hal yang disebutkan dan penekanan perbedaan tersebut. Kedua, kata "namun" digunakan untuk menunjukkan kontras antara dua hal yang disebutkan dan pentingnya pelaksanaan agenda besar bangsa. Terakhir, kata "namun" juga digunakan untuk menunjukkan peningkatan jumlah ekspor yang sangat besar di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan menggunakan kata penghubung ini, setiap kalimat memiliki warna yang berbeda.

Dari semua literatur tersebut terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti, persamaannya ialah bagaimana pentingnya suatu analisis wacana kritis dalam menganalisis suatu objek tertentu seperti retorika, tata bahasa, struktur teks dalam menggunakan teori analisis wacana Van Dijk meskipun dalam literatur diatas tidak hanya menggunakan teori analisis wacana kritis (AWK) Van Dijk dalam hal ini analisis wacana kritis juga tidak hanya berfungsi untuk menentukan struktur kalimat akan tetapi mampu mengetahui bagaimana suatu relasi kuasa, ideologi, serta dominasi dalam suatu wacana tersebut. Perbedaannya adalah jika pada penelitian terdahulu lebih fokus pada pidato politik Anis Baswedan dalam partai NasDem, debat capres 2019 secara keseluruhan, dan citra Jokowi sedangkan penelitian milik peneliti fokus terhadap transformasi politik Prabowo dalam debat 2019 dan 2024.

2. Debat Capres

Kajian mengenai debat pada capres sebenarnya sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu seperti oleh Gema Arradian Putra (2015), Muhammad Sadikin, dkk (2020), Adam Isa (2024), Heru Ricky (2014), Saipul Hamdi (2024)

Kajian milik Gema Arradian Putra (2015) menjelaskan bahwa debat capres adalah proses pendidikan politik di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Sebagai

alat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, debat capres memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kualitas para kandidat kemampuan mereka dalam menangani isu-isu nasional dan program-program spesifik mereka. Selama periode menjelang pemilihan presiden, tren debat capres terus berlanjut hingga pemilihan presiden 2014. Debat capres pada pemilu 2014 telah mendapatkan legitimasi yang kuat sebagai cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa. Salah satu media yang digunakan untuk komunikasi politik menjelang pemilu adalah debat capres yang merupakan rangkaian komunikasi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden dalam upaya meraih simpati publik dan mengubah persepsi publik. Selanjutnya literatur dari Muhammad Sadikin (2020) fokus pada setiap tanda dan makna yang muncul dalam goyangan Prabowo dan menampilkan makna yang terkandung dalam goyangan melalui mitos dan tanda yang muncul. Tanda-tanda ini akan membantu dalam diskusi dan penjelasan makna yang terkandung dalam goyangan Prabowo pada putaran pertama debat calon presiden dan calon wakil presiden 2019.

Dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes pada penelitian ini mengenai bagaimana goyangan Prabowo dalam debat calon presiden dan wakil presiden, dapat mengambil kesimpulan mengenai makna mitos dari goyangan Prabowo. Dengan melakukan goyangan tersebut, ia menunjukkan ketidakpuasannya terhadap hasil yang terjadi secara nonverbal kepada penonton. Selain itu, goyangan tersebut juga berfungsi sebagai pembelaan diri terhadap tuduhan yang ditujukan kepada Prabowo. Selanjutnya literatur milik Adam Isa (2024) yang menunjukkan bagaimana bentuk retorika Prabowo Subianto dengan teori retorika Aristoteles dalam debat awal pilpres 2024 dan bagaimana hal tersebut memengaruhi elektabilitasnya. Dalam penelitiannya ini dijelaskan bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam pemilihan presiden 2024. Dengan mengubah sikapnya menjadi santai dan humoris, Prabowo membangun kredibilitas (ethos), menggugah emosi audiens (pathos) dengan gaya bicaranya yang

tegas dan emosional, serta menyampaikan argumen yang logis dan realistis (logos) untuk menghubungkan masa lalu dan tantangan masa depan artinya retorika Aristoteles telah diterapkan secara efektif.

Sedangkan dalam meningkatkan elektabilitasnya Prabowo tidak hanya dipengaruhi oleh retorika ketika debat akan tetapi terdapat pula faktor lain yang mempengaruhinya seperti keadaan sosial-politik dan pendekatan kampanye yang lebih luas. Literatur selanjutnya yaitu Saipul Hamdi (2024) yang membahas strategi dan gaya debat Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka yang berhasil menumbangkan lawan debatnya pada debat. Selain memenangkan debat pertama dan kedua, Gibran berhasil menarik perhatian publik dan lawan politiknya bahwa Gibran tidak berani dan tidak mampu berdebat karena tidak pernah mau untuk berdebat sebelum adanya debat resmi dari KPU. Padahal hal tersebut hanyalah sebuah strategi yang digunakan Gibran untuk membuat penasaran publik serta menghindari ide dan gagasannya, sehingga pada debat selanjutnya Gibran mampu membuat kewalahan lawan debatnya. Gibran tidak hanya mencecar lawan politiknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan kosakata baru, tetapi juga menggunakan gimmick untuk membuat lawan debatnya merasa down Mahfud bahkan menganggap gimmick Gibran sebagai upaya menjatuhkan dirinya sendiri di depan publik. Gibran berhasil membuat lawan debatnya gugup sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab langsung antar kandidat aksinya tersebut menjadi viral di media sosial.

Kajian milik Heru Ricky (2014) juga menjelaskan bagaimana kampanye sangat bergantung pada pembicara atau orator terutama dalam debat. Keberhasilan penyampaian pesan dari kegiatan kampanye dalam debat ini bergantung pada kemampuan pembicara dalam menggunakan strategi retorika yang tepat ketika berbicara di depan audiens. Salah satu perbedaan retorika antara Prabowo dan Jokowi adalah Prabowo benar-benar memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk menyampaikan program, visi, dan misinya untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan.

Sebaliknya, retorika Jokowi didasarkan pada pengalaman kerjanya yang telah dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan berbicara dan berdebat. Audiens akan beranggapan bahwa pembicara atau pembicara tidak menguasai topik debat atau pidato jika mereka tidak tahu banyak tentang tema tersebut. Hal ini sangat merugikan karena akan menghasilkan persepsi yang buruk saat berpidato.

Secara umum penelitian tentang debat capres biasanya membahas penggunaan bahasa serta pentingnya debat dalam membentuk persepsi pemilih. Selain itu, banyak penelitian yang menganalisis strategi dan retorika Prabowo melalui teori Aristoteles serta gestur tubuhnya saat debat pertama. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji debat capres dengan fokus pada pasangan calon yang mengalami transformasi identitas politik. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana Prabowo bertransformasi secara politik selama debat, mengingat ia telah mencalonkan diri dalam pilpres 2019 dan 2024. Serta melihat bagaimana wacana politik yang telah dilakukan prabowo selama debat melalui teorinya Van Dijk maka dari itu untuk mengisi celah tersebut penelitian saya bertujuan saya untuk melihat bagaimana transformasi Prabowo dalam dua periode debat capres.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan terkait penjelasan serta batas-batas teori yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini, berikut teori yang digunakan oleh peneliti.

1. Definisi Konseptual

a) Transformasi

Menurut Tuhumury “Transformasi” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transisi dari yang lama ke yang baru. Menurut Gargarella, transformasi sosial adalah proses mengubah ketidaksetaraan struktural dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat dengan cara meringankan beban keadaan yang tidak sesuai secara

moral, seperti status atau kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, ras, agama, dan orientasi sosial. Adapun menurut KBBI transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). Selain itu, transformasi bukan hanya sekedar perubahan yang sederhana transformasi adalah proses yang dapat dilihat, multidimensi, kompleks, dinamis, berjangka panjang, dan memiliki banyak faktor. Selain itu, transformasi adalah proses perubahan yang dapat dilihat dan dilacak prosesnya (Natanael, 2023). Banyak faktor yang kompleks dan sering kali rumit untuk dipahami bagaimana mereka saling mempengaruhi, termasuk mana yang lebih dominan, menyebabkan transformasi cenderung terjadi dalam jangka waktu yang lama, bukan secara instan (Natanael, 2023). Perubahan yang terjadi pada seseorang atau sesuatu disebut transformasi. Dalam banyak kasus, transformasi menghasilkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari bentuk aslinya.

b) Wacana Politik

Wacana politik mencakup bagaimana bahasa memberikan pengaruh, menciptakan dinamika kekuasaan, dan mentransformasi realitas sosial dan politik. Dalam seri diskusi ini, wacana politik sendiri merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen linguistik, ilmu politik, dan studi media. Aktor politik, seperti politisi, pejabat pemerintah, dan partai politik, secara khusus menggunakan jenis komunikasi yang disebut wacana politik. Fokus dari wacana politik adalah untuk mempengaruhi publik atau mendukung kebijakan dan keputusan. Wacana politik ini berfokus dalam strategi dan struktur saat menghadapi wacana politik, seperti pemingkakan ideologis, retorika persuasif, dan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, analisis wacana politik merupakan alat yang penting untuk memahami bagaimana komunikasi politik menggunakan kekuasaan dan struktur sosialnya.

Analisis wacana digunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembicara ketika mereka mengakui sesuatu atau untuk mengetahui fakta di balik wacana itu sendiri (Jorgensen & Philips,

2007). Van Dijk awalnya berkonsentrasi pada struktur dan proses wacana, namun kemudian beralih ke wacana analisis kritis. “Bahwa pada akhirnya agar CDA benar-benar kritis, ia harus menjadi sebuah kekuatan yang melawan kekuasaan diskursif,” Teun Van Dijk mengatakan bahwa analisis wacana bukan sekedar melihat struktur teks. Karena menurutnya masih perlu mengetahui lebih jauh bagaimana perangkat kalimat suatu teks mencakup banyak komponen sehingga hal ini berarti mengharuskan deskripsi wacana tidak hanya berkaitan dengan pengguna bahasa, tetapi juga dimensi lain, yaitu studi tentang wacana sebagai proses komunikasi atau sebagai bentuk interaksi sosial, serta cara-cara penggunaan bahasa, komunikasi dan interaksi yang berkaitan dengan konteks sosial. Sebagaimana yang diidentifikasi oleh Van Dijk, bahwa tema yang sering diangkat dalam CDA antara lain: ketimpangan gender; etnosentrisme, antisemitisme, nasionalisme, dan rasisme; wacana media; wacana politik; dan kekuasaan institusional dan profesional. Untuk tema kajian terakhir ini antara lain meliputi teks dan percakapan di ruang pengadilan, wacana birokratik, wacana medik, wacana ilmu pengetahuan dan akademik, wacana organisasi dan korporasi, serta wacana pendidikan (Van Dijk dalam Wahyono. S.B)

c) Debat Capres

Debat menjadi salah satu pilihan di mana orang dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang proposal atau masalah tertentu, secara umum debat sering ada dalam organisasi yang lebih besar, pembicaraan atau pidato pro dan kontra biasanya dilakukan sebelum pemilihan untuk menentukan kebijaksanaan atau argumen yang diterima (Sari, 2018). Debat adalah diskusi antara dua atau lebih individu yang melakukan upaya untuk saling meyakinkan menerima ide atau gagasan yang disampaikan. Menurut Jazeri, pembicara dalam debat menyajikan contoh, alasan, dan bukti yang kuat agar audiens serta lawan bicara sulit membantahnya, sedangkan Menurut KBBI, debat adalah

percakapan dan perbedaan pendapat tentang sesuatu dengan mengemukakan alasan untuk memperkuat pendapatnya.

Debat juga dikenal sebagai bentuk kegiatan adu argumentasi (penalaran) antara beberapa pihak baik secara individu maupun kelompok dalam memperbincangkan dan merumuskan persoalan atau perselisihan, secara resmi debat di Indonesia lebih sering dilakukan oleh lembaga legislatif (Danial, 2008). Dari uraian diatas dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa debat adalah bentuk diskusi yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok untuk mempertahankan pendapat atau argumennya, Tarigan menjelaskan debat sebagai situasi untuk menetapkan apakah pendapat dapat diterima atau tidak oleh pihak tertentu, yang dikenal sebagai pengusul atau afirmatif, dan penolakan dari lain pihak yang dikenal sebagai penyanggah (Lestari, 2018).

Jadwal debat capres 2019 telah disusun oleh tim KPU yaitu 17 Januari 2019 debat sesi pertama dilaksanakan di Jakarta yang disiarkan melalui TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV, pada tahun 2019 debat terbuka dilaksanakan sebanyak lima kali di tahun 2019 dengan berbagai tema, di debat pertama tema yang pertama kali diangkat adalah HAM, hukum, terorisme, dan korupsi. Debat 2024 berlangsung dari Desember 2023 hingga februari 2024, tiga debat pertama akan berfokus pada pemilihan presiden dan dua debat terakhir akan berfokus pada calon wakil presiden. Debat pertama dilaksanakan Selasa, 12 Desember 2023 dengan tema debat: hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi stasiun penyiarannya adalah TVRI dan RR.

2. Teori Analisis Wacana

a) Hakikat dan Definisi Teori Wacana

Teori Analisis wacana kritis oleh Teun A. Van Dijk dalam karyanya *Discourse and Power* (2008) secara epistemologis *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis telah mengalami

perkembangan. CDA sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana bahasa dan wacana untuk menyebarkan ide, membahas kekuasaan atau pengaruh (ideologi). CDA juga memiliki pendekatan yang berbeda-beda pada setiap tokoh seperti Van Dijk dimana dia lebih fokus terhadap struktur wacana dan bagaimana hubungan antara wacana dengan kekuasaan melalui pendekatan sosio-kognitif. Pendekatan ini adalah cara bagaimana sebuah wacana mempengaruhi pikiran setiap individu lebih oleh penguasa untuk mengontrol cara orang berpikir, membungkam atau menekan kelompok tertentu.

Pandangan Van Dijk terus berkembang yang pada awalnya hanya fokus terhadap struktur wacana yaitu bagaimana teks atau pembicaraan disusun, kemudian Van Dijk mulai memperhatikan bagaimana interaksi sosial dalam sebuah wacana. Bagaimana wacana mampu digunakan dalam kehidupan nyata untuk mempertahankan atau melawan kekuasaan, sehingga Van Dijk menegaskan CDA perlu dijadikan sebagai alat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, mendukung kelompok minoritas. Artinya Van Dijk percaya bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perlawanan karena menurutnya orang yang ditekan tidak selalu pasif, dan masih bisa melawan melalui wacana mereka sendiri.

Pemahaman terkait wacana mengalami perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari wacana sering dianggap sebagai rencana atau ide yang belum terwujud bahkan dianggap sebagai angan-angan, hal itu juga terjadi dalam lingkungan politik yang kerap kali mengatakan “hal itu sudah diwacanakan” pada kenyataannya hal tersebut masih berupa perkiraan yang belum terealisasikan, atau belum berupa tindakan. Dalam konteks studi wacana, pemahaman terkait wacana sebenarnya lebih dari itu seperti Foucauldian yang memahami wacana sebagai sebagai suatu yang lebih kompleks. Van Dijk memahami wacana bukan hanya sebatas angan akan tetapi terdapat bentuk tindakan. Oleh karena

itu wacana sebagai sebuah tindakan yang disengaja atau senantiasa melalui pikiran terlebih dahulu artinya wacana tidak terjadi begitu saja tanpa tujuan. Karena wacana merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna dan maksud sosial maka pelakunya perlu bertanggung jawab atas apa yang ditulis atau dibicarakan. Karena wacana sebagai sebuah praktik sosial maka biasanya dalam sebuah wacana dipengaruhi oleh konteks sosial seperti siapa yang berbicara, dimana dan mengapa.

Bagi Van Dijk studi wacana sebagai sebuah struktur dan proses, artinya dalam struktur tersebut bagaimana wacana dibentuk seperti tata bahasa, makna kata, dan gaya bicara sedangkan dalam proses yaitu bagaimana wacana itu mampu mempengaruhi orang lain baik dalam sikap, kepercayaan, emosi bahkan tindakan. Van Dijk juga menyoroti bahwa makna dalam wacana itu terbilang kompleks karena makna tidak hanya tentang satu atau dua kalimat, akan tetapi tentang bagaimana semua kalimat dalam wacana tersebut saling terhubung (koherensi). Dalam menentukan makna sebuah wacana itu terhubung atau tidak bisa dilihat melalui analisis mikro dan makro, kalimat-kalimat dalam wacana perlu adanya kesinambungan sehingga masuk akal dan nantinya mampu mempengaruhi audien. Meskipun demikian sebuah wacana tidak hanya fokus terhadap koheren atau tata bahasa akan tetapi perlu adanya analisis yang mendalam terhadap konteks sosial, termasuk bagaimana wacana itu sendiri mampu mempengaruhi struktur sosial.

b) Dimensi analisis wacana Teun Van Dijk

Dalam karyanya “Wacana sebagai struktur dan proses” Van Dijk mengatakan bahwa untuk memahami konsep wacana perlu melewati (struktur teks), kognisi sosial, dan konteks sosial yang merupakan tiga dimensi wacananya.

1) Pengguna bahasa (struktur teks)

Van Dijk membagi berbagai tingkatan yang saling mendukung satu sama lain yaitu:

a) Struktur makro

Struktur makro adalah struktur atau bagian besar dari teks, perspektif umum yang dapat diketahui dari topik atau subjek yang ditekankan (Ratnaningsih, 2019). Artinya struktur makro merupakan hubungan antara teks dan konteks sosial atau budaya yang cakupannya lebih luas.

b) Suprastruktur

Superstruktur adalah level yang menjelaskan bagaimana teks diorganisasikan dalam wacana secara keseluruhan secara tersusun (Ratnaningsih, 2019). Pendahuluan, isi, kesimpulan, dan penutup biasanya terdapat dalam superstruktur baik dalam berita, debat dan pidato.

c) Struktur mikro

Struktur mikro adalah wacana yang terdiri dari bagian-bagian teks yang sangat kecil, seperti kata, kalimat, proposisi, parafrase, dan gambar. (Ratnaningsih, 2019).

2) Kognisi Sosial

Van Dijk menggunakan istilah “kognisi sosial” untuk menganalisis wacananya, dan dia percaya bahwa penelitian terhadap kognisi sosial yang membentuk teks sangat diperlukan. Menurut Van Dijk analisis teks bukanlah satu-satunya cara untuk memahami struktur teks karena banyak pendapat, ideologi, dan makna yang membentuk struktur teks.

3) Konteks Sosial

Konteks sosial berguna untuk meneliti wacana yang berisat dinamis dan berkembang di lingkungan, menurut Van Dijk ada 2 hal yang penting untuk menganalisis poin-poin untuk mengetahui masyarakat kekuasaan dan akses. Van Dijk menganggap kekuasaan sebagai kekuatan yang memungkinkan satu kelompok mengendalikan kelompok lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul "Transformasi Wacana Politik Prabowo Subianto: Studi Komparatif Debat Capres pada Pemilu 2019 dan 2024 terkait isu HAM" ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis yang menggunakan jenis penelitian teks dengan pendekatan konten analisis pada media Youtube Kompas TV dengan menggunakan teori analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Teun Van Dijk. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang diperoleh oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Sedangkan analisis wacana kritis merupakan studi bagaimana bahasa mendefinisikan, merefleksikan dan membentuk kekuasaan serta ideologi melalui teks dan konteks sosialnya. Analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* menurut Van Dijk wacana bukan hanya soal analisis struktur bahasa atau tindakan komunikasi sederhana, melainkan sebuah proses kompleks yang terhubung dengan sosial, ideologi dan kekuasaan. Dari sekian banyaknya model analisis wacana kritis yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli, model Teun Van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini karena Van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga dapat digunakan dan dipakai secara praktis (Ratnaningsig, 2019).

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer dan sekunder merupakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan atau sumber langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa:

- a) Transkrip debat capres pemilu 2019 dan 2024, khususnya pada bagian atau tema yang membahas isu Hak Asasi Manusia (HAM).
- b) Video debat capres 2019 dan 2024 yang diperoleh dari sumber resmi yaitu Kompas TV dengan tema debat mengenai tema HAM di

tanggal 17 Januari 2019 dan tema HAM pada debat capres di tanggal 12 Desember 2023. Sebagai pendukung kontekstual dalam mengidentifikasi gaya retorika, intonasi, dan gestur yang memperkuat makna wacana.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang mendukung analisis terhadap perubahan wacana Prabowo, antara lain:

- a) Dokumen visi-misi dan program kerja Prabowo Subianto dalam pemilu 2019 dan 2024 yang digunakan untuk memahami bagaimana gagasan politiknya berkembang.
- b) Artikel berita, opini, serta tanggapan publik seperti pengamat politik dan dan jurnalis, dan analisis dari media massa terkait debat capres 2019 dan 2024, untuk melihat bagaimana wacana Prabowo diterima dan dipahami oleh publik.
- c) Jurnal akademik, skripsi terdahulu dan buku yang relevan terkait teori wacana, politik HAM, untuk memahami konteks sosial politik yang melatar belakangi transformasi wacana politiknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi Non-Partisipatif**

Observasi Non-Partisipatif mengamati pola wacana yang terdapat pada Youtube tanpa melakukan interaksi langsung. Observasi ini mencakup analisis berbagai wacana yang mengandung isu HAM, mencatat pola interaksi antar capres saat berdebat, serta mengidentifikasi bagaimana Prabowo membingkai isu HAM dalam debat capres. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat memahami bagaimana Prabowo merespon isu serta narasi politik dan bagaimana wacana tersebut bertransformasi seiring waktu. Selain itu, observasi ini

juga untuk mengkaji bagaimana diskursus yang berkembang mempengaruhi dinamika sosial dan politik.

Langkah pertama dalam pengumpulan data, yaitu menentukan kriteria data yang dikumpulkan, disesuaikan dengan tahapan analisis wacana kritis. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan kutipan-kutipan relevan dari transkrip debat capres 2019 dan 2024 yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Data diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti pilihan diksi yang berkonotasi kuat terhadap HAM, struktur argumentasi, serta perubahan cara penyampaian wacana HAM antara tahun 2019 dan 2024.

Peneliti juga memperhatikan perbedaan gaya bahasa dan konstruksi makna yang digunakan oleh Prabowo, seperti penggunaan istilah maupun bahasa defensif atau ofensif yang muncul saat membahas HAM. Selain itu, peneliti mengidentifikasi pola-pola wacana tertentu—misalnya pengalihan isu, generalisasi, atau pembentukan citra diri sebagai patriot—yang menandai adanya transformasi dari strategi komunikasi politik Prabowo di kedua periode tersebut. Setiap kutipan yang dipilih dianalisis berdasarkan dimensi teks (struktur wacana), kognisi sosial (ideologi dan memori kolektif), serta konteks sosial-politik yang memengaruhi perubahan wacana. Pemilihan data juga mempertimbangkan respon publik, baik dari media maupun komentar masyarakat, sebagai bagian dari konfirmasi terhadap pergeseran wacana yang terjadi dalam debat.

Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat otentik dan kontekstual karena berasal langsung dari dokumen autentik seperti transkrip dan video resmi debat capres, serta dokumen visi-misi dan pemberitaan media yang memuat pernyataan Prabowo terkait isu HAM. Materi debat yang dianalisis mencerminkan bagaimana wacana HAM dibangun dalam ruang komunikasi politik yang formal dan terpublikasi secara luas.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola diskursif, seperti strategi argumentatif, pemilihan istilah kunci, serta narasi dominan yang digunakan Prabowo dalam membentuk citra dirinya dan memosisikan isu HAM dalam kerangka kepentingan nasional. Analisis juga memperhatikan pergeseran retorika, penyesuaian sikap, serta intensitas pembahasan HAM antara debat tahun 2019 dan 2024. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menunjukkan bagaimana struktur wacana HAM tidak hanya mencerminkan posisi politik Prabowo, tetapi juga beradaptasi terhadap perubahan konteks sosial-politik dan persepsi publik yang berkembang di dua periode pemilu tersebut.

Pada tahap analisis hasil, seluruh data kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka teori Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk. Pada dimensi struktur teks, peneliti menguraikan bagaimana tema utama, struktur argumen, pilihan diksi, serta gaya bahasa yang digunakan oleh Prabowo dalam membahas isu HAM pada debat capres 2019 dan 2024 mencerminkan sikap ideologis dan upaya konstruksi citra diri. Fokus diberikan pada makrostruktur (tema besar seperti HAM, keadilan, keamanan), superstruktur (alur penjelasan), serta mikrostruktur (kata, kalimat, metafora) yang dipakai.

Pada dimensi kognisi sosial, peneliti menelaah bagaimana pengetahuan, ingatan kolektif, serta pandangan ideologis yang dimiliki Prabowo berperan dalam membentuk cara ia merespons isu HAM. Hal ini termasuk bagaimana Prabowo membingkai persoalan HAM dalam kaitannya dengan nasionalisme, keamanan negara, atau pengalaman masa lalunya di dunia militer. Sedangkan pada dimensi konteks sosial, temuan-temuan yang diperoleh dikaitkan dengan situasi politik dan sosial yang mewarnai kedua debat, seperti posisi politik Prabowo (oposisi pada 2019 vs bagian dari pemerintahan pada 2024), dinamika koalisi, hingga sensitivitas publik terhadap isu pelanggaran HAM berat

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk menelusuri data historis dan sering disebut juga sebagai studi dokumenter.

- a) Mengumpulkan dan menganalisis transkrip debat capres pemilu 2019 dan 2024, khususnya pada isu HAM.
- b) Mengkaji video debat capres dari sumber resmi KPU RI dalam penyampaian wacana politik Prabowo.
- c) Mengakses dokumen visi-misi Prabowo subianto untuk melihat perubahan gagasan politiknya di pemilu 2019 dan 2024.

3. Analisis media dan komentar publik

- a) Menelaah artikel berita, opini, dan jurnal akademik yang membahas debat capres serta konteks sosial politik yang mempengaruhi wacana politik Prabowo
- b) Mengumpulkan komentar dari Masyarakat di platform Youtube KPU RI terkait isu HAM dalam debat capres 2019 dan 2024
- c) Menganalisis bagaimana publik menanggapi dan menilai wacana politik yang disampaikan oleh Prabowo terkait isu HAM tahun 2019 dan 2024.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menganalisis data. Analisis data adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mempelajari lebih lanjut tentang subjek yang diteliti atau menangani topik ilmiah dengan memilih di antara pemahaman yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman. Peneliti menggunakan model Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pendekatan ini digunakan untuk membedah bagaimana wacana HAM dibentuk, disampaikan, dan ditransformasikan oleh Prabowo Subianto dalam dua momen debat capres yang berbeda secara waktu dan posisi politik.

a. Struktur Teks (Teksual)

Peneliti menganalisis kutipan-kutipan Prabowo dalam debat capres 2019 dan 2024 yang berkaitan dengan isu Hak Asasi Manusia. Setiap kutipan ditelaah berdasarkan tema utama (makrostruktur), alur argumen (superstruktur), dan pilihan kata serta gaya bahasa (mikrostruktur). Dalam dimensi ini, peneliti menyoroti perubahan strategi retorik, seperti pergeseran dari sikap defensif dan normatif menjadi lebih asertif dan terstruktur saat membahas isu HAM.

b. Kognisi Sosial

Pada dimensi ini, analisis diarahkan pada pengetahuan, memori kolektif, dan ideologi yang mendasari cara Prabowo membingkai isu HAM. Kognisi sosial mencerminkan bagaimana Prabowo sebagai aktor politik merepresentasikan dirinya kepada publik dalam kaitannya dengan masa lalu, posisi politik saat ini, serta persepsi masyarakat terhadap isu HAM. Peneliti mengeksplorasi bagaimana ingatan kolektif tentang peristiwa masa lalu seperti tuduhan pelanggaran HAM berat mempengaruhi cara ia menyusun argumen untuk mempertahankan citra politiknya dan menarik simpati publik.

c. Konteks Sosial

Dimensi ini mengkaji bagaimana situasi sosial-politik Indonesia pada tahun 2019 dan 2024 memengaruhi serta dipengaruhi oleh wacana yang disampaikan Prabowo. Misalnya, pada 2019 Prabowo berada di posisi oposisi sehingga strategi diskursifnya lebih berhati-hati, sementara pada 2024 sebagai bagian dari pemerintahan, ia tampil lebih percaya diri dan terbuka dalam menanggapi isu HAM. Peneliti juga melihat bagaimana dinamika politik, tuntutan publik terhadap transparansi HAM, dan tekanan dari kelompok masyarakat sipil turut memengaruhi isi dan bentuk wacana yang dibangun.

Melalui tiga dimensi tersebut, model analisis wacana kritis Teun A. van Dijk memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa transformasi wacana HAM Prabowo tidak sekadar soal bahasa, tetapi juga menyangkut perubahan posisi kekuasaan, persepsi publik, dan kalkulasi politik dalam dua periode pemilu yang berbeda. Wacana HAM tidak hanya menjadi alat responsif terhadap tuduhan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi konstruksi citra dalam panggung demokrasi elektoral Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa sistematika penulisan penelitian yaitu antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menjelaskan terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian

BAB II: KERANGKA TEORI ANALISIS WACANA KRITIS TEUN VAN DIJK

Pada bagian ini penulis menyajikan teori yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Teori digunakan sebagai kerangka berpikir untuk melaksanakan penelitian untuk bisa dianalisis nantinya. Pada penelitian ini menggunakan teori analisis wacana Kritis Teun Van Dijk dalam bukunya yang berjudul *discourse and power*, yang nantinya kerangka teori tersebut dapat menjadi kerangka berpikir peneliti untuk dianalisis.

BAB III: GAMBARAN UMUM DEBAT CAPRES CAWAPRES 2019 DAN 2024

Pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum pada debat capres 2019 dan 2024 sebagai bahan komparatif, menjelaskan bagaimana debat begitu penting menjelang pemilu dan bagaimana debat mampu mempengaruhi persepsi pemilih.

BAB IV: STRUKTUR WACANA KRITIS PRABOWO SUBIANTO DALAM DEBAT CAPRES TERKAIT ISU HAM TAHUN 2019 DAN 2024

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran bagaimana bentuk struktur wacana yang dilakukan oleh Prabowo pada debat capres 2019 dan 2024 dengan menggunakan teori analisis wacana kritis yang diusung oleh Van Dijk.

BAB V: KONTEKS SOSIAL POLITIK DALAM TRANSFORMASI WACANA KRITIS PRABOWO DALAM DEBAT 2019 DAN 2024

Bagian ini peneliti akan memberikan bagaimana konteks sosial politik Prabowo Subianto melalui wacana dalam debatnya dengan mengaitkannya menggunakan teori wacana milik Teun Van Dijk.

BAB VI: PENUTUP

Bagian ini adalah bab paling akhir pada penulisan laporan penelitian. Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI ANALISIS WACANA KRITIS TEUN VAN DIJK

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan untuk menganalisa transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat capres mengenai isu HAM di tahun 2019 dan 2024. Teori yang digunakan adalah teori Teun Van Dijk untuk menganalisis bagaimana struktur wacana yang digunakan Prabowo dalam menanggapi isu HAM. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan bagaimana definisi konseptual dan teori, konsep wacana, diskursif wacana dan konsep HAM. Berikut penjelasan mengenai kerangka teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti.

A. Teori Wacana dan Analisis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana merupakan suatu pendekatan yang menelaah penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada struktur linguistic tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek diluar kebahasaan yang mempengaruhi makna dan interpretasi teks. Dalam hal ini wacana dipandang sebagai praktik sosial yang mencerminkan dan membentuk realitas. Salah satu konsep wacana kunci dalam analisis wacana adalah intertekstualitas. Gagasan ini merujuk pada hubungan antara satu teks dan teks yang lain. Fairclough menegaskan bahwa setiap wacana selalu terkait dengan wacana wacana sebelumnya dan berpotensi mempengaruhi wacana-wacana yang akan datang. Pemahaman tentang intertekstualitas membantu peneliti mengungkap makna tersembunyi dan ideologi yang terkandung dalam suatu teks atau wacana.

Analisis wacana memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Dalam studi media, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bias dan konstruksi realitas yang dibentuk oleh berita. Dalam bidang politik, analisis wacana membantu memahami retorika dan strategi persuasi yang digunakan oleh para politisi dalam membangun citra dan mempengaruhi publik. Sementara dalam kajian budaya, pendekatan ini berguna untuk melihat

representasi identitas, nilai sosial, dan ideologi yang tersembunyi dalam berbagai bentuk teks, baik verbal maupun visual. Melalui fleksibilitas pendekatannya, analisis wacana kritis menjadi alat penting untuk memahami relasi antara bahasa, kekuasaan, dan struktur sosial dalam berbagai ranah kehidupan.

Analisis wacana kritis (*critical Discourse Analysis*) merupakan cabang penting dimana pendekatan ini berusaha untuk mengungkap hubungan bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Wodak dan Mayer menekankan bahwa CDA bertujuan untuk membongkar ketidaksetaraan sosial yang tercermin dan dipertahankan dalam melalui penggunaan bahasa. Para peneliti CDA sering kali menganalisis wacana politik, media dan institusi untuk mengidentifikasi struktur kekuasaan yang tersembunyi.

Pengertian wacana pada setiap disiplin ilmu memiliki pengertian yang berbeda-beda, wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistic bagian dari kajian pragmatic, wacana juga memiliki kedudukan yang lebih luas dari klausa dan kalimat karena wacana mencakup gagasan konsep dan teks. Setiap tindakan komunikasi merupakan bagian dari wacana, karena komunikasi melibatkan penyampaian pesan, menerima pesan. Wacana juga berupa lisan dan tulis (Syamsuddin & Rohana, 2015). Wacana merupakan konsep yang cukup kompleks dan multidimensi dalam ilmu linguistik dan ilmu sosial, secara umum wacana dapat dipahami sebagai penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas, akan tetapi definisi tersebut hanya menggambarkan sebagian kecil dari konsep wacana tersebut. Untuk memahami wacana secara komperensif perlu dilakukan eksplorasi terhadap berbagai persepektif dan pendekatan yang telah berkembang dalam kajian wacana.

Salah satu definisi wacana yang sering menjadi rujukan ialah dari Gee, yang menyatakan bahwa wacana adalah “bahasa dalam penggunaan” atau “bahasa sebagai tindakan sosial”. Definisi ini menekankan aspek fungsional dari bahasa itu sendiri juga menggarisbawahi bahwa wacana bukan hanya tentang struktur linguistic, tetapi juga tentang bagaimana bahasa digunakan

untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Sementara itu, Fairclough memperluas pemahaman rentang wacana dengan mendefinisikannya sebagai cara untuk mempresentasikan aspek-aspek dunia seperti relasi, proses dan struktur dunia material. Definisi ini menyoroti peran wacana dalam membentuk dan mencerminkan realitas sosial, mengakhiri bahwa bahasa tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga berperan dalam mengkonstruksinya.

Konsep dasar wacana dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci:

- 1) Konteks: Wacana selalu terikat pada konteks sosial, budaya, dan historis tertentu. Pemahaman terhadap konteks sangat penting untuk menginterpretasikan makna wacana secara akurat.
- 2) Intertekstualitas: Setiap wacana terhubung dengan wacana-wacana lain, baik yang mendahuluinya maupun yang akan datang. Konsep ini menekankan bahwa makna tidak pernah bersifat tetap atau terisolasi.
- 3) Ideologi: Wacana sering kali mencerminkan dan memperkuat ideologi tertentu. Analisis wacana kritis berusaha mengungkap ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa.
- 4) Kekuasaan: Wacana memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Ia dapat digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat.
- 5) Identitas: Wacana berperan dalam pembentukan dan negosiasi identitas, baik individual maupun kolektif.

Perkembangan teknologi dan media baru telah memperluas pemahaman tentang wacana. Konsep wacana digital atau wacana yang dimediasi komputer (computer-mediated discourse) telah muncul sebagai area kajian yang signifikan. Herring dan Androutsopoulos mendefinisikan wacana digital sebagai "komunikasi yang terjadi ketika manusia berinteraksi melalui pesan yang ditransmisikan jaringan komputer". Definisi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi online, dari email hingga media sosial. Dalam konteks analisis wacana, penting untuk memahami perbedaan antara teks dan wacana. Meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki nuansa yang berbeda. Teks umumnya merujuk pada produk linguistik

yang konkret dan dapat diobservasi, sementara wacana mencakup proses produksi dan interpretasi teks dalam konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, konsep wacana juga memiliki implikasi penting dalam bidang pendidikan. Memahami bagaimana wacana berfungsi dalam konteks pembelajaran dapat membantu pendidik mengembangkan strategi pengajaran yang lebih reflektif dan kontekstual. Hyland (2017:18) menyoroti pentingnya kesadaran akan konvensi wacana akademik dalam membentuk literasi siswa. Melalui pemahaman ini, siswa tidak hanya diajak untuk memahami isi dari sebuah teks, tetapi juga bagaimana struktur dan gaya penyampaiannya mencerminkan norma-norma dan praktik-praktik diskursif dalam dunia akademik.

Salah satu pendekatan yang berpengaruh dalam memahami wacana adalah teori tindak tutur (*speech act theory*) yang dikembangkan oleh Austin dan Searle. Teori ini menekankan bahwa ujaran tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan. Consenza menjelaskan bahwa pemahaman tentang tindak tutur sangat penting dalam analisis wacana, karena membantu mengungkap niat dan efek dari penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Dalam era globalisasi, kajian wacana turut berkembang dengan munculnya konsep *wacana transnasional* sebagai salah satu area yang menarik untuk ditelaah. Pendekatan ini mengkaji bagaimana wacana dapat bergerak melintasi batas-batas nasional dan budaya, serta berkontribusi dalam pembentukan pemahaman global terhadap berbagai isu (Canagarajah, 2018:41). Dinamika ini menunjukkan bahwa wacana tidak lagi bersifat lokal atau terbatas pada konteks tertentu, melainkan turut berinteraksi dalam ranah transkultural yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai definisi dan konsep dasar wacana menjadi sangat penting bagi siapa pun yang ingin melakukan analisis wacana secara kritis. Meski demikian, perlu disadari bahwa bidang ini bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan. Definisi maupun pendekatan terhadap wacana dapat berubah dan dinegosiasikan ulang seiring munculnya perspektif baru dalam studi bahasa, komunikasi, dan masyarakat.

Analisis wacana kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan perubahan lanskap komunikasi global. Integrasi dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin mungkin akan membuka peluang baru untuk analisis wacana otomatis dalam skala besar. Namun, tantangan etis dan metodologis yang muncul dari perkembangan ini juga perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sejarah dan perkembangan analisis wacana mencerminkan evolusi pemahaman kita tentang peran bahasa dalam kehidupan sosial. Dari akarnya dalam linguistik struktural hingga pendekatan kontemporer yang multidisipliner, analisis wacana terus memberikan wawasan berharga tentang bagaimana makna diciptakan, dinegosiasikan, dan dikontestasi dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Analisis wacana, sebagai sebuah bidang studi yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemunculannya. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam bidang linguistik dan ilmu sosial, serta respon terhadap kompleksitas komunikasi dan interaksi manusia modern. Akar dari analisis wacana dapat ditelusuri hingga pertengahan abad ke-20, ketika para ahli bahasa mulai menyadari keterbatasan pendekatan bahasa yang hanya berfokus pada tataran kalimat. Johnstone (2018) menjelaskan bahwa pada periode ini mulai muncul kesadaran bahwa makna bahasa tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Kesadaran ini mendorong lahirnya pendekatan baru yang mengalihkan fokus dari analisis linguistik mikro ke struktur makro, yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ideologi dalam praktik berbahasa.

Salah satu tonggak penting dalam pengembangan analisis wacana adalah karya Zellig Harris pada tahun 1952. Harris memperkenalkan istilah “analisis wacana” dan mengusulkan metode untuk memperluas analisis linguistik di luar batas-batas kalimat. Meskipun pendekatannya masih sangat strukturalis, kontribusinya membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana unit-unit bahasa yang lebih besar bekerja dalam membentuk makna. Perkembangan ini semakin pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika

berbagai disiplin ilmu mulai memberikan kontribusi penting dalam evolusi analisis wacana. Teori tindak tutur yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan John Searle, misalnya, menekankan dimensi performatif bahasa. Mereka menunjukkan bahwa ujaran tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan tindakan itu sendiri-sebuah pendekatan yang memperluas pemahaman tentang fungsi bahasa dalam interaksi sosial.

Pada periode yang sama, etnometodologi dan analisis percakapan yang dipelopori oleh Harold Garfinkel dan Harvey Sacks memberikan perspektif baru tentang struktur dan organisasi interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan-pendekatan ini menekankan pentingnya mempelajari bahasa dalam konteks alamiah penggunaannya, dan mengalihkan fokus dari teks tertulis ke interaksi lisan yang otentik. Selain itu, tahun 1970-an juga menandai kemunculan linguistik teks sebagai bidang studi yang terpisah. Tokoh-tokoh seperti Teun A. van Dijk memelopori pendekatan ini dengan fokus pada struktur dan fungsi teks sebagai unit linguistik yang lebih besar dari kalimat. Linguistik teks memberikan landasan teoretis dan metodologis yang kuat untuk pengembangan analisis wacana yang lebih kompleks (Bhatia, 2017:12).

Memasuki tahun 1980-an, analisis wacana mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan lahirnya pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Pendekatan ini dipelopori oleh para ahli seperti Norman Fairclough, Ruth Wodak, dan Teun A. van Dijk, yang mencoba mengungkap hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam berbagai praktik sosial. CDA memandang bahwa wacana tidak pernah netral; bahasa berperan aktif dalam membentuk dan mereproduksi ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat (Wodak & Meyer, 2016:4). Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya menganalisis struktur bahasa, tetapi juga menyoroti konteks sosial, historis, dan politik yang melingkupi teks.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21 menambah kompleksitas dalam praktik wacana. Kemunculan internet dan media digital telah melahirkan bentuk-bentuk wacana baru yang lebih dinamis, cepat, dan meluas. Fenomena

ini menuntut pendekatan analisis yang lebih inovatif dan adaptif untuk memahami bagaimana kekuasaan, ideologi, dan identitas dimediasi melalui platform digital yang beragam. Analisis wacana dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian wacana dalam ilmu politik karena memusatkan perhatian pada bagaimana penggunaan wacana politik Prabowo dalam debat mengenai isu HAM pada debat capres 2019 dan 2024, wacana-wacana tersebut tentu memiliki arti dan tujuan politik tertentu serta pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 tentunya Prabowo mengalami transformasi dalam wacananya.

Teun A. van Dijk adalah tokoh penting dalam tradisi Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis, CDA) karena ia memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan teori dan metodologi di bidang ini. Van Dijk terkenal karena pendekatannya yang menggabungkan studi konteks sosial dan kognitif dengan analisis linguistik. Ia menekankan bahwa untuk memahami wacana secara kritis, tidak cukup hanya dengan menganalisis struktur teks, tetapi juga harus mempertimbangkan kognisi sosial, yaitu bagaimana pengetahuan dan ideologi membentuk pikiran orang, dan bagaimana konteks sosial-politik mempengaruhi penciptaan dan interpretasi wacana.

Model tiga dimensi, yang meliputi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial, merupakan ciri khas dari teori Van Dijk. Dimensi struktur teks membahas bagaimana teks dibentuk oleh superstruktur (yang meliputi struktur global seperti pendahuluan, isi, dan penutup), struktur makro (yang meliputi tema utama), dan struktur mikro (yang meliputi kalimat, pilihan kata, koherensi, dan lain-lain). Namun, kognisi sosial membahas bagaimana aktor sosial memproses data, membuat opini, dan menciptakan representasi mental dari suatu isu. Konteks sosial juga membahas hubungan antara kekuasaan, akses terhadap wacana, dan kontrol atas produksi dan penyebaran pengetahuan. Pendekatan Van Dijk yang komprehensif menjadikan AWK sebagai alat untuk menganalisis teks sekaligus sebagai platform untuk memahami dinamika dominasi, ideologi, dan perlawanan dalam masyarakat. Studi tentang wacana

politik, media, rasisme, dan pendidikan sangat dipengaruhi oleh karyanya. Dalam konteks penelitian ini, model Van Dijk sangat relevan untuk melihat bagaimana transformasi wacana politik Prabowo Subianto terjadi pada dua momen politik yang berbeda, yaitu Pemilu 2019 dan 2024.

B. Dimensi Analisis Wacana Teun Van Dijk

Teori Analisis wacana kritis oleh Teun A. Van Dijk dalam karyanya *Discourse and Power* (2008) secara epistemologis *Critical Discourse Analysis* (CDA) atau analisis wacana kritis telah mengalami perkembangan. CDA sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari bagaimana bahasa dan wacana untuk menyebarkan ide, membahas kekuasaan atau pengaruh (ideologi). CDA juga memiliki pendekatan yang berbeda-beda pada setiap tokoh seperti Van Dijk dimana dia lebih fokus terhadap struktur wacana dan bagaimana hubungan antara wacana dengan kekuasaan melalui pendekatan sosio-kognitif. Pendekatan ini adalah cara bagaimana sebuah wacana mempengaruhi pikiran setiap individu lebih oleh penguasa untuk mengontrol cara orang berpikir, membungkam atau menekan kelompok tertentu.

Pandangan Van Dijk terus berkembang yang pada awalnya hanya fokus terhadap struktur wacana yaitu bagaimana teks atau pembicaraan disusun, kemudian Van Dijk mulai memperhatikan bagaimana interaksi sosial dalam sebuah wacana. Bagaimana wacana mampu digunakan dalam kehidupan nyata untuk mempertahankan atau melawan kekuasaan, sehingga Van Dijk menegaskan CDA perlu dijadikan sebagai alat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, mendukung kelompok minoritas. Artinya Van Dijk percaya bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perlawanan karena menurutnya orang yang ditekan tidak selalu pasif, dan masih bisa melawan melalui wacana mereka sendiri.

Pemahaman terkait wacana mengalami perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari wacana sering dianggap sebagai rencana atau ide yang belum terwujud bahkan dianggap sebagai angan-angan, hal itu juga terjadi dalam lingkungan politik yang kerap kali mengatakan “hal itu sudah diwacanakan”

pada kenyataannya hal tersebut masih berupa perkiraan yang belum terealisasi, atau belum berupa tindakan. Dalam konteks studi wacana, pemahaman terkait wacana sebenarnya lebih dari itu seperti Foucauldian yang memahami wacana sebagai sebagai suatu yang lebih kompleks. Van Dijk memahami wacana bukan hanya sebatas angan akan tetapi terdapat bentuk tindakan. Oleh karena itu wacana sebagai sebuah tindakan yang disengaja atau senantiasa melalui pikiran terlebih dahulu artinya wacana tidak terjadi begitu saja tanpa tujuan. Karena wacana merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna dan maksud sosial maka pelakunya perlu bertanggung jawab atas apa yang ditulis atau dibicarakan. Karena wacana sebagai sebuah praktik sosial maka biasanya dalam sebuah wacana dipengaruhi oleh konteks sosial seperti siapa yang berbicara, dimana dan mengapa.

Bagi Van Dijk studi wacana sebagai sebuah struktur dan proses, artinya dalam struktur tersebut bagaimana wacana dibentuk seperti tata bahasa, makna kata, dan gaya bicara sedangkan dalam proses yaitu bagaimana wacana itu mampu mempengaruhi orang lain baik dalam sikap, kepercayaan, emosi bahkan tindakan. Van Dijk juga menyoroti bahwa makna dalam wacana itu terbilang kompleks karena makna tidak hanya tentang satu atau dua kalimat, akan tetapi tentang bagaimana semua kalimat dalam wacana tersebut saling terhubung (koherensi). Dalam menentukan makna sebuah wacana itu terhubung atau tidak bisa dilihat melalui analisis mikro dan makro, kalimat-kalimat dalam wacana perlu adanya kesinambungan sehingga masuk akal dan nantinya mampu mempengaruhi audien. Meskipun demikian sebuah wacana tidak hanya fokus terhadap koheren atau tata bahasa akan tetapi perlu adanya analisis yang mendalam terhadap konteks sosial, termasuk bagaimana wacana itu sendiri mampu mempengaruhi struktur sosial.

Dalam karyanya “Wacana sebagai struktur dan proses” Van Dijk mengatakan bahwa untuk memahami konsep wacana perlu melewati (struktur teks), kognisi sosial, dan konteks sosial yang merupakan tiga dimensi wacananya.

a. Pengguna bahasa (struktur teks)

Van Dijk membagi berbagai tingkatan yang saling mendukung satu sama lain yaitu:

1) Struktur makro

Struktur makro adalah struktur atau bagian besar dari teks, perspektif umum yang dapat diketahui dari topik atau subjek yang ditekankan (Ratnaningsih, 2019). Artinya struktur makro merupakan hubungan antara teks dan konteks sosial atau budaya yang cakupannya lebih luas. Tema suatu teks tidak dinyatakan langsung eksplisit disuatu teks, tetapi dimasukkan ke keseluruhan teks dalam bentuk yang koheren. Oleh karena itu, tema sebuah teks dapat ditemukan dengan membaca keseluruhan teks sebagai sebuah wacana sosial, sehingga dapat diketahui gagasan utama, tema atau ide yang dikembangkan dalam teks tersebut (Mulyawan, 2010).

2) Suprastruktur

Superstruktur adalah level yang menjelaskan bagaimana teks diorganisasikan dalam wacana secara keseluruhan secara tersusun (Ratnaningsih, 2019) Teun A. Van Dijk mendefinisikan "superstruktur" atau "skematik" untuk menggambarkan jenis teks wacana yang biasa. Penutur menggunakan skenario untuk menonjolkan apa yang ingin diungkapkan dan apa yang ingin disembunyikan (Prihartono, 2022). Pendahuluan, isi, kesimpulan, dan penutup biasanya terdapat dalam superstruktur baik dalam berita, debat dan pidato. Dalam analisis wacana kritis Van Dijk menggunakan konsep ini guna untuk mendukung agenda, kekuasaan atau ideologi dalam suatu wacana.

3) Struktur mikro

Struktur mikro adalah wacana yang terdiri dari bagian-bagian teks yang sangat kecil, seperti kata, kalimat, proposisi, parafrase, dan gambar. (Ratnaningsih, 2019). Struktur mikro juga

digunakan untuk menghubungkan antara kalimat dalam satu paragraf yang digunakan untuk membangun makna wacana.

b. Kognisi Sosial

Van Dijk menggunakan istilah “kognisi sosial” untuk menganalisis wacananya, dan dia percaya bahwa penelitian terhadap kognisi sosial yang membentuk teks sangat diperlukan. Menurut Van Dijk analisis teks bukanlah satu-satunya cara untuk memahami struktur teks karena banyak pendapat, ideologi, dan makna yang membentuk struktur teks. Kognisi sosial melihat bagaimana wacana yang berkembang di masyarakat dijelaskan, serta proses penciptaan dan reproduksi peristiwa. Pada dasarnya, semua teks yang ditulis oleh pengguna bahasa berasal dari pengetahuan, prasangka, atau pengalaman mereka tentang suatu peristiwa.

c. Konteks Sosial

Konteks sosial berguna untuk meneliti wacana yang berisat dinamis dan berkembang di lingkungan, menurut Van Dijk ada 2 hal yang penting untuk menganalisis poin-poin untuk mengetahui masyarakat kekuasaan dan akses. Van Dijk menganggap kekuasaan sebagai kekuatan yang memungkinkan satu kelompok mengendalikan kelompok lain. Sumber kekuasaan dinilai berdasarkan kepemilikan yang secara umum berharga, seperti pengetahuan, status, dan uang.

Menurut analisis wacana Van Dijk, akses orang dalam setiap kelompok berbeda, dan kelompok yang lebih kuat memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan daripada kelompok yang kurang kuat, sehingga mereka cenderung memiliki akses yang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran publik.

C. Diskursus, Konsep Wacana dan Representasi HAM

Diskursus atau wacana berasal dari bahasa latin *discursus* yang memiliki arti “lari bolak balik” merupakan jenis komunikasi yang dapat

berlangsung secara tulisan dan lisan. Diskursus adalah istilah filosofis yang dikembangkan oleh Michel Foucault yang kemudian diterbitkan dalam karyanya, di Eropa Foucault salah satu ahli teori kunci dari subjek terutama diskursus dan menulis *the archaeology of knowledge*. Diskursus sendiri merupakan topik utama dalam teori sosial seperti sosiologi, antropologi, filsafat continental, dan analisis diskursus. Diskursus secara sederhana dapat didefinisikan sebagai diskusi tentang materi apapun baik dalam pidato atau tulisan. Diskursif wacana merujuk pada cara-cara di mana wacana dibentuk, diproduksi, disebar, dan dikonstruksi dalam konteks sosial tertentu. Dalam pendekatan analisis wacana kritis, istilah “diskursif” menunjukkan bahwa wacana bukan hanya sekadar produk bahasa, tetapi juga merupakan bagian dari praktik sosial yang melibatkan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial.

Menurut Teun Van Dijk wacana juga bersifat diskursus karena dipengaruhi oleh struktur sosial, kognitif, dan politik yang artinya wacana tidaklah berdiri sendiri akan tetapi terbentuk melalui proses komunikasi yang melibatkan aktor sosial, media dan institusi politik. Menurut Fairclough wacana merupakan praktik sosial yang tidak hanya merefleksikan realitas tetapi juga mengkonstruksi realitas dalam konteks politik wacana bisa digunakan untuk membentuk opini publik, menciptakan legitimasi atau bahkan mengontrol narasi tertentu dalam masyarakat. Bahasa tidak pernah netral, menurut konsep diskursif wacana. Ia selalu bergantung pada posisi sosial, ideologi, dan tujuan komunikasi pembicara.

Definisi wacana sangat beragam yang menunjukkan betapa kompleksnya wacana digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Konsep wacana banyak digunakan dalam bidang linguistik, ilmu sosial, budaya, politik, dan pendidikan yang menyebabkan keragaman ini. Akibatnya, makna wacana dapat berubah sesuai dengan bidang akademis yang bersangkutan. Dalam lingkup linguistik, wacana sering dikaitkan dengan cabang-cabang linguistik terapan seperti linguistik teks, pragmatik, dan sosiolinguistik. Pendekatan-pendekatan ini mempelajari wacana sebagai praktik komunikasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, dan ideologi (Dwiningsih, 2019).

Diskursus atau wacana juga diterapkan dalam dunia politik yang bisa dilihat dari bagaimana politisi, media atau institusi tertentu membangun serta menyebarkan narasi untuk mempengaruhi opini publik, Konsep wacana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai diskursus, terutama dalam konteks bagaimana bahasa membentuk realitas sosial dan politik. Diskursus dipahami sebagai praktik sosial yang menciptakan dan menyebarkan makna melalui bahasa, baik secara lisan maupun tertulis, dalam konteks kekuasaan dan ideologi. Dalam studi wacana kritis, diskursus dilihat sebagai sarana dominasi maupun perlawanan, yang mengatur cara individu atau kelompok memahami isu tertentu, termasuk isu-isu hak asasi manusia (HAM). Seperti yang dikatakan Van Dijk wacana tidaklah berdiri sendiri akan tetapi terdapat hal yang melatar belakangnya yang biasanya berkaitan dengan konteks sosial, kekuasaan dan ideologi yang saat itu berkembang. Penerapan diskursif wacana dalam politik bisa dilihat dari bagaimana wacana tertentu berubah sesuai dengan kepentingan politik, situasi yang dominan.

Politik, pada hakikatnya, adalah arena pertarungan ide dan kekuasaan yang diartikulasikan melalui bahasa. Analisis wacana dalam konteks politik membuka jendela pemahaman yang kaya tentang bagaimana kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan ditantang melalui praktik-praktik diskursif. Debat politik, sebagai arena konfrontasi langsung antara aktor-aktor politik, menghadirkan dinamika wacana yang unik. Tolson menekankan bahwa analisis wacana terhadap debat politik perlu mempertimbangkan tidak hanya isi argumen, tetapi juga aspek-aspek performatif seperti intonasi, gestur, dan manajemen giliran bicara. Melalui analisis semacam ini, kita dapat memahami bagaimana kekuasaan dan otoritas dinegosiasikan secara real-time dalam interaksi politik. Wodak dan Forchtner (2018: 5) menegaskan bahwa analisis wacana politik tidak hanya berfokus pada *apa* yang dikatakan dalam arena politik, tetapi juga bagaimana sesuatu dikatakan, dalam konteks apa, dan dengan efek apa. Pendekatan ini menempatkan bahasa politik bukan sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebagai medan pertempuran simbolik tempat berbagai ideologi dan kepentingan saling beradu dan dinegosiasikan.

Konteks sosio-politik yang lebih luas turut membentuk dinamika wacana dalam debat politik. Van Dijk (2020: 118) menekankan pentingnya "model konteks" dalam analisis wacana, yakni kumpulan pengetahuan bersama, sikap, dan ideologi yang dimiliki oleh peserta debat maupun audiens. Oleh karena itu, analisis wacana debat politik harus memperhatikan bagaimana elemen-elemen kontekstual ini memengaruhi pilihan bahasa dan strategi argumentatif yang digunakan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, istilah hak asasi manusia ini sebenarnya berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris), Right dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara. Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenangan kekuasaan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Namun, walaupun hak-hak tersebut didapat manusia dalam keadaan alami, hak-hak asasi dan kebebasannya belum terjamin. Dan agar kebebasan dan HAM tersebut terjamin, maka mereka sepakat untuk mengakhiri keadaan alami ini dengan membentuk negara. Negara menurut John Locke, mempunyai tujuan menjaga dan menjamin terlaksananya kebebasan dan HAM.

Hak Asasi Manusia dalam konteks politik dan debat capres, dalam ranah politik, Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya di pandang sebagai norma hukum, akan tetapi dipandang juga sebagai alat diskursif yang kerap digunakan untuk membangun citra politik, menyerang lawan atau mencari legitimasi kekuasaan, isu HAM menjadi sangat strategis terutama dalam momen debat capres dimana para kandidat berupaya menarik simpati public melalui isu-isu yang sensitive dan menyentuh nilai keadilan sosial, isu HAM di Indonesia tergolong topik yang cukup sentral yang mencerminkan sensitivitas public terhadap keadilan, kebebasan dan rekam jejak politik kandidat.

Dalam ranah politik, representasi isu hak asasi manusia sangat bergantung pada cara para aktor politik berbicara serta bagaimana media. Pengamat politik, Masyarakat, berita membingkai suatu isu HAM. Wacana politik tentang HAM tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan citra, membingkai isu, mempengaruhi opini publik, dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, representasi hak asasi manusia dalam diskusi politik selalu dipengaruhi oleh kepentingan, strategi, dan konteks sosial-politik tertentu. Fairclough (1992) menyatakan bahwa wacana tidak hanya menunjukkan realitas, tetapi juga membentuk realitas sosial. Dalam situasi ini, isu-isu hak asasi manusia dapat dipahami dengan berbagai cara, tergantung dari cara yang paling populer digunakan dalam perdebatan politik serta konteks sosialnya. Sebagai contoh, seorang politisi dapat menggunakan frasa “pelanggaran hak asasi manusia” untuk menyerang lawan politiknya atau, sebaliknya, menafsirkan ulang sejarah untuk menutupi keterlibatannya dalam pelanggaran tersebut. Di sinilah analisis wacana kritis menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana representasi hak asasi manusia disembunyikan di balik tuduhan-tuduhan politik.

Representasi terkait HAM pada masa debat 2019 dan 2024 terbilang cukup berbeda, banyak hal yang melatar belakangi aktor politik dalam membingkai isu HAM terlebih menjelang debat, representasi bukan hanya isi dari isu HAM akan tetapi bagaimana cara dan gaya penyempaian serta makna

yang dibentuk dari penyempaian itu. Representasi isu HAM dalam debat capres tahun 2019 dan 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari isi isu yang dibahas, tetapi juga dari cara, gaya penyampaian, serta makna yang dibentuk dalam proses penyampaian tersebut. Pada tahun 2019, isu HAM lebih berfokus pada aspek penegakan hukum, kebebasan berpendapat, hak minoritas, dan disabilitas. Artinya, pembahasan HAM di tahun tersebut masih terbatas dan tidak menimbulkan ketegangan yang cukup signifikan. Sementara itu, pada tahun 2024, pemingkakan isu HAM lebih terpusat pada keadilan, penyelesaian pelanggaran HAM, serta penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tema HAM pada tahun 2024 menjadi lebih dominan dan kompleks dalam wacana debat. Dalam hal ini, Prabowo sebagai aktor politik menunjukkan perbedaan respons yang cukup mencolok dibandingkan tahun 2019. Selain itu, media juga turut membingkai isu HAM secara beragam baik dalam narasi yang mendukung maupun yang bersifat kritis yang semakin memperkaya dinamika representasi HAM dalam kontestasi politik tersebut.

D. Dinamika Sosial-Politik dalam Praktik Wacana

Praktik diskursus dalam arena politik, khususnya dalam debat calon presiden, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial politik yang menyertainya. Dalam konteks ini, aktor-aktor seperti media massa, elit politik, dan opini publik memainkan peran krusial dalam membentuk, menyebarluaskan, dan mempengaruhi wacana politik yang berkembang. Media, sebagai saluran utama penyebaran informasi politik, tidak hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh para kandidat, tetapi juga membingkai narasi dan makna tertentu melalui pilihan kata, visual, dan fokus pemberitaan. Pemingkakan media ini sering kali berkelindan dengan kepentingan politik tertentu dan dapat membentuk persepsi publik secara luas.

Para elit politik juga berperan dalam memproduksi dan menyebarkan wacana yang menguntungkan posisi politik mereka. Melalui debat capres, para kandidat tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga mempraktikkan

strategi diskursif untuk membangun citra, menegaskan posisi ideologis, dan merespons ekspektasi publik. Sementara itu, opini publik juga turut mempengaruhi dinamika wacana karena menjadi medan resonansi bagi setiap narasi yang dibangun. Respons publik terhadap pernyataan calon presiden dapat memperkuat atau bahkan mendelegitimasi sebuah wacana. Selain itu, transformasi konstelasi politik dari posisi oposisi menjadi koalisi pemerintahan juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap praktik diskursif para kandidat. Prabowo Subianto, misalnya, mengalami perubahan posisi politik dari oposisi pada Pemilu 2019 menjadi bagian dari koalisi pemerintahan pada 2024. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi konten dan nada pernyataannya dalam debat, tetapi juga strategi komunikasi politik yang digunakan. Sebagai oposisi, narasi yang disampaikan cenderung kritis terhadap pemerintah, dengan menekankan pada isu-isu hak asasi manusia dan keadilan. Namun, ketika berada di lingkaran kekuasaan, strategi wacana cenderung lebih moderat, defensif, dan menyelaraskan diri dengan pencapaian atau kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, dinamika politik secara langsung mempengaruhi praktik diskursus dalam debat capres. Perubahan posisi politik, respon terhadap tekanan media, dan dinamika opini publik menjadi faktor yang saling terkait dalam membentuk praktik diskursif yang digunakan para kandidat. Menganalisis praktik-praktik tersebut penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan dalam ranah politik elektoral. Debat capres menjadi ruang diskursif yang memungkinkan kandidat untuk mengonstruksi citra diri, membentuk narasi politik, serta menyampaikan komitmen terhadap penegakan HAM. Dalam konteks ini, wacana HAM dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperoleh kepercayaan publik. Kandidat yang dianggap memiliki komitmen kuat terhadap HAM cenderung mendapatkan penilaian positif, sedangkan mereka yang memiliki rekam jejak kontroversial terkait pelanggaran HAM akan lebih rentan diserang secara politis. Pada debat capres Pemilu 2019, isu HAM menjadi isu sentral yang diarahkan kepada Prabowo

Subianto, khususnya terkait dengan tuduhan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam forum tersebut, Prabowo cenderung bersikap defensif, mengelak dari tuduhan, atau membalikkan narasi untuk mereduksi persepsi negatif publik. Namun demikian, pada debat capres Pemilu 2024, wacana HAM yang dibawa oleh Prabowo mengalami transformasi. Sebagai bagian dari pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo lebih menekankan pada aspek stabilitas, keamanan nasional, dan reformasi kelembagaan, yang dalam narasinya tetap dikaitkan dengan penghormatan terhadap HAM.

BAB III

GAMBARAN UMUM DEBAT CAPRES CAWAPRES 2019 DAN 2024

A. Gambaran Umum Debat

Debat capres cawapres merupakan forum resmi yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang dilaksanakan selama lima tahun sekali dalam rangka memberikan ruang bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi dan misi serta pandangan mereka terhadap berbagai isu strategis nasional. Debat juga dijadikan sebagai alat penting bagi masyarakat umum untuk menilai kemampuan, karakter moral, dan metode para kandidat dalam menanggapi isu-isu krusial yang berkaitan dengan masyarakat. Debat menjadi penting karena memberikan kita pemahaman tentang betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang menunggu debat untuk membuat keputusan politik. Debat publik tidak hanya menguji keberanian dan kejelian kandidat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk menilai kemampuan kandidat dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dan kontroversial. Kemampuan kandidat untuk berkomunikasi dalam debat publik sangat diuji, dan kemampuan berbicara yang baik dapat membantu menciptakan kesan bahwa kandidat tersebut adalah pemimpin yang cakap dan percaya diri.

Salah satu tujuan dari komunikasi politik adalah untuk menciptakan citra politik yang baik kepada publik. Citra politik terdiri dari upaya komunikator (kandidat) kepada khalayak untuk menentukan apakah seseorang diterima oleh masyarakat untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Dalam debat capres dan cawapres memiliki format yang berbeda pada setiap tahunnya baik dalam segi isu, tema, teknis pelaksanaan maupun pendekatan yang digunakan untuk menggali respon para kandidat. Salah satu isu yang cukup krusial pada pada debat yaitu isu terkait hak asasi manusia (HAM) karena dalam isu ini menyangkut nilai dasar dalam demokrasi dan perlindungan negara, isu ini bisa

terbilang berkaitan erat dengan salah satu calon kandidat yaitu Prabowo Subianto karena jika dilihat dari masa lalu Prabowo memiliki rekam jejak serius dalam kasus ini. Debat yang berlangsung pada tahun 2019 dan 2024 memperlihatkan sejumlah perbedaan signifikan baik dari segi format, dinamika, kandidat maupun pengemasan isu. Meskipun tema HAM tidak selalu menjadi fokus utama namun tetap muncul dalam pembahasan sebagai bagian dari dimensi hukum, keamanan atau kebijakan lokal dan luar negeri.

B. Debat Capres 2019

Pada tahun 2019 debat presiden diikuti oleh Joko Widodo - Ma'ruf Amin dengan nomor urut 1 dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yang berlangsung dalam lima sesi dan disiarkan secara nasional pada televisi dan youtube. KPU juga menyelenggarakan lima putaran debat untuk calon presiden dan wakil presiden dari 17 Januari hingga 13 April 2019 yang dimana pada setiap putaran memiliki tema debat yang berbeda, tepat pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta debat Pertama membahas mengenai tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Pada debat 2019 kedua kandidat akan menerima daftar pertanyaan dari para panelis beberapa hari sebelum hari H. Hal ini dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Menurut Arief Budiman selaku ketua KPU menyatakan jika penyelenggaraan debat kali ini banyak didasarkan pada usul dan hasil kesepakatan bersama antara KPU, tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Mekanisme seperti ini memanglah baru pertama kali dalam praktik debat capres dan cawapres dimana pertanyaan disampaikan lebih dahulu, dengan mekanisme seperti demikian diharapkan kedua pasangan calon mampu lebih siap dalam memberikan jawaban ketika debat capres berlangsung. Debat pertama yang mengangkat isu HAM, hukum, korupsi dan terorisme pasangan calon diharapkan perlu siap menjawab pertanyaan apapun mengenai hal tersebut terlebih mengenai kasus HAM dalam penyelesaiannya sehingga pada debat capres 2019 pasangan calon melakukan simulasi debat untuk mempersiapkan diri nantinya, tidak hanya fokus terhadap

pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya akan tetapi paslon perlu memiliki teknik penyampaian jawaban yang tepat pada debat. Tema ini menarik banyak perhatian karena Prabowo Subianto memiliki latar belakang militer dan diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk keterlibatan aktivis pada tahun 1998. Topik ini menjadi sangat sensitif dan menegangkan baik di atas panggung maupun di ruang publik ketika muncul dalam debat.

Prabowo Subianto telah lama dikaitkan dengan dugaan kasus HAM berat terutama terkait peristiwa penculikan dan penghilangan aktivis pada tahun 1998, karena jika ditarik ke masa lalu Prabowo Subianto pada masa orde baru yang saat itu dirinya menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) dalam posisi tersebut Prabowo diduga memiliki tanggung jawab atas aksi penculikan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh timnya, komnas HAM telah menyimpulkan bahwa hal tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Akibat dari dugaan tersebut Prabowo diberhentikan dari dinas militer pada tahun 1998 akan tetapi dia tidak pernah di adili di pengadilan sipil akan kasus tersebut. Menjelang debat capres 2019 Prabowo dan tim suksesnya secara terbuka menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat yang di maksud, bahkan sebelum debat juru bicara BPN mengatakan bahwa tuduhan yang diberikan pada Prabowo disebut sebagai fitnah yang bermuatan politik. Pada debat capres 2019 cara para kandidat berkomunikasi mencerminkan keyakinan politik mereka. Prabowo mencoba meyakinkan publik bahwa dia adalah pemimpin yang berani dan kuat dalam menentang ketidakadilan, ia tampil lebih tegas, emosional, dan retorik. Dia mengkritik pemerintah petahana dengan bahasa yang lugas dan terkadang provokatif.

Sebaliknya, Joko Widodo cenderung mempertahankan sikap defensif, menekankan pencapaian pemerintahannya dan menghindari adegan emosional. Pada tahun 2019, format debat masih bersifat formal dan kaku. Pembagian waktu bicara yang ketat dan pembatasan sesi tanya jawab membuat diskusi menjadi kurang interaktif. Oleh karena itu, ketegangan terus muncul karena

kedua kandidat menggunakan ruang yang tersedia untuk membingkai isu-isu tertentu untuk memperkuat citra politik mereka sendiri. Salah satu isu yang paling sering diperdebatkan oleh warganet adalah isu hak asasi manusia (HAM), baik dari segi substansi maupun cara para kandidat menanggapi dalam debat. Jokowi dan Prabowo tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM seperti tragedi 1965, Tanjung Priok, Talangsari, Mei 1998, masih belum terselesaikan. Bahkan, kedua pasangan calon mengalihkan pembahasan dari kasus HAM ke pemberian hak-hak rakyat dalam banyak kasus. Calon presiden 01 Jokowi juga mengakui sulitnya menyelesaikan kasus-kasus HAM yang signifikan. Oleh karena itu, debat capres-cawapres 2019 tidak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga menjadi tempat untuk menyebarkan dan pertukaran wacana politik yang penting. Dinamika wacana debat sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena situasi politik yang tegang, isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, dan format debat yang terbatas.

Pemilu di tahun 2019 Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menginginkan partainya tetap berada di posisi oposisi pasca-Pilpres 2019. Menurutnya, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen untuk menjaga keberlangsungan demokrasi melalui mekanisme check and balance, di mana peran oposisi menjadi penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Syafi'i menegaskan bahwa keinginan Prabowo sejalan dengan aspirasi mayoritas kader partai yang cenderung memilih posisi oposisi. Ia juga menambahkan bahwa Gerindra telah memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, baik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009–2014) maupun pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014–2019). Pengalaman tersebut membuat perdebatan internal mengenai arah politik partai menjadi semakin berkurang.

Terkait koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo memberikan kebebasan kepada partai-partai yang tergabung dalam koalisi tersebut untuk menentukan sikap politik masing-masing setelah Pilpres 2019. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Partai Gerindra untuk membentuk koalisi oposisi bersama partai lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau bahkan Partai Amanat Nasional (PAN), jika mereka memutuskan untuk berada dalam posisi yang sama. Meski berada di luar pemerintahan, Prabowo tetap membuka kemungkinan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019–2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun, ia menekankan bahwa rekonsiliasi tersebut bukanlah bentuk transaksi politik atau negosiasi jabatan, sebagaimana isu yang berkembang.

Pada debat capres 2019, Prabowo Subianto menyampaikan narasi politik yang cenderung mengkritik kebijakan pemerintah petahana, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kedaulatan ekonomi nasional. Narasi Prabowo menekankan posisinya sebagai representasi oposisi yang kuat, dengan menyoroti kritik terhadap kesenjangan sosial, lemahnya perlindungan hak asasi manusia, dan dominasi asing di sektor-sektor strategis. Secara ideologis, Prabowo mengusung ide nasionalisme kerakyatan dengan retorika yang menekankan perlunya kemandirian bangsa, memperkuat pertahanan nasional, dan melindungi rakyat kecil. Hal ini tercermin dari gaya penyampaian yang tegas dan konfrontatif, serta pilihan diksi yang cenderung emosional dan retorik. Pendekatan ini berujung pada terbentuknya citra sebagai pemimpin yang pro-rakyat, anti-oligarki, dan siap membawa perubahan pada struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil.

Namun, dalam konteks ini, narasi Prabowo juga menunjukkan kehati-hatian dalam membahas isu-isu sensitif, seperti pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Ketika topik hak asasi manusia diangkat, Prabowo cenderung merespons dengan jawaban yang defensif atau mengalihkan diskusi ke isu lain yang lebih netral. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga citra politiknya sekaligus menghindari serangan balik yang dapat merugikan secara elektoral.

Secara keseluruhan, posisi ideologis Prabowo dalam debat capres 2019 dapat dikategorikan sebagai oposisi populis nasionalis yang berusaha membangun legitimasi melalui kritik terhadap status quo, dengan memposisikan diri sebagai alternatif bagi masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan petahana.

C. Debat Capres 2024

Debat capres-cawapres pada Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana politik yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan tahun 2019. Salah satu perbedaan mendasar yang memengaruhi situasi debat adalah format pemilihan dengan tiga pasangan calon, yakni:

- A. Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar
- B. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka
- C. Ganjar Pranowo – Mahfud MD

Tema debat yang diangkat pada debat capres 2024 terbilang cukup kompleks, debat capres pertama pada 12 Desember 2023 membahas tentang hukum, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat. Format debat yang diterapkan pada debat capres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU sebenarnya mengalami perubahan dengan tema debat pada tahun sebelumnya, untuk debat capres 2025 masih dilaksanakan sebanyak lima sesi dimana tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk wakil presiden akan tetapi semua calon capres dan cawapres saling mendampingi yang diharapkan untuk menunjukkan kekompakan para paslon. Isu-isu penting seperti hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan demokrasi kembali menjadi bahan perdebatan. Karena setiap pasangan memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, pendekatan terhadap isu-isu juga cenderung lebih strategis dan bervariasi.

Dinamika debat berubah secara signifikan dengan hadirnya tiga kandidat presiden dan wakil presiden. Hal ini tidak hanya menambah variasi gaya komunikasi dan argumentasi politik, tetapi juga menciptakan strategi yang lebih luas untuk saling menyerang. Para kandidat harus siap menghadapi

kritik dari berbagai sudut pandang, bukan hanya menyerang satu lawan. Hal ini menjadikannya lebih rumit, cepat berubah, dan penuh dengan gerakan politik. Beberapa faktor penting juga mempengaruhi keadaan politik selama debat berlangsung. Salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden meskipun tidak memenuhi usia minimum empat puluh tahun. Kontroversi dan diskusi mengenai etika politik, kekuasaan, dan dinasti politik muncul sebagai akibat dari keputusan ini. Isu-isu penting seperti hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan demokrasi kembali menjadi bahan perdebatan. Karena setiap pasangan memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, pendekatan terhadap isu-isu ini cenderung lebih strategis dan bervariasi misalnya:

1. Prabowo Subianto, sebagai calon presiden dengan posisi politik yang lebih moderat dan berkolaborasi dengan partai-partai pemerintah, mungkin akan menanggapi isu-isu hak asasi manusia dengan lebih santai dan menggunakan narasi rekonsiliasi dan nasionalisme untuk menyeimbangkan persepsi publik.
2. Anies Baswedan mengkritik status quo pemerintah dengan bahasa yang sistematis dan akademis serta sering menekankan pentingnya penegakan hukum dan keadilan sosial.
3. Ganjar Pranowo berusaha jujur dengan gaya bicaranya yang membumi, namun mendapat sorotan karena penampilan debat yang dianggap kurang tajam di beberapa sesi.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi lebih penting dan sensitif dalam debat Pilpres 2024 dibandingkan dengan 2019 isu-isu HAM tidak lagi dibahas secara singkat dan normatif, melainkan dibahas secara lebih akurat dan kritis. Hal ini menunjukkan bahwa isu HAM menjadi semakin penting dalam konteks politik nasional. Pada tahun 2024, Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden dari koalisi pemerintah setelah bertahan sebagai calon presiden dari pihak oposisi pada tahun 2019. Cara Prabowo berbicara tentang hak asasi

manusia dipengaruhi oleh perubahan posisi politiknya. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, ia melihat isu-isu HAM dengan cara yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, dan ia berkomitmen untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak warga negara dalam konteks stabilitas politik dan kemajuan nasional. Dengan mengubah posisinya menjadi bagian dari koalisi pemerintahan dan bukan oposisi, komunikasi dan retorikanya menjadi lebih inklusif dan fokus pada solusi konkret.

Transformasi ini menunjukkan dinamika politik yang lebih rumit, di mana isu-isu hak asasi manusia menjadi pusat pembicaraan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa posisi Prabowo dalam koalisi pemerintah memungkinkan adanya diskusi yang lebih konstruktif mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun tahun 2024 mungkin terlihat “lebih dingin” daripada tahun 2019 yang penuh polarisasi, ketegangan masih dapat dirasakan di beberapa titik, terutama ketika membahas isu-isu sensitif seperti korupsi dan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat kini lebih kritis terhadap pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif atau tidak substansial. Secara keseluruhan para kandidat capres dan cawapres 2024 menunjukkan adanya perubahan dalam cara para kandidat membangun wacana politik. Tidak hanya bergantung pada apa yang dibicarakan dalam debat tetapi juga bagaimana mereka membingkai cerita, membuat kesan, dan menggunakan taktik komunikasi lintas media. Situasi debat kali ini sangat penting untuk melihat perubahan wacana politik, terutama bagaimana Prabowo Subianto mengubah pendekatan komunikasinya dibandingkan tahun 2019.

Persepsi publik terhadap isu HAM juga berubah seiring dengan perubahan konstelasi politik. Jika di tahun 2019 isu HAM lebih dianggap sebagai komoditas politik dan simbol pertarungan etika antar kandidat, di tahun 2024 isu ini akan semakin mendapat perhatian publik, seiring dengan banyaknya pembahasan mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu, tuntutan keadilan bagi para korban, dan penegakan HAM dalam konteks demokrasi digital dan keamanan siber. Hak-hak sipil di era teknologi, kebebasan

berpendapat, dan keadilan sosial-ekonomi merupakan isu-isu HAM masa kini, bukan hanya masa lalu.

Media sosial dan media massa memainkan peran penting dalam membentuk dan menyebarluaskan opini publik tentang isu-isu hak asasi manusia. Peran media sebagai arena diskursif semakin kompleks media masih relatif terpolarisasi oleh afiliasi politik di tahun 2019, sehingga isu-isu HAM seringkali digunakan sebagai senjata politik. Namun, di tahun 2024 media sosial semakin menjadi alat bagi masyarakat sipil untuk memantau isu-isu HAM, menuntut transparansi, dan meminta para kandidat untuk membahas isu-isu HAM secara lebih substantif. Perubahan cara masyarakat berinteraksi dengan isu-isu politik melalui media juga berdampak pada intensitas dan kedalaman pembahasan HAM dalam debat capres.

Di era informasi yang berkembang pesat, media massa telah menjadi elemen penting dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat modern. Fungsinya tidak terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga mencakup pembentukan opini publik dan konstruksi makna atas berbagai isu sosial, politik, dan budaya. Media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi masyarakat melalui pilihan narasi, representasi, dan bahasa yang digunakan. Dalam konteks ini, analisis wacana media massa menjadi alat yang penting untuk memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksi. Melalui pendekatan ini, cara-cara media mereproduksi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu dalam merepresentasikan isu-isu publik dapat diungkap. Analisis wacana memungkinkan penilaian kritis terhadap praktik komunikasi media, baik dari segi struktur teks maupun konteks produksi dan konsumsi pesan media oleh khalayak.

D. Profil Prabowo Subianto

Prabowo Subianto Djojohadikusumo merupakan seorang tokoh publik yang memiliki pengalaman luas di berbagai bidang, mulai dari militer, dunia usaha, hingga politik. . Ia mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer Magelang dan lulus pada tahun 1974, memulai karier militernya pada tahun 1976 sebagai Letnan Dua di TNI Angkatan Darat. Sejak tahun 1976 hingga 1985, Prabowo bertugas di

Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), yang saat itu merupakan pasukan elite Angkatan Darat. Pada tahun 1985, ia menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328, dan kemudian pada tahun 1991 menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 di Cijantung. Selama 28 tahun berkarier di dunia militer, Prabowo dikenal sebagai salah satu perwira yang memiliki pengalaman dalam operasi strategis. Setelah pensiun dari militer, Prabowo memasuki dunia politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra secara resmi menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai Presiden dalam Pemilu 2009. Namun dalam perkembangan politik yang terjadi, Prabowo akhirnya menerima tawaran untuk menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Pada Pemilu 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden setelah menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra. Meskipun elektabilitasnya sempat tinggi dalam beberapa survei, rendahnya elektabilitas Partai Gerindra saat itu dianggap menjadi salah satu penghambat. Dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur. Kembali kalah dalam kontestasi tersebut, Prabowo kemudian menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam kabinet dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Menuju Pemilu 2024, Partai Gerindra kembali mencalonkan Prabowo sebagai Presiden. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada 12 Agustus 2022, seluruh DPD Partai Gerindra secara aklamasi mendukung pencalonan Prabowo. Sehari setelahnya, pada 13 Agustus 2022, Prabowo menandatangani kontrak politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menandai terbentuknya koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan tekadnya untuk melanjutkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo serta menerapkan politik persatuan sebagai pijakan utamanya.

Meskipun memiliki rekam jejak panjang di dunia militer dan politik, perjalanan karier Prabowo Subianto tidak sepenuhnya lepas dari sorotan publik, khususnya terkait isu hak asasi manusia (HAM). Beberapa dugaan pelanggaran HAM yang dikaitkan dengannya, seperti keterlibatan dalam penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang Reformasi 1998 dan tuduhan insubordinasi terhadap Presiden B.J. Habibie, menjadi catatan historis yang hingga kini masih melekat pada citra politiknya. Meskipun tidak pernah diproses secara hukum, kontroversi tersebut menjadi bagian dari konstruksi sosial yang memengaruhi strategi komunikasi politik Prabowo, termasuk dalam forum debat capres. Hal ini terlihat dalam cara ia membangun narasi dan gagasan mengenai HAM, yang mengalami pergeseran seiring perubahan posisi politiknya dan kebutuhan membentuk citra baru di hadapan publik.

1. Gagasan Prabowo tentang HAM dalam Pilpres 2019

Dalam pemilihan presiden tahun 2019, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto–Sandiaga Uno menyampaikan visi-misi mereka terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam program aksi bertema “menjamin kemerdekaan rakyat dalam mengeluarkan pendapat dan menjamin hak konstitusional rakyat.” Fokus utama pasangan calon nomor urut 02 ini terlihat pada aspek-aspek HAM sipil dan politik, namun tidak secara eksplisit menyentuh isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandiaga, Siane Indriani, menyatakan bahwa kubu Prabowo akan berfokus pada pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hal ini terlihat dalam program-program turunan mereka yang menekankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Adapun tujuh poin utama program HAM Prabowo–Sandiaga meliputi: (1) perlindungan HAM seluruh warga negara dan penghapusan diskriminasi; (2) jaminan kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat; (3) penghentian persekusi terhadap individu dan kelompok masyarakat; (4) kebebasan pers yang bertanggung jawab; (5) penegakan hukum yang adil

dan transparan; (6) kebebasan mimbar akademik; serta (7) jaminan kebebasan berekspresi bagi seniman dan pelaku budaya.

2. Gagasan Prabowo tentang HAM dalam Pilpres 2024 (Lanjutan dari Visi-Misi Resmi)

Dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan pendekatan yang lebih eksplisit dan progresif dalam menyampaikan visi-misi terkait hak asasi manusia. Dalam dokumen visi-misi resmi, pasangan calon nomor urut 2 secara langsung menyinggung isu “Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi” sebagai salah satu fokus utama. Penekanan terhadap HAM dalam visi Prabowo–Gibran terlihat dari sejumlah poin kebijakan yang ditawarkan. Pertama, mereka menegaskan komitmen untuk melindungi hak asasi seluruh warga negara dan menghapus segala bentuk praktik diskriminasi, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Visi ini menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.

Kedua, pasangan ini menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan berperspektif gender, serta mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari prioritas kebijakan HAM. Komitmen ini diperkuat dengan rencana legislasi yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan penegakan hukum dalam konteks tersebut. Ketiga, mereka juga menjanjikan pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Selain itu, terdapat komitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya mereka yang bekerja di luar negeri.

Berbeda dengan pendekatan pada Pilpres 2019 yang masih bersifat umum dan tidak menyentuh isu HAM berat secara langsung, visi Prabowo di tahun 2024 tampak lebih terstruktur, afirmatif, dan menyasar kelompok-kelompok rentan secara spesifik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran

strategi wacana dari pendekatan yang defensif menuju narasi yang lebih progresif dan menyeluruh dalam menjawab kebutuhan publik terkait hak asasi manusia.

Setelah menguraikan profil, latar belakang, dan posisi politik Prabowo Subianto dalam berbagai pemilihan presiden, bagian ini akan menampilkan beberapa data teks yang menjadi objek dalam penelitian ini. Data berupa kutipan pernyataan Prabowo Subianto yang disampaikan dalam forum debat calon presiden tahun 2019 dan 2024, serta pernyataan dalam dokumen resmi visi dan misi pasangan calon. Pemilihan teks dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap isu hak asasi manusia (HAM) dan relevansinya dalam mengungkap konstruksi wacana yang dibangun oleh Prabowo Subianto. Cuplikan-cuplikan ini nantinya akan dianalisis dalam Bab IV menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk, dengan fokus pada dimensi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial politik. Beberapa kutipan di tahun 2019 dan 2024 sebagai berikut;

“saya kerap menemukan bahwa kata orang aparat berat sebelah Sebagai contoh kepala daerah yang mendukung paslon 01 menyatakan dukungan, tapi terdapat kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap paslon 02 tapi ditangkap saya kira ini termasuk pelanggaran HAM,”

“Partai kami partai muda, partai baru kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan mau, tapi benar yang bapak Jokowi sebut”

“Masalah Papua adalah masalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatis gerakan ini kita sudah ikuti cukup lama kita melihat ada campur tangan asing dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah untuk itu memang masalah hak asasi manusia”

” “Pak Ganjar justru anda sebut tahun 2009, sekian tahun yang lalu dan masalah ini ditangani justru langsung oleh wakil presiden anda jadi

apalagi yang mau ditanya kepada saya? saya sudah menjawab berkali-kali
ada rekam digitalnya saya sudah menjawab berkali-kali, tiap lima tahun
kalau saya naik ditanya lagi soal itu”

BAB IV

STRUKTUR WACANA KRITIS PRABOWO SUBIANTO DALAM DEBAT CAPRES TERKAIT ISU HAM TAHUN 2019 DAN 2024

Dalam setiap debat calon presiden hak-hak warga negara selalu menjadi topik yang strategis. Hal ini menggambarkan komitmen, tujuan, dan perspektif para kandidat terhadap perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara. Pada debat capres 2019 dan 2024 setiap kandidat termasuk Prabowo Subianto menyampaikan perspektif mereka tentang berbagai isu HAM di Indonesia.

Sebagai seorang tokoh militer dan politisi yang kembali mencalonkan diri dalam dua periode, Prabowo telah menunjukkan perubahan dalam caranya berbicara tentang politik. Prabowo tidak hanya menekankan pada pelanggaran HAM di masa lalu, tetapi juga menegaskan pendapatnya tentang isu-isu HAM saat ini seperti diskriminasi, keadilan hukum, dan representasi gender. Pendekatan teori wacana kritis yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut wacana Prabowo dalam debat ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat bagaimana konteks sosial, kognisi sosial, dan struktur teks berkontribusi dalam pembentukan dan penyebaran makna dari pernyataan politik yang disampaikan.

Bab ini akan membahas dan menganalisis struktur wacana Prabowo Subianto dalam debat capres 2019 dan 2024 dengan fokus pada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama sesuai dengan tahun penyelenggaraan debat, untuk menunjukkan bagaimana wacana Prabowo mengalami perubahan atau konsistensi dari waktu ke waktu.

A. Analisis Wacana Kritis Debat Capres pada Isu HAM Tahun 2019

1. Analisis wacana tentang Hukum dan Penegakan HAM

Segmen kedua debat dengan tema hukum dan HAM, moderator Ira Koesno mengajukan pertanyaan mengenai ketegasan hukum dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait bentuk

ketegasan hukum seperti apa yang perlu ditegakkan dan isu HAM seperti apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Bapak sudah memerintah selama empat tahun lebih dan saya kerap menemukan bahwa kata orang aparat berat sebelah. Sebagai contoh kepala daerah yang mendukung paslon 01 menyatakan dukungan, tapi terdapat kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap paslon 02 tapi ditangkap saya kira ini termasuk pelanggaran HAM, perlakuan tidak adil padahal menyatakan pendapat diatur oleh UUD jadi siapapun boleh berpendapat dan mendukung siapa pun.

Dari pernyataan Prabowo Subianto dalam menanggapi pertanyaan Moderator dalam debat capres dapat di analisis menggunakan teori Van Dijk yaitu:

1. Struktur Teks

1.1 Struktur Makro:

Tema utama yang ingin disampaikan Prabowo adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dianggap melanggar HAM, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat menjelang pemilu.

1.2 Suprastruktur:

Ujaran ini dibangun dengan struktur argumen yang terdiri dari:
Pendahuluan: Menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah berjalan selama empat tahun.

Isi: Memberikan contoh konkret dugaan perlakuan tidak adil terhadap pendukung paslon tertentu.

Kesimpulan: Menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat dilindungi oleh UUD.

1.3 Struktur Mikro

Pemilihan kata: Menggunakan istilah “berat sebelah”, “ditangkap”, dan “pelanggaran HAM” untuk menekankan ketidakadilan.

Gaya bahasa: Argumentatif dan langsung menyasar pihak lawan (Pak Jokowi) sebagai representasi pemerintahan.

Struktur kalimat: Kalimat pendek dan tegas, menunjukkan sikap kritis dan menekan.

2. Kognisi Sosial

Ujaran ini mencerminkan cara berpikir Prabowo bahwa negara seharusnya menjamin kebebasan berpendapat tanpa diskriminasi. Ia juga memposisikan dirinya sebagai oposisi yang mengkritik ketimpangan perlakuan hukum terhadap pihak yang dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan. Prabowo ingin membangun persepsi bahwa ia berpihak pada keadilan dan HAM.

3. Konteks Sosial

Konteks sosial dari ujaran ini adalah situasi politik menjelang Pemilu 2019, di mana polarisasi politik sangat kuat. Tuduhan ketidaknetralan aparat negara dalam mendukung salah satu paslon menjadi isu sensitif. Dalam debat ini, Prabowo memanfaatkan konteks tersebut untuk menyerang kredibilitas pemerintahan petahana dan memperlihatkan dirinya sebagai pembela kebebasan politik rakyat kecil.

Dari pernyataan Prabowo, maka moderator memberikan kesempatan terhadap paslon 01 yaitu bapak Jokowi dan Makruf Amin untuk menanggapi pernyataan yang diberikan Prabowo dengan mengatakan “ Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo karena negara ini negara hukum. Ada prosedur, mekanisme hukum yang bisa dilakukan. Kalau ada bukti, sampaikan saja ke aparat hukum. Jangan sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya julukan Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya

babakbelur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti laporan saja melalui mekanisme hukum yang ada. Gampang sekali, gampang sekali kok. Kenapa harus nuduh-nuduh seperti itu?”

Dari pernyataan Jokowi jika dianalisis dengan teori Van Dijk maka sebagai berikut:

1. Struktur Teks

1.1 Struktur Makro

Tema dari ujaran ini adalah soal penegakan hukum dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM. Prabowo menyoroti dugaan ketidakadilan aparat, sedangkan Jokowi membela sistem hukum yang berlaku dan menepis tuduhan sebagai asumsi tanpa bukti.

1.2 Suprastruktur

Ujaran ini dibangun dengan struktur argumen yang terdiri dari:

Pendahuluan: Langsung menyangkal tuduhan Prabowo (“Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo...”)

Isi: Menjelaskan bahwa semua persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme formal (“Kalau ada bukti, sampaikan saja...”)

Penutup: Mengingatkan soal kejadian lampau yang disebutkan sebagai bentuk tindakan grusa-grusu dan akhirnya tidak terbukti (“...konferensi pers bersama-sama... ternyata operasi plastik.

1.3 Struktur Mikro

Jokowi menggunakan frasa “jangan menuduh”, “grusa-grusu”, “negara hukum”, “mekanisme hukum” untuk memperkuat bahwa tindakan hukum harus berdasarkan bukti, bukan asumsi.

Gaya bahasa Jokowi lebih retorik dan agak menyerang balik, memakai contoh pribadi (soal burger dan operasi plastik) untuk menggambarkan inkonsistensi Prabowo.

2. Kognisi Sosial

Jokowi membingkai isu HAM dalam kerangka procedural dimana semua tuduhan atau dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan alat negara yang sah. Menampilkan dirinya sebagai sosok yang menjunjung supremasi hukum dan menolak pendekatan emosional atau tuduhan sepihak.

3. Konteks Sosial

Pernyataan ini muncul saat Jokowi sedang diserang soal ketimpangan hukum dan perlakuan tidak adil terhadap pendukung lawan politik. Ia berusaha menjaga citra pemerintahan sebagai pemerintahan yang adil, taat hukum, dan tidak semena-mena, di tengah isu netralitas aparat yang ramai diperbincangkan.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh moderator terkait tema HAM dan Hukum adalah “Indonesia negara beragama dari sisi etnis golongan agama pandangan politik meskipun begitu dalam kenyataannya terdapat diskriminasi dan persekusi dari sisi HAM apa strategi anda untuk mengatasi hal tersebut lalu

Selanjutnya Prabowo memberikan tanggapan “saya sudah katakan dalam sistem bernegara kepala negara disebut kepala eksekutif petugas penegak hukum tertinggi oleh sebab itu saya akan tegaskan, instruksikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap suku, agama, etnis jadi intinya adalah aparat tanggung jawab kepala eksekutif sehingga perlu dijamin jika ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo dalam menjawab pertanyaan moderator jika dianalisis menggunakan teori Van Dijk maka sebagai berikut:

1. Struktur Teks

1.1 Struktur Makro

Tema utama adalah komitmen Prabowo dalam menghapus diskriminasi berbasis suku, agama, dan etnis melalui penegakan hukum yang tegas.

1.2 Suprastruktur

Ujaran ini dibangun dengan struktur argument yang terdiri dari:

Pendahuluan: Merujuk pada sistem bernegara dan posisi kepala negara.

Isi: Menegaskan bahwa kepala negara memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum tertinggi.

Kesimpulan: Jika ada pelanggaran oleh aparat atau pejabat, maka tindakan tegas (pemecatan) akan diambil.

1.3 Struktur Mikro

Pemilihan kata: “Saya akan tegaskan”, “instruksikan”, “tidak ada diskriminasi”, “saya akan pecat” menunjukkan ketegasan dan otoritas.

Penggunaan istilah formal: Seperti “kepala eksekutif”, “instruksikan”, menambah kesan berwibawa dan legal.

2. Kognisi Sosial

Dalam pernyataan ini, Prabowo menunjukkan pemahaman bahwa diskriminasi masih menjadi masalah di Indonesia, dan bahwa kepemimpinan nasional bertanggung jawab langsung atas perilaku aparat negara. Ujaran ini ingin membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan tidak mentoleransi penyimpangan dalam penegakan hukum, serta responsif terhadap keragaman masyarakat Indonesia.

3. Konteks sosial

Ujaran ini disampaikan dalam konteks kritik terhadap kinerja aparat di yang dianggap masih menoleransi diskriminasi

dan ketidakadilan. Dengan menegaskan peran kepala negara sebagai penanggung jawab utama, Prabowo ingin meyakinkan publik bahwa ia akan membawa perubahan terhadap cara negara menangani isu-isu diskriminasi dan HAM jika terpilih menjadi presiden.

2. Analisis Wacana Mengenai Persepektif Gender

Sesi pertanyaan yang diberikan oleh moderator telah selesai mengenai tema HAM dan hukum selanjutnya adalah sesi tanya jawab oleh paslon 01 dan paslon 02. Dalam sesi ini yang pertama memberikan pertanyaan adalah paslon 01 yaitu Jokowi dan Makhruf Amin, Jokowi bertanya

“Dalam visi misi bapak menyebutkan setiap kebijakan akan perspektif gender dan memberdayakan perempuan akan memprioritaskan perempuan tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang dipimpin oleh bapak jabatan-jabatan strategis seperti ketua umum, ketua dewan, pembina, ketua dewan, penasehat sekjen, bendahara, semuanya laki-laki bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?”

Pertanyaan itu mendapatkan respon dari Prabowo dengan mengatakan “Partai kami partai muda, partai baru kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan mau, tapi benar yang bapak Jokowi sebut tapi sebagai contoh wakil ketua umum ibu Hermawati Soekarnoputri beliau bertanggung jawab untuk ideologi dan punya beberapa ketua umum lainnya kemudian saya punya partai yang namanya perempuan Indonesia Raya dan punya susunan caleg saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai UU mewajibkan 30% tapi partai ini mendekati 40%”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo jika di analisis menggunakan Teori Van Dijk maka sebagai berikut:

1. Struktur teks

1.1 Struktur Makro

Tema utama dari kutipan ini adalah komitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan realisasi nyata dalam partai politik.

1.2 Suprastruktur

Ujaran ini dibangun dengan struktur argument yang terdiri dari:

Pendahuluan: Prabowo memberikan konteks awal yang memberikan pernyataan kondisi partainya yang masih baru, sehingga memberikan pemahaman bahwa partainya belum mapan secara structural, jadi wajar jika partainya belum ideal dalam keterlibatan gender.

Isi: kata “siap” dan “mau” menjelaskan kenapa partainya masih di dominasi oleh laki-laki, Prabowo juga mengakui pernyataan Jokowi akan tetapi tetap memberikan pembelaan dengan memberikan contoh konkrit dengan adanya keterlibatan Perempuan dalam partainya.

Penutup: penutup bersifat kalimat klaim yang mengatakan jika partainya lebih unggul daripada partai lain dalam representasi caleg Perempuan, yang menandakan bahwa terdapat komitmen terhadap Perempuan meskipun strukturnya belum ideal.

2. Kognisi Sosial

Prabowo menampilkan pemahaman bahwa keberpihakan pada perempuan penting secara normatif, tapi secara praktik ia menekankan adanya proses dan tantangan internal organisasi yang belum ideal. Ia berusaha meyakinkan publik bahwa meski struktur elite partai belum sepenuhnya representatif, ada upaya konkrit melalui sayap partai dan rekrutmen caleg perempuan.

3. Konteks Sosial

Isu gender dan representasi perempuan dalam politik menjadi tekanan besar di pemilu 2019. Visi misi capres tidak hanya dinilai dari janji, tapi juga implementasi nyata di lingkup organisasi. Kritik terhadap struktur partai ini mencerminkan desakan publik terhadap kesesuaian antara narasi politik dengan tindakan nyata. Pernyataan Prabowo memperlihatkan dilema antara idealisme pemberdayaan dan realitas struktural di tubuh partai.



Gambar 1. 2 Sumber: <https://www.youtube.com/live/E6G85GvVdzw?si=R-ORlpMfAJBcqi8>

Berdasarkan ekspresi wajah Prabowo dalam debat capres tahun 2019, peneliti mengamati bahwa selama menjawab serta menanggapi isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilontarkan oleh panelis maupun lawan debat, Prabowo cenderung tidak menunjukkan ekspresi yang variatif. Ia mempertahankan ekspresi serius, datar, tanpa senyum, serta menghadirkan kesan kaku. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk sikap defensif, penuh kehati-hatian, dan berusaha menjaga kontrol diri. Dalam kerangka kognisi sosial (Van Dijk), ekspresi semacam ini mencerminkan adanya kesadaran Prabowo terhadap persepsi publik atas rekam jejak masa lalunya yang berkaitan dengan isu HAM. Sebagai isu sensitif dan rawan, Prabowo tampaknya menyadari bahwa segala bentuk ekspresi dapat menjadi bahan tafsir publik, sehingga ia memilih menampilkan citra yang formal dan terkendali.

Ekspresi dan gestur yang nyaris tak berubah tersebut dapat dibaca sebagai strategi untuk mempertahankan otoritas dan menunjukkan ketegasan. Namun di sisi lain, ekspresi yang terlalu tertutup ini juga dapat memunculkan kesan menghindar, tidak nyaman, atau kurang terbuka terhadap isu yang sedang dibahas.

3. Analisis Wacana Mengenai Kalimat Penutup Pada Sesi Debat

Dalam segmen terakhir debat moderator memberikan kesempatan bagi para paslon untuk memberikan kalimat penutup dan saling apresiasi, penutup pertama di berikan oleh Jokowi dengan mengatakan:

“Kami tidak ingin banyak bicara kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak punya potongan diktator atau otoriter, kami tidak punya rekam jejak pelanggar HAM, kami tidak memiliki rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi, Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan menggunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini.”

Kalimat penutup yang disampaikan pasangan Jokowi-Amin berbeda dengan Prabowo-Sandiaga dimana Prabowo mengatakan;

“Saudara-saudara sekalian kepastian hukum, penegakan hukum, institusi hukum terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil untuk itu kami apabila menerima mandat dari rakyat hal ini yang akan kami perkuat, hal ini yang akan kami perbaiki terutama kami akan bicara realistis untuk orang supaya kuat, untuk orang supaya tidak korup ini yang harus kita bangun penyelesaiannya. Yang ingin kami bangun adalah bicara penyelesaian akar masalah kita tidak mencari kesalahan kecil-kecilan atau mengatakan ini salah atau itu salah tidak, tapi melihat performa bangsa kami ingin menyelesaikan akar masalah. Kami bertekad untuk menghentikan kebocoran, kami

bertekad naikan tax ratio kami yakin negara ini sangat sangat kaya tapi terjadi kebocoran kekayaan, kekayaan kita mengalir ke luar negeri ini bukan salah siapa saja ini salah kita bersama sebagai bangsa ini kesalahan elit yang membiarkan ini puluhan tahun kita mau mencari jalan keluarnya kita perbaiki kita lipat gandakan gaji hakim, jaksa, dan polisi dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, polisi, jaksa yang tidak dapat di korupsi.

Perbedaan pandangan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam melihat hukum dan HAM cukup mencolok dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang serta basis ideologis masing-masing. Joko Widodo cenderung menempatkan hukum dan HAM dalam kerangka prosedural, yaitu melalui sistem, mekanisme, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini tercermin dalam program-program kerjanya yang menekankan penguatan institusi hukum dan birokrasi yang akuntabel. Dalam hal ini, Jokowi lebih menekankan pentingnya proses ketimbang otoritas personal.

Sebaliknya, Prabowo Subianto lebih menempatkan hukum dan HAM sebagai bagian dari fungsi kekuasaan negara yang dapat dikendalikan langsung oleh Presiden. Ia melihat bahwa Presiden memiliki posisi suprematif dalam menentukan arah dan penyelesaian isu hukum dan HAM. Pandangan ini sejalan dengan latar belakangnya sebagai militer, yang terbiasa dengan struktur komando dan sentralisasi kekuasaan. Dalam program kerjanya, Prabowo menyatakan bahwa negara harus hadir dalam menjamin keadilan hukum dan HAM, bukan semata melalui sistem, tetapi melalui tindakan langsung dari negara—yang dalam konteks ini berarti kepala negara.

Dalam kerangka kognisi sosial Van Dijk, perbedaan ini menunjukkan bagaimana struktur mental dan pengalaman hidup masing-masing tokoh membentuk cara mereka membingkai hukum dan HAM. Jokowi sebagai sipil yang berasal dari luar lingkaran elit militer cenderung mempercayakan penyelesaian masalah pada sistem dan institusi.

Sementara Prabowo, dengan pengalaman panjang di dunia militer dan elit kekuasaan, memandang bahwa negara yang kuat—yang dikendalikan langsung oleh presiden—merupakan jalan utama dalam menegakkan hukum dan HAM. Perbedaan ini terlihat jelas dalam struktur wacana masing-masing saat debat capres, di mana keduanya saling menyerang dan mempertahankan posisi ideologis mereka masing-masing.

B. Analisis Wacana Kritis Debat Capres pada Isu HAM Tahun 2024

1. Analisis Wacana Mengenai Kasus HAM di Papua

Debat capres 2024 yang dilaksana pada tanggal 12 Desember 2023 dengan tema debat Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi dan di moderatori oleh Ardianto Wijaya dan Velerina Daniel. Segmen kedua merupakan sesi tanya jawab dimana pertanyaan diberikan oleh panelis akan tetapi sub tema dan pertanyaan di ambil secara acak dalam sesi ini yang awal mendapatkan pertanyaan adalah Prabowo subianto dengan tema HAM dengan pertanyaan;

“Beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya apa strategi yang anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik Papua secara komprehensif?”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh moderator Prabowo menanggapi dengan menjawab sebagai berikut;

“Masalah Papua adalah masalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatis gerakan ini kita sudah ikuti cukup lama kita melihat ada campur tangan asing dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah untuk itu memang masalah hak asasi manusia menjadi sesuatu yang harus kita utamakan dan di antaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua karena di situ kelompok kelompok teroris sekarang itu

menyerang orang-orang Papua sendiri rakyat yang tidak berdosa perempuan orang tua anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum memperkuat aparat aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi dan presiden Joko Widodo adalah presiden di republik Indonesia yang paling banyak ke Papua Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 sekali ke Papua dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang paling pesat yang paling tinggi selama sejarah republik Indonesia jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial services yang terbaik untuk rakyat Papua melindungi rakyat Papua dari keganasan para sepratisme Dan menjamin penegakan hak asasi manusia.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo jika di analisis menggunakan AWK oleh Van Dijk Maka sebagai berikut:

1. Struktur Teks

1.1 Struktur Makro

Pilihan kata: "gerakan separatis", "campur tangan asing", "kekuatan tertentu", "teroris", "melindungi rakyat", "menegakkan hukum", "mempercepat pembangunan ekonomi".

Kalimat: Banyak menggunakan kalimat penjelasan untuk menguraikan kompleksitas masalah Papua, ancaman separatisme, dan menawarkan solusi.

Gaya bahasa: Menguatkan posisi sebagai pembela negara dan rakyat.

1.2 Makrostruktur

Makna utama pada kalimat yang disampaikan oleh Prabowo bahwa masalah HAM di Papua harus diselesaikan dengan pendekatan hukum, keamanan, dan pembangunan ekonomi,

sambil melindungi rakyat Papua dari separatisme dan kekerasan.

1.3 Suprastruktur

Pendahuluan:

"Masalah Papua adalah masalah rumit karena ada gerakan separatis dan campur tangan asing."

Isi:

"Kelompok separatis menyerang rakyat Papua, perlu perlindungan HAM. Strategi: menegakkan hukum, memperkuat aparat, mempercepat pembangunan ekonomi."

Penutup:

"Saya akan melanjutkan pendekatan Presiden Jokowi yang sudah membawa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Papua dan menjamin perlindungan HAM."

2. Kognisi Sosial

Prabowo membingkai konflik Papua bukan hanya sebagai masalah HAM, tetapi juga sebagai ancaman terhadap integrasi nasional. Terdapat persepsi bahwa penyelesaian HAM di Papua harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap separatisme dan percepatan pembangunan ekonomi. Dalam pikirannya, pendekatan keamanan dan pembangunan adalah kunci utama, bukan sekadar pendekatan hukum HAM normatif.

3. Konteks Sosial

Isu Papua masih sensitif menjelang pemilu 2024 dengan adanya kekerasan dari kelompok bersenjata di Papua, kritik HAM terhadap pemerintah termasuk kepada Prabowo saat jadi Menhan banyak disuarakan melalui LSM, dan aktivis HAM. Prabowo juga membangun citra sebagai sosok yang tegas terhadap separatisme tapi tetap mendukung pembangunan dan HAM, mengikuti narasi keberhasilan Jokowi di Papua.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo, Anis Baswedan dan Ganjar selaku lawannya memberikan tanggapan serta pertanyaan, seperti Ganjar yang mengatakan “ Menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo karena menurut saya dialog menjadi sesuatu yang sangat penting agar seluruh kekuatan yang ada disana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu menurut saya rute masalahnya. Pertanyaan saya simple saja apakah bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan?”

Sedangkan tanggapan Anis Baswedan dalam segmen ini cukup panjang serta menawarkan beberapa solusi yang dianggapnya konkrit dengan mengatakan “Sekarang masalahnya bukan kekerasan karena ketika bicara kekerasan di Jakarta ada tiga pandangan ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatis, ada yang menganggap ini kriminal di Jakarta aja ada perbedaan pandangan, apa masalah utamanya? masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Jadi tujuannya bukan semata mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan damai itu ada keadilan itu prinsip utamanya, nah jadi caranya bagaimana satu atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas, yang kedua mencegah terjadinya pemulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan yang ketiga melakukan dialog dengan semua secara partisipatif”

Dari tanggapan tersebut Prabowo buru-buru menjawab dengan mengatakan “Benar saya sangat setuju kita harus ada pendekatan dialog dan benar, keadilan benar sekali harus ada keadilan tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu Pak Anis (dengan nada penekanan saat mengucapkan nama pak anis) seperti yang tercantum pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3 Sumber: <https://youtu.be/zB0RvKAc2kw?si=wHq5VGtqjJkCtYls>

Pada cuplikan debat capres 2024 tanggal 12 Desember, Prabowo menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap komunikatifnya dibandingkan saat debat tahun 2019. Dalam gambar tersebut, ia tampak mengangkat tangan dengan telapak terbuka, disertai ekspresi wajah yang menunjukkan ketegasan dan dorongan untuk mengambil alih giliran bicara. Ia terlihat aktif, ekspresif, dan lebih asertif, berbeda dengan kesan kaku dan defensif pada debat sebelumnya. Prabowo tidak hanya menanggapi, tetapi juga mengontrol arah diskusi. Ekspresi wajahnya yang lebih hidup dan dominan menunjukkan perubahan citra yang ingin ia bangun: seorang tokoh kuat yang tidak lagi defensif, melainkan proaktif dan siap menghadapi kritik. Secara kognisi sosial, perubahan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya Prabowo membentuk persepsi baru di hadapan publik. Dengan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan dan meningkatnya elektabilitas, Prabowo tampaknya lebih percaya diri, sehingga ekspresi.

Selanjutnya prabowo melanjutkan perkataannya bahwa “ada faktor-faktor lain pak Anis ada faktor geopolitik ada faktor ideologi inilah masalahnya yang tidak gampang tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan kita harus dialog ini masalah bangsa ini kita semua satukan kekuatan harus kita rangkul.

Dalam sela-sela merespon tanggapan dari lawannya Prabowo melakukan sedikit gerakan silat dan melakukan penekanan nada saat mengucapkan kata pak Anis.



Gambar 1. 4 Sumber: <https://youtu.be/zB0RvKAc2kw?si=wHq5VGtqiJkCtYls>

Gestur menyerupai silat ini menjadi bagian dari ekspresi panggung Prabowo yang teatrikal (Menarik perhatian atau dramatis) dan penuh percaya diri. Sementara nada bicaranya yang menekan memperkuat kesan dominan, seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak mau dipotong atau didikte dalam menyampaikan pendapatnya. Kombinasi antara gaya tubuh dan intonasi ini menunjukkan cara Prabowo membangun kehadiran dan otoritas di hadapan publik dalam debat.

Dari dialog yang dilakukan jika dianalisis melalui AWK maka sebagai berikut;

1. Struktur teks

1.1 Struktur mikro

Pilihan kata: "setuju", "dialog", "keadilan", "geopolitik", "ideologi", "tidak sederhana itu". Penggunaan nada penekanan khusus saat menyebut "Pak Anies".

Gaya bicara: afirmatif, namun memperjelas kompleksitas masalah.

Gerakan tubuh: (sedikit gerakan silat) sebagai penguatan

pesan emosional dan gestur menunjukkan semangat atau keyakinan.

1.2 Struktur makro

Masalah Papua perlu diselesaikan lewat dialog dan keadilan, tetapi Prabowo menekankan bahwa faktor lain seperti geopolitik dan ideologi juga menjadi hambatan, sehingga solusi tidak sederhana yang dibayangkan.

1.3 Suprastruktur

Pendahuluan: Menyatakan setuju dengan pentingnya dialog dan keadilan.

Isi: Menjelaskan bahwa masalah Papua bukan hanya kekerasan, tetapi juga dipengaruhi faktor geopolitik dan ideologi.

Penutup: Menyerukan perlunya persatuan nasional untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif.

2. Kognisi sosial

Prabowo menunjukkan kesadaran bahwa masalah Papua bukan hanya domestik, tetapi terkait kekuatan global dan ideologi. Perspektif ini memperlihatkan pola pikir keamanan nasional yang terintegrasi dengan geopolitik.

3. Konteks sosial

Konteks sosial yang melatarbelakangi jawaban Prabowo adalah situasi meningkatnya perhatian publik terhadap konflik dan pelanggaran HAM di Papua. Isu Papua menjadi salah satu sorotan nasional karena terus adanya kekerasan dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus HAM berat di wilayah tersebut. Oleh sebab itu dalam debat ini, Prabowo membangun citra bahwa dirinya memahami kompleksitas masalah Papua dan siap menghadirkan solusi komprehensif.

2. Analisis Wacana Mengenai Kasus HAM dimasa Lalu Prabowo

Dalam segmen kedua ini Prabowo hanya mendapat satu pertanyaan terkait tema HAM, dan pertanyaan terkait HAM Kembali diberikan saat segmen kelima dimana pertanyaan bukan lagi dari panelis akan tetapi dari pasangan calon yaitu Ganjar dan Anis, pada sesi ini yang awal memberikan pertanyaan adalah paslin 01 yaitu Ganjar dengan bertanya “Izinkan saya membaca data untuk mengingatkan Pak Prabowo karena nomer dua, saya ada dua pertanyaan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talangsari, penghilangan paksa sampai Wamena dan mau saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan empat rekomendasi pada saat itu kepada presiden satu membentuk pengadilan HAM. kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa, ketiga memberikan kompensasi dan pemulihan dan keempat memberikan konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saya ada dua kalau bapak ada diposisi itu apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR pertanyaan kedua di luar sanabanyai ibu-ibu menunggu apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?”

Dari pertanyaan tersebut Prabowo Memberikan tanggapan “Pak Ganjar justru anda sebut tahun 2009, sekian tahun yang lalu dan masalah ini ditangani justru langsung oleh wakil presiden anda jadi apalagi yang mau ditanya kepada saya? saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya saya sudah menjawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data tidak? bapak nanya pada kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI, ada mayat yang di temukan beberapa hari yang lalu *come on* mas Ganjar, jadi saya katakan saya merasa bahwa saya sangat keras membela hak asasi manusia nyatanya orang-orang yang ditahan yang katanya saya culik sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian jadi masalah HAM jangan dipolitisasi mas Ganjar.”

Pernyataan tersebutpun langsung mendapat respon dari Ganjar jika “Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa tapi sayang pada dua jawaban dia sama sekali tidak punya ketegasan mengapa saya sampaikan? pertanyaan saya sebenarnya satu apakah kalo bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM, pertanyaan kedua apakah bapak bisa menemukan, membantu, dan menunjukan pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah dua ini sama-sama tidak di jawab, maka kemudian kalau saya boleh meminta kalau saya jadi presiden pak saya akan bereskan ini pak agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya”

Dengan situasi yang cukup panas antara Ganjar dan Prabowo dimana mereka menjawab dengan sedikit nada tegas saat menanggapi respon satu sama lain, Prabowo memberikan tanggapan atas pernyataan ganjar dengan mengatakan;

“Loh kok bilang saya tidak tegas, saya tegas akan menegakan HAM masalah yang bapak tanyakan agak tendensius kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanyakan pada saya itu tendensius Pak Ganjar yaitu tendensius dan wakil bapak yang mengurus ini selama ini jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM kita akan mengadakan pengadilan HAM gak ada masalah.”

1. Struktur Teks

1.1 Mikrostruktur

Gaya bicara:

Prabowo menggunakan nada afirmatif (yakin), defensif, dan sesekali menyerang balik ("come on Mas Ganjar"). Dia mengulang-ulang frasa "saya sudah jawab berkali-kali" untuk menunjukkan bahwa isu ini, menurutnya sudah selesai dibahas. Kata-kata seperti "tendensius" dan "jangan dipolitisasi" dipakai untuk memperjelas bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil secara politis.

Pilihan kata:

Banyak menggunakan istilah hukum dan emosional: "rekam digital", "hak asasi manusia", "tendensius", "membela HAM", "gak ada masalah." Kalimat untuk menyudutkan lawan: "apa lagi yang mau ditanya kepada saya?"

1.2 Suprastruktur

Pendahuluan: Prabowo membuka dengan membalikkan tuduhan Ganjar, mengatakan bahwa masalah HAM sudah ditangani wakil presiden (yang berasal dari kubu Ganjar) dan mempertanyakan kenapa ia terus-menerus yang disalahkan.

Isi: Prabowo menegaskan bahwa ia telah menjawab isu ini berulang kali, menyatakan bahwa masalah HAM jangan dipolitisasi. Ia memberikan contoh bahwa orang-orang yang pernah ditahan justru kini mendukungnya.

Penutup: Prabowo akhirnya menyatakan kesediaannya, jika memang keputusannya adalah membuat pengadilan HAM, maka ia akan melakukannya. Tapi dia tetap menekankan bahwa tuduhan itu bersifat tendensius.

1.3 Makrostruktur

Prabowo berusaha membangun makna bahwa dirinya bukan aktor utama dalam pelanggaran HAM masa lalu, bahwa isu tersebut kerap dipolitisasi, dan bahwa jika memang perlu, ia siap menegakkan HAM termasuk membentuk pengadilan HAM.

2. Kognisi Sosial

Ada rasa defensif karena selama bertahun-tahun Prabowo selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM. Ia ingin menggeser narasi bahwa ia tidak anti-HAM dan mengklaim dukungan dari pihak yang dulu pernah menjadi korban. Keyakinan bahwa isu HAM ini bukan murni soal keadilan, melainkan ada unsur politik praktis yang dimainkan dalam debat.

3. Konteks Sosial

Pemilu 2024 membawa kembali isu-isu lama, seperti pelanggaran HAM berat, sebagai bahan serangan politik. Publik masih sangat sensitif soal masalah HAM, terutama peristiwa 1998 dan penghilangan paksa. Dalam suasana debat, Prabowo berusaha mempertahankan citra sebagai calon presiden yang kuat tetapi tetap peduli HAM. Ada tekanan dari media dan masyarakat sipil yang mendorong penyelesaian kasus HAM berat, yang membuat Prabowo harus hati-hati.

Melalui analisis wacana terhadap Prabowo Subianto dalam debat capres 2019 dan 2024 terkait isu Hak Asasi Manusia (HAM), dapat disimpulkan bahwa terdapat pergeseran signifikan dalam cara penyampaian dan penyusunan argumen yang digunakan oleh Prabowo. Pada debat capres 2019, pembahasan tentang isu HAM lebih sedikit dan tidak terlalu mendetail. Isu yang diangkat pun tidak terlalu sensitif, sementara sikap Prabowo di debat ini terkesan hati-hati dan sedikit menghindari dari isu HAM yang sering dikaitkan dengannya.

Sebaliknya pada debat capres 2024, Prabowo tampil lebih berani, tegas, dan tidak menghindari ketika membahas isu HAM. Ia menunjukkan keberpihakan yang lebih tegas terhadap perlindungan HAM, dengan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan sosial untuk mendukung stabilitas di Papua. Pergeseran ini mencerminkan adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi, serta upaya untuk memperkuat citra Prabowo sebagai calon pemimpin yang dapat mengatasi persoalan HAM dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan konstruktif. Wacana yang dibangun dalam debat-debat tersebut mencerminkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan dialog dalam menyelesaikan konflik, meskipun dalam impelentasiannya terdapat tantangan.

C. Komparasi Transformasi Wacana 2019 dan 2024

Transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat capres 2019 dan 2024 dapat diamati melalui beberapa aspek penting yang mencerminkan perubahan strategi retorik, penyesuaian terhadap posisi politik baru, serta respons terhadap dinamika sosial politik yang berkembang. Tiga aspek utama yang menonjol dalam transformasi tersebut mencakup perubahan cara representasi pelanggaran HAM, pergeseran aktor yang dikritik maupun dibela, serta implikasi perubahan wacana terhadap positioning politik Prabowo.

Transformasi wacana Prabowo Subianto tidak hanya terjadi dalam pilihan diksi dan topik debat, tetapi juga terlihat dalam cara ia membentuk ulang citra dirinya di hadapan publik. Sosok yang dahulu kerap diasosiasikan dengan pelanggaran HAM berat kini berhasil mengonstruksi citra baru sebagai tokoh yang “ramah,” bahkan populer dengan sebutan “gemoy” sebuah representasi yang sangat kontras dengan citra militeristik dan keras yang melekat padanya di masa lalu. Pergeseran ini tidak bisa dilepaskan dari kecakapannya dalam merespons dinamika opini publik serta tekanan media, yang dalam kerangka Van Dijk disebut sebagai bagian dari strategi diskursif dalam pengelolaan wacana dan citra diri.

Kelihaian Prabowo dalam menyesuaikan diri dengan perubahan konstelasi politik nasional mencerminkan kombinasi antara ambisi pribadi, keluwesan strategi, dan kalkulasi terhadap realitas politik kontemporer Indonesia. Pada level kognisi sosial, hal ini menunjukkan adanya skema berpikir yang sangat adaptif terhadap perubahan, termasuk kesadaran akan pentingnya dukungan generasi muda, media sosial, dan rekonsiliasi politik pasca-pilpres 2019. Citra “gemoy” bukan hanya strategi pencitraan, tetapi bagian dari pembungkaman ulang identitas politik yang bertujuan untuk menetralkan memori kolektif publik tentang masa lalunya yang kontroversial, sekaligus memperluas basis dukungan elektoral.

1. Perubahan Cara Prabowo Merepresentasikan Pelanggaran HAM

Pada debat capres 2019 Prabowo menampilkan pelanggaran HAM dengan nada defensif dan menghindari, terutama ketika membahas keterlibatannya dalam peristiwa masa lalu seperti penculikan aktivis 1998 sehingga tidak terlalu terlihat bagaimana ideologinya karena Prabowo hanya fokus bahwa dirinya bukanlah pelanggar HAM. Tidak ada diskusi mendalam tentang hak asasi manusia dan perhatian sering dialihkan ke topik-topik lain yang lebih aman secara politik. Tampaknya Prabowo lebih tertarik untuk membangun reputasi sebagai seorang nasionalis dan pembela rakyat kecil, tanpa memberikan tanggapan yang signifikan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat.

Dalam debat capres 2024 alih-alih bersikap defensif, Prabowo justru membangun serta membentuk diri bahwa ia telah berubah dan berkomitmen pada supremasi hukum dan HAM, Prabowo tampil lebih transparan, tegas, dan lugas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pelanggaran HAM. Representasi HAM dalam debat ini tidak lagi dilihat sebagai ancaman terhadap legitimasi politiknya, melainkan sebagai ruang untuk memperkuat citra sebagai pemimpin yang tegas sekaligus kooperatif terhadap agenda pemerintahan yang pro-HAM. Pada tahun 2024 Prabowo lebih tampil percaya diri dan mulai mengintegrasikan wacana HAM kedalam kerangka nasionalisme dan stabilitas, pembangunan dan keamanan negara. Pernyataan Prabowo seperti “Jika ekonomin kuat maka dapat meminimalisir pelanggaran HAM” atau “pembangunan di Papua adalah bukti nyata komitmen terhadap HAM” menunjukkan bahwa Prabowo tidak lagi membingkai suatu isu HAM sebagai hak dasar individu yang harus dijamin negara, melainkan sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional.

Untuk memperjelas perubahan atau transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat capres tahun 2019 dan 2024, berikut disajikan tabel perbandingan yang menggambarkan dinamika wacana berdasarkan dimensi-dimensi yang telah dianalisis, seperti struktur teks,

kognisi sosial, dan konteks sosial politik. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan strategi komunikasi, posisi politik, serta konstruksi citra diri Prabowo dalam menyampaikan isu hak asasi manusia (HAM).

Table 2 komparasi AWK Teun Van Dijk 2019 dan 2024

Dimensi Analisis (Van Dijk)	Debat Capres 2019	Debat Capres 2024	Bentuk Transformasi
Struktur Teks	Prabowo cenderung hati-hati, menghindari istilah eksplisit HAM, memilih narasi normatif dan fokus pada stabilitas nasional.	Prabowo lebih tegas, menyebut isu HAM secara langsung, memperkuat pesan lewat intonasi dan gestur seperti silat.	Dari wacana defensif menjadi lebih terbuka dan ekspresif.
Kognisi Sosial	Membangun citra aman, karena masih dibayang-bayangi masa lalu sebagai eks militer dan tuduhan pelanggaran HAM.	Membangun citra pemimpin negarawan dan pembela rakyat; tampil percaya diri dan solutif.	Transformasi dalam konstruksi identitas sosial-politik dan cara memandang diri.

Konteks Sosial Politik	Prabowo sebagai oposisi; posisi di luar pemerintahan membuatnya cenderung berhati-hati agar tidak diserang balik	Sudah menjabat sebagai Menhan; posisi dalam pemerintahan menguatkan legitimasi dalam bicara soal HAM dan rakyat.	Perubahan posisi politik mempengaruhi isi dan strategi wacana.
-------------------------------	--	--	--

Selain ditinjau dari pendekatan Teun A. van Dijk, transformasi wacana Prabowo juga dapat dilihat secara lebih luas melalui perubahan gaya komunikasi, strategi politik, dan konstruksi citra diri. Tabel berikut merangkum transformasi wacana Prabowo antara debat capres 2019 dan 2024 berdasarkan aspek-aspek tersebut.

Aspek	Debat Capres 2019	Debat Capres 2024	Bentuk Transformasi
Gaya Berbicara	Hati-hati, diplomatis, memilih kata yang aman, nada bicara cenderung tenang.	Hati-hati, diplomatis, memilih kata yang aman, nada bicara cenderung tenang.	Dari gaya defensif ke ekspresif dan teatrikal.
Isu HAM	Minim pembahasan, cenderung menghindari isu HAM secara eksplisit.	Dibahas langsung, diklaim sebagai bagian dari pembelaan terhadap rakyat.	Dari penghindaran ke pengakuan dan pendekatan aktif.

Strategi Politik	Fokus menyerang pemerintah sebagai oposisi, tetapi tetap menjaga citra agar tidak terlalu konfrontatif.	Narasi mendukung capaian pemerintah, menguatkan citra sebagai bagian dari solusi.	Dari oposan ke koalisi yang loyal.
Citra Diri	Masih terbebani masa lalu (pelanggaran HAM), berusaha tampil netral dan aman.	Menampilkan diri sebagai negarawan kuat, cinta rakyat, dan siap melanjutkan kepemimpinan.	Rekonstruksi citra dari terduga pelanggar HAM menjadi pembela rakyat.
Posisi Politik	Oposisi terhadap Jokowi, belum punya akses kekuasaan.	Menteri Pertahanan, bagian dari kabinet Jokowi.	Perubahan posisi memberi pengaruh besar terhadap narasi wacana.

Dalam Pilpres 2024, terjadi perubahan yang signifikan dalam cara Prabowo membingkai pemikirannya mengenai HAM. Ia tampil lebih percaya diri dan secara eksplisit menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pemikiran HAM yang dibawanya tidak hanya terbatas pada kebebasan sipil, tetapi juga merambah ke dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi-misi resmi maupun pernyataan dalam debat capres, Prabowo menyampaikan bahwa perlindungan HAM harus diwujudkan melalui

kebijakan yang inklusif, berperspektif gender, dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang selama ini termarginalkan. Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, dan kebebasan berpendapat serta mimbar akademik harus dijaga sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Pemikiran Prabowo pada tahun 2024 menunjukkan upaya rekonstruksi citra sebagai pemimpin humanis dan populis, sejalan dengan posisinya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus bagian dari pemerintahan. Strategi ini menunjukkan pergeseran dari posisi defensif menuju narasi afirmatif yang mengintegrasikan HAM dalam kerangka pembangunan dan perlindungan terhadap rakyat.

2. Pergeseran Aktor yang Dikritik atau Dibela

Dalam debat 2019, Prabowo banyak mengkritik pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo. Kritik ditujukan pada lemahnya penegakan hukum, kesenjangan sosial, bias gender dalam partai, dan kurangnya perhatian terhadap keadilan hak asasi manusia. Posisinya sebagai oposisi memposisikannya sebagai aktor yang aktif mendekonstruksi kebijakan pemerintah petahana. Namun, pada debat 2024, posisi Prabowo berubah total sebagai Menteri Pertahanan dan calon presiden dari koalisi yang berkuasa, ia tidak lagi menyerang kebijakan pemerintah sebelumnya melainkan berusaha mempertahankannya. Alih-alih menyerang, Prabowo kini justru membela kebijakan-kebijakan HAM di era Jokowi, terutama program penyelesaian non-yudisial untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pergeseran ini menunjukkan adanya reposisi aktor yang dikritik dan dibela dari pengkritik keras pemerintah menjadi pembela stabilitas dan keberlangsungan kebijakan pemerintah yang menjadi bagiannya.

3. Implikasi Perubahan terhadap Posisi Politik

Transformasi wacana yang dilakukan Prabowo mencerminkan reposisi politik yang signifikan dari oposisi ke pusat kekuasaan. Pada debat 2019, wacana HAM digunakan untuk membentuk narasi perlawanan dan

kritik terhadap status quo. Namun, pada tahun 2024, narasi HAM digunakan untuk menampilkan citra sebagai pemimpin yang mampu membawa kesinambungan dan stabilitas, sekaligus memperkuat legitimasinya sebagai calon presiden yang didukung oleh kekuasaan. Perubahan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Prabowo bersifat adaptif dan pragmatis. Implikasinya adalah melemahnya citra lama sebagai “penentang” dan menguatnya citra baru sebagai “penawar” yang mampu berdamai dengan masa lalu dan mengakomodir tuntutan masyarakat sipil untuk penegakan HAM, meskipun masih ada kritik terhadap pendekatan penyelesaian yang dianggap kurang memenuhi keadilan substantif.

Prabowo Subianto merupakan purnawirawan militer yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan mengabdikan selama 24 tahun di TNI. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang membentuk Detasemen 81 Antiteror dan melakukan sejumlah operasi pembebasan sandera. Latar belakang ini menunjukkan bahwa cara pandang Prabowo terhadap negara sangat dipengaruhi oleh tradisi militer yang menekankan stabilitas, ketaatan, dan nasionalisme sebagai nilai utama. Dalam Analisis Wacana Kritis Van Dijk, kognisi sosial seperti pengalaman hidup dan nilai-nilai yang diyakini oleh aktor menjadi kunci dalam membentuk ujaran atau wacana.

Dalam visi-misinya pada Pemilu 2019, Prabowo secara eksplisit menekankan pentingnya supremasi hukum dan penegakan hukum yang adil. Ia menyebut bahwa negara harus hadir sebagai penjamin utama hukum, politik, dan pertahanan-keamanan. Gagasan ini secara ideologis menunjukkan bahwa Prabowo menempatkan negara sebagai entitas tertinggi dalam relasi kekuasaan, termasuk dalam urusan penegakan HAM. Dengan kata lain, HAM dipandang bukan sebagai hak individu yang melekat dan harus dijaga dari intervensi negara, melainkan sebagai bagian dari stabilitas yang diatur dan dijaga oleh negara itu sendiri.

Dalam debat-debat capres, pandangan ini tampak konsisten. Di tahun 2019, Prabowo bersikap defensif terhadap tuduhan pelanggaran HAM,

sementara pada tahun 2024 ia membingkai isu HAM dalam narasi stabilitas ekonomi dan pembangunan. Ini menunjukkan pergeseran bukan hanya dalam gaya retorika, melainkan juga dalam strategi dominasi diskursif, di mana Prabowo mengatur ulang makna HAM agar sesuai dengan visi besar nasionalis dan kontrol negara. Dengan demikian, transformasi wacana Prabowo tidak bisa dilepaskan dari identitas ideologisnya sebagai eks-militer dan nasionalis sebuah posisi yang cenderung melihat HAM melalui logika negara dan kekuasaan, bukan dari perspektif hak individu yang kritis terhadap negara.

BAB V

KONTEKS SOSIAL POLITIK DALAM TRANSFORMASI WACANA KRITIS PRABOWO DALAM DEBAT 2019 DAN 2024

Proses transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2019 dan 2024 bergantung pada konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Pada setiap periode pemilu terdapat perubahan dalam penyampaian, sikap, dan wacana Prabowo. Hal ini mengindikasikan bahwa situasi sosial dan politik yang berubah. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana situasi sosial-politik di tahun 2019 dan 2024 membentuk dan mempengaruhi pendekatan komunikasi Prabowo, terutama terkait dengan hak asasi manusia.

Pada debat capres 2019 Prabowo terlihat berhati-hati dan kurang terbuka dalam menanggapi isu-isu HAM terutama karena isu-isu tersebut sering dikaitkan dengan masa lalu militernya. Sebaliknya, pada debat capres 2024 Prabowo tampil lebih tegas dan berani dalam menanggapi isu-isu HAM bahkan menunjukkan sikap percaya diri ketika menanggapi kritik dari lawan politiknya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa wacananya mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh

perbedaan situasi dan kondisi politik, dukungan kekuasaan, dan persepsi publik terhadapnya.

Bab ini akan membahas lebih lanjut bagaimana dinamika sosial politik pada dua periode tersebut berperan dalam membentuk perubahan wacana Prabowo Subianto, dengan fokus pada isu HAM dalam debat capres tahun 2019 dan 2024.

A. Konteks Sosial Politik Tahun 2019

Proses pembelajaran dan pengujian demokrasi elektoral mulai mengambil bentuk yang lebih kompleks sejak Pemilu 2019. Pada masa ini, pilpres sebagai salah satu perwujudan utama kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi kompetisi politik biasa, tetapi juga diwarnai dinamika sosial yang tajam. Politik identitas mencuat ke permukaan, diiringi dengan polarisasi masyarakat yang semakin dalam, serta maraknya fitnah dan hoaks di media sosial dan ruang publik. Kondisi ini tidak hanya melemahkan rasa persatuan bangsa, tetapi juga membentuk lanskap sosial politik yang penuh dengan ketegangan. Pada proses pascapemilu, berbagai peristiwa lanjutan seperti unjuk rasa, gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan perdebatan panjang di ruang publik menjadi cerminan wacana dan aksi politik yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia sedang mengalami fase krusial dalam proses pendewasaannya.

Prabowo Subianto pernah menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa penculikan aktivis 1998 yang selama ini menjadi pusat tuduhan pelanggaran HAM berat terhadap dirinya permintaan maaf tersebut lebih tampak sebagai langkah politis daripada bentuk pertanggungjawaban substantif. Momen penyampaian permintaan maaf itu umumnya terjadi menjelang pemilu, ketika citra dan elektabilitas menjadi faktor krusial dalam perebutan kekuasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa permintaan maaf dimobilisasi sebagai strategi diskursif, yakni sebagai alat untuk memperhalus memori kolektif publik terhadap masa lalu yang kelam, dan bukan sebagai bentuk pengakuan penuh atas kesalahan.

Dalam kerangka kognisi sosial Van Dijk, tindakan ini menunjukkan adanya kesadaran strategis Prabowo terhadap bagaimana opini publik

terbentuk, serta bagaimana narasi rekonsiliasi bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik elektoral. Permintaan maaf ini bukan semata-mata bersifat personal atau moral, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang digunakan untuk merekonsiliasi citra masa lalu dengan kepentingan masa kini. Ini merupakan refleksi dari kompleksitas politik Indonesia, di mana isu-isu HAM dapat dinegosiasikan ulang dalam ruang publik, tergantung pada posisi kekuasaan, tekanan media, dan dinamika dukungan elektoral.

1. Posisi Prabowo Sebagai Oposisi

Persaingan politik yang dimulai pada pemilihan presiden 2014 muncul kembali ketika Jokowi dan Prabowo Subianto berkompetisi pada pemilu 2019. Pertarungan ini menunjukkan titik tertinggi dari polarisasi politik di Indonesia, di mana masyarakat terbagi menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Polarisasi ini lebih dari sekadar perbedaan pandangan politik, namun berkembang menjadi fenomena yang mengganggu hubungan antarpribadi. Istilah “cebong” bahkan digunakan untuk mereka yang mendukung Jokowi dan “kampret” untuk mereka yang mendukung Prabowo. Bisa dikatakan strategi politik yang diterapkan oleh masing-masing tim adalah penyebab dinamika dan resistensi politik yang muncul dalam kontestasi ini. Pada tahun 2019 masyarakat Indonesia terbelah menurut Prabowo dia juga menyatakan bahwa keadaan saat itu sangat genting, terutama setelah kemenangan Jokowi. Prabowo menyatakan bahwa dia menyaksikan para pendukungnya sangat marah dengan keadaan yang terjadi. Prabowo kemudian menyadari bahwa kemungkinan konflik nasional akan meningkat jika dia turut memperburuk keadaan.

Polarisasi yang terjadi tidak terlepas dari konflik yang terjadi selama kampanye antara tim Jokowi dan Prabowo. Jokowi sering menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Prabowo pada masa Orde Baru. Ia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo memiliki caleg mantan koruptor terbanyak, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW). Jokowi menggunakan isu ini untuk mempertanyakan kredibilitas Prabowo sebagai calon presiden. Di sisi lain,

Prabowo menekankan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengelola ekonomi dan sumber daya alam. Ia menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi lebih mengutamakan kepentingan negara lain daripada kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu polarisasi semakin diperparah dengan isu-isu sensitif seperti nasionalisme, agama, dan identitas yang sering digunakan selama kampanye. Kedua belah pihak terlihat melakukan berbagai upaya untuk memenangkan kontestasi termasuk kampanye yang tidak menyenangkan.

Setelah kemenangannya, Jokowi memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo untuk meredam ketegangan yang terjadi saat itu, salah satu langkah dalam upaya mendamaikan kedua kubu yang terpolarisasi adalah dengan mengajak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Prabowo secara resmi ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena hubungan antara Jokowi dan Prabowo selama masa kampanye berlangsung sengit. Jokowi juga menyampaikan ajakan untuk mengakhiri pertengkaran antar pendukungnya dengan menekankan bahwa tidak ada lagi istilah cebong dan kampret. Jokowi menyatakan bahwa tujuan utama ke depan adalah membangun solidaritas untuk bersatu menghadapi tantangan global.

Selain tekanan politik dalam negeri, dinamika sosial politik menjelang Pilpres 2019 juga turut dipengaruhi oleh manuver politik yang terjadi sebelum masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Dalam periode ini, serangan terhadap para kandidat tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, termasuk dalam bentuk publikasi dokumen-dokumen sensitif yang berkaitan dengan masa lalu para kandidat. Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang kembali menjadi sorotan publik akibat isu pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa reformasi 1998. Jauh sebelum debat capres dimulai, publik dikejutkan oleh kebocoran dokumen pemerintah Amerika Serikat yang diungkap oleh National Security Archive (NSA) di George

Washington University, yang menyebutkan keterlibatan sejumlah petinggi militer Indonesia, termasuk Prabowo, dalam operasi penculikan aktivis pada masa tersebut. Dokumen tersebut, yang dirilis pada 7 Mei 1998, menambah tekanan terhadap citra Prabowo di ruang publik, terutama di tengah masyarakat yang masih mengingat peristiwa kelam reformasi. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa isu HAM menjadi sangat sensitif dan sulit untuk dihindari, meskipun dalam debat capres 2019, pembahasannya masih sangat terbatas dan tidak mendetail.

Faktanya, Prabowo Subianto telah lama menjadi sasaran serangan politik yang berkaitan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama setiap kali dirinya mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pada Pilpres 2009, ketika ia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, isu ini kembali mencuat dan digunakan sebagai alat delegitimasi oleh lawan politik. Hal yang sama terjadi dalam Pilpres 2014, di mana berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), serangan terkait pelanggaran HAM berdampak negatif terhadap elektabilitas Prabowo. Isu tersebut menjadi hambatan yang signifikan, karena dianggap mampu menggerus kepercayaan publik terhadap kapabilitas dan integritasnya sebagai pemimpin nasional.

Pengamat politik Adi Prayitno dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa meskipun isu HAM terhadap Prabowo bersifat musiman dan selalu muncul menjelang pemilu, namun efektivitasnya tetap tinggi karena pihak Prabowo tidak pernah memberikan jawaban atau klarifikasi yang tuntas. Strategi diam atau menghindar yang dipilih Prabowo dan tim suksesnya justru memperkuat persepsi negatif di mata sebagian pemilih, khususnya kelompok masyarakat yang peduli pada penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam konteks ini, isu HAM tidak hanya menjadi bagian dari dinamika demokrasi elektoral, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menguji konsistensi dan rekam jejak moral seorang calon pemimpin nasional.

Serangan politik semacam ini bukanlah hal baru, bahkan sudah menjadi pola yang konsisten setiap kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi komunikasi politiknya, Prabowo tampak memilih sikap defensif, berhati-hati dalam merespons isu HAM, dan cenderung menghindari pembahasan mendalam mengenai tuduhan yang kerap disematkan kepadanya. Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyeret nama Prabowo Subianto sebenarnya telah menjadi perbincangan sejak lama, bahkan jauh sebelum Pilpres 2019 berlangsung. Salah satu kasus yang paling sering dikaitkan dengannya adalah kasus Tim Mawar, sebuah tim khusus dari kesatuan Kopassus yang dibentuk pada masa menjelang kejatuhan Orde Baru tahun 1998. Tim ini diduga terlibat dalam operasi penculikan terhadap sejumlah aktivis reformasi, yang saat itu vokal menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Soeharto.

Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus sebelum diangkat menjadi Panglima Kostrad, diduga memiliki keterlibatan dalam pembentukan atau operasi Tim Mawar. Salah satu korban penculikan, Andi Arief, yang kini dikenal sebagai politisi Partai Demokrat, menyebut bahwa dirinya diculik oleh anggota Tim Mawar pada tanggal 28 Maret 1998. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu referensi publik dalam membicarakan keterlibatan militer dalam pelanggaran HAM masa lalu. Isu ini kembali mencuat setiap kali Prabowo mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, dan menjadi salah satu sumber tekanan dalam wacana politik, baik di ruang publik maupun dalam panggung debat. Keterkaitan Prabowo dengan masa kelam militer ini menimbulkan respons hati-hati dari yang bersangkutan, terutama dalam merespons pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya, seperti yang terlihat pada debat capres 2019. Hal ini pula yang menjadi latar belakang sikap defensifnya saat membahas isu HAM, bahkan ketika pertanyaan itu datang dari rival debat seperti Ganjar Pranowo.

2. Basis Pendukung Dan Persepsi Publik

Situasi sosial-politik menjelang pemilihan presiden 2019 menunjukkan bahwa para pendukung Prabowo Subianto sebagian besar berasal dari kelompok nasionalis dan konservatif. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki perspektif politik yang berbeda terhadap isu-isu hak asasi manusia; mereka menganggap stabilitas dan kedaulatan negara lebih penting daripada menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Lebih jauh lagi, kisah ini tercermin dalam cara Prabowo berbicara politik, terutama ketika ia membahas isu-isu hak asasi manusia dalam debat. Prabowo sering beralih dari tuduhan pelanggaran HAM ke isu-isu yang lebih luas seperti ketahanan nasional, stabilitas politik, dan keamanan negara selama debat capres 2019. Strategi ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kepemimpinan yang kuat di mata konstituen utamanya dan menghindari pembahasan isu-isu sensitif yang dapat merusak elektabilitasnya. Oleh karena itu, wacana HAM yang dibahas dalam debat tidak hanya menjadi arena kompetisi gagasan, tetapi juga menjadi ajang untuk mencapai kesepakatan makna antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip keadilan sejarah.

roses pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, khususnya dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres), disesalkan banyak pihak karena adanya sejumlah dinamika politik yang dinilai tidak sehat. Selama masa kampanye, termasuk masa pra-kampanye, terdapat gejala meningkatnya eksploitasi identitas sebagai alat propaganda politik, terutama dalam bentuk politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Kondisi ini diperparah dengan merebaknya ujaran kebencian dan disinformasi yang memenuhi ruang publik, baik di media sosial maupun dalam wacana politik arus utama. Fenomena-fenomena tersebut tidak hanya memperkeruh suasana menjelang pemilu, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi nasional mengalami penurunan, yang merupakan sinyal kuat adanya kemunduran proses demokratisasi di mata dunia internasional. Situasi ini menjadi catatan penting dalam memahami

konteks sosial-politik yang mempengaruhi cara para kandidat, termasuk Prabowo Subianto, dalam membangun wacana politik mereka menjelang pemilu.

B. Konteks Sosial Politik pada Debat Capres 2024

1. Prabowo Sebagai Bagian Dari Pemerintah

Pemilu 2024 menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia karena untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir, terjadi pergeseran besar dalam konfigurasi kekuasaan. Salah satu yang paling menonjol adalah pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden menggantikan Prabowo Subianto. Pencalonan ini menuai kontroversi, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap menimbulkan konflik kepentingan. Situasi ini memicu diskusi publik mengenai moral politik, netralitas lembaga, dan prospek demokrasi elektoral di Indonesia.

Secara sosial, masyarakat Indonesia juga mulai merasakan kelelahan akibat polarisasi politik yang terus menerus muncul sejak Pilpres 2014 dan 2019. Namun, polarisasi belum sepenuhnya hilang, tetapi telah bertransformasi. Masalah-masalah lama seperti pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih ada, tetapi dibingkai dengan cara komunikasi politik yang lebih kontemporer, terkadang dibungkus dengan komedi atau pencitraan yang sederhana. Prabowo menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih fleksibel dan terbuka dalam konteks ini. Ia menggunakan media sosial dan pendekatan yang lebih santai namun tegas dalam debat untuk menunjukkan citra baru yang lebih moderat dan dekat dengan generasi muda. Hal ini merupakan hasil dari upaya untuk meningkatkan basis dukungan politiknya dan menciptakan cerita bahwa ia telah bertransformasi menjadi sosok negarawan yang siap memimpin Indonesia selama masa transisi.

Pemilu 2024 merupakan salah satu kontestasi politik terbesar dan paling menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Disebut sebagai

pesta demokrasi, pemilu idealnya dilakukan secara jujur, adil, dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu. Namun, tantangan besar muncul, terutama dalam menghadapi tingginya jumlah pemilih pemula dan pemilih muda. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekitar 60% pemilih berada pada rentang usia 17 hingga 49 tahun, yang mencerminkan dominasi generasi muda dalam kontestasi politik kali ini. Menurut Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu, warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih berhak menggunakan hak pilihnya. Kelompok yang disebut sebagai pemilih pemula ini seringkali tidak memiliki pengalaman atau pendidikan politik yang memadai. Akibatnya, mereka menjadi sasaran empuk berbagai bentuk kampanye politik yang manipulatif, termasuk hoaks, politik uang, dan politisasi identitas.

Hak asasi manusia sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam politik nasional selama debat calon presiden 2024. Karena Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya, pemilu 2024 dianggap sebagai kesempatan terakhirnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Hal ini disebabkan oleh faktor usia dan dinamika politik yang terus berubah. Oleh karena itu, semua narasi, penampilan, dan pendekatan komunikasi politiknya sangat penting untuk membentuk persepsi publik dan menjawab keraguan tentang rekam jejaknya. Prabowo menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan berani kali ini, berbeda dengan penampilannya dalam debat capres 2019. Hal ini terutama terlihat dalam menanggapi pertanyaan atau tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pada debat 2024, perbincangan mengenai HAM menjadi lebih rumit. Bukan hanya pengungkapan kembali dugaan, tetapi juga meminta para kandidat untuk membuat komitmen nyata dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Dalam menanggapi isu-isu tersebut, Prabowo bersikap lebih santai, teliti dan tegas. Ia tidak lagi terlihat mengelak, namun berusaha mengambil alih cerita dengan menekankan bahwa ia akan membantu menjaga stabilitas dan menegakkan hak asasi manusia di masa depan. Prabowo menunjukkan perubahan dalam

pendekatannya terhadap wacana politik dalam debat kali ini. Dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut, pandangannya telah bergeser dari sekadar defensif menjadi lebih strategis dan bertujuan untuk mengukuhkan reputasinya sebagai negarawan yang matang secara politik. Transformasi ini merupakan bagian dari situasi sosial-politik yang berlaku di tahun 2024, yang ditandai dengan keterlibatan pemilih muda, tekanan untuk transparansi, dan keinginan masyarakat akan kepemimpinan yang tegas namun adil

Pemilu 2024 juga menghadirkan dinamika baru, termasuk berbagai kontroversi politik yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik, seperti pencalonan tokoh muda, putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kritik, dan polarisasi yang masih membayangi ruang publik. Dalam konteks ini, debat capres menjadi ruang penting bagi publik, khususnya pemilih muda, untuk menilai integritas dan visi para kandidat. Oleh karena itu, konteks sosial-politik pada Pemilu 2024 tidak hanya akan diwarnai oleh persaingan antar kandidat, tetapi juga bagaimana ruang demokrasi digunakan untuk mengedukasi dan membentuk pemilih yang lebih kritis dan rasional.

2. Basis Pendukung Dan Persespi Publik

Pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto tampil sebagai figur nasionalis yang secara strategis beraliansi dengan kelompok Islam konservatif. Dukungan datang dari tokoh-tokoh dan organisasi sayap kanan seperti GNPF-MUI, FPI, FUI, dan Laskar Jihad. Meskipun ia tidak memiliki latar belakang sebagai tokoh agama dan partai yang dipimpinnya, Gerindra, berhaluan nasionalis, Prabowo berhasil membangun citra sebagai kandidat yang religius. Hal ini merupakan bentuk strategi diskursif yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lanskap politik yang saat itu sarat dengan politik identitas berbasis agama, di mana pertarungan elektoral dibingkai sebagai kontestasi antara Islam moderat dan Islam radikal.

Dalam kerangka kognisi sosial, strategi ini menunjukkan bahwa Prabowo memahami pentingnya memainkan simbol dan identitas kultural untuk merebut simpati kelompok mayoritas. Ia menyesuaikan skema mental

dan narasi politiknya dengan harapan kolektif pemilih Muslim konservatif, meskipun hal tersebut tidak merepresentasikan ideologi personal atau partainya secara langsung. Ini menjadi bukti bahwa strategi wacana tidak selalu merefleksikan keyakinan ideologis sejati, melainkan dapat dibentuk secara fleksibel untuk kebutuhan kekuasaan.

Namun menjelang Pilpres 2024, Prabowo mengubah haluan strategisnya. Ia tidak lagi menonjolkan citra keagamaan, melainkan membangun diri sebagai tokoh yang lebih moderat, progresif, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan meredupnya politik identitas keagamaan dan meningkatnya sensitivitas publik, terutama generasi muda, terhadap isu-isu HAM, korupsi, dan pembangunan. Tantangan utama yang dihadapi Prabowo bukan lagi tentang menarik dukungan dari pemilih berbasis agama, tetapi bagaimana menghapus citra sebagai pelanggar HAM yang terus melekat padanya.

Sebelum mencalonkan diri sebagai capres dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019. Posisi strategis ini memberikan akses besar terhadap panggung politik nasional, sekaligus meningkatkan eksposur media dan memperkuat citra dirinya sebagai bagian dari kekuasaan. Dalam konteks relasi kuasa, jabatan Menhan membuat Prabowo tidak lagi berada dalam posisi oposisi seperti pada Pemilu 2019, melainkan sebagai bagian dari pemerintahan yang turut menentukan arah kebijakan nasional, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan yang erat kaitannya dengan isu HAM.

Dalam ranah komunikasi politik, pencitraan menjadi elemen sentral. Prabowo memaksimalkan berbagai platform, terutama media sosial, untuk membangun citra baru yang lebih santai, ramah, dan dekat dengan publik, terutama generasi muda. Narasi-narasi yang ia sampaikan di berbagai forum publik seperti podcast, seminar, dan media arus utama selalu dikemas dengan gaya yang relatable terhadap kondisi Indonesia kekinian. Bahkan, gestur tubuh dan ekspresi yang ekspresif dan sering mengundang tawa

menjadi bagian dari citra yang dibentuk secara konsisten sebagai sosok yang humanis dan terbuka.

Dalam teori framing analysis, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya menggeser bingkai persepsi publik terhadap dirinya dari tokoh militer keras dan kontroversial menjadi figur nasionalis yang bersahabat dan inklusif. Dalam konteks elektoralisme, pencitraan ini bertujuan untuk memperluas basis dukungan politik, khususnya dari kalangan pemilih muda yang cenderung sensitif terhadap isu-isu HAM, namun juga menyukai pendekatan yang ringan dan personal. Maka, status kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Menhan sekaligus dimanfaatkan untuk membangun legitimasi politik dan memuluskan jalannya menuju kemenangan dalam kontestasi elektoral.

C. Persepsi Publik dan Respons Elektoral terhadap Isu HAM

1. Reaksi Media dan Public terhadap Pernyataan Prabowo

Isu hak asasi manusia (HAM) secara historis memiliki posisi penting dalam wacana politik Indonesia pasca-reformasi. Namun, dalam praktiknya, posisi isu ini dalam agenda publik mengalami dinamika. Pada Pemilu 2019, isu HAM tetap muncul, terutama terkait dengan rekam jejak Prabowo dalam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu. Meski demikian, isu tersebut tidak mendominasi agenda publik dan lebih sering digunakan sebagai alat delegitimasi oleh lawan politik. Di sisi lain, pada 2024 isu HAM kembali dibicarakan, penguatan atau pelemahan isu HAM dalam agenda publik sangat bergantung pada bagaimana isu tersebut dikapitalisasi oleh elite politik dan seberapa kuat daya dorongnya dalam membentuk opini publik. Ketika isu HAM tidak memberikan efek elektoral signifikan, maka ia akan cenderung dikesampingkan dalam kampanye. Hal ini juga mencerminkan posisi isu HAM yang relatif "elitist" – lebih banyak diperjuangkan oleh aktivis dan akademisi dibanding menjadi concern utama masyarakat luas.

Dalam konteks debat capres, sensitivitas publik terhadap isu HAM sangat beragam. Sebagian besar pemilih cenderung menempatkan isu

ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sebagai prioritas utama, sementara isu HAM dianggap abstrak dan jauh dari kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, kelompok masyarakat sipil, korban, dan aktivis tetap menjadikan isu HAM sebagai alat ukur moral terhadap kandidat. Respons publik terhadap Prabowo yang kembali mencalonkan diri pada 2024 mencerminkan adanya penurunan sensitivitas publik terhadap rekam jejak HAM yang dulu begitu sentral. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi politik, di mana keberhasilan dalam membangun citra baru dan afiliasi politik dengan pemerintah berkuasa turut mempengaruhi penerimaan publik. Ketika seorang kandidat berhasil merangkul kekuasaan dan merekonstruksi citranya melalui narasi positif, sensitivitas publik terhadap masa lalu cenderung tereduksi.

Dalam dua debat capres yang dianalisis, framing terhadap isu HAM mengalami pergeseran. Pada 2019, Prabowo cenderung menggunakan strategi penghindaran. Ia membalas tuduhan pelanggaran HAM dengan menyatakan bahwa dirinya selalu menjadi "korban fitnah" dan "tidak pernah terbukti bersalah", serta menyindir balik elit kekuasaan yang juga memiliki masalah HAM. Strategi ini menunjukkan pola defensif dan menghindari substansi. Sementara itu, pada debat 2024, framing berubah menjadi lebih "pelurusan" narasi. Prabowo dengan lugas menyatakan bahwa ia mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui jalur non-yudisial. Ia tidak lagi menunjukkan sikap defensif, melainkan mereposisi dirinya sebagai bagian dari solusi. Hal ini merepresentasikan upaya legitimasi diri dengan menyesuaikan narasi personal terhadap kebijakan negara.

Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 dengan perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional, ditambah dukungan dari koalisi gemuk sembilan partai politik, menandai keberhasilannya dalam merekonstruksi citra di tengah bayang-bayang sejarah kelam sebagai perwira militer yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM. Citra "gemoy" yang dibangun selama kampanye

bukan hanya strategi komunikasi, melainkan bagian dari proses hegemonisasi wacana di mana citra masa lalu diubah menjadi narasi baru yang lebih ramah, ringan, dan dapat diterima publik luas, terutama generasi muda.

Dalam konteks kognisi sosial, hal ini mencerminkan bagaimana memori kolektif publik atas masa lalu dapat direkayasa dan dikikis secara perlahan melalui narasi yang konsisten dan dukungan media. Bahkan, isu pelanggaran HAM masa lalu mulai dianggap tidak relevan untuk diungkit kembali, seolah publik diajak untuk “move on.” Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sebagian tokoh prodemokrasi dan aktivis HAM kini justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan, yang secara tidak langsung memperlemah posisi kritik terhadap figur seperti Prabowo.

Secara diskursif, Prabowo tidak hanya berhasil mempertahankan kendali atas narasi yang menyangkut dirinya, tetapi juga membalikkan stigma menjadi kekuatan elektoral. Dalam istilah Van Dijk, ia telah menguasai akses terhadap wacana publik dan institusional, sehingga mampu mengatur ulang memori kolektif dan menggeser fokus publik dari masa lalu ke masa depan. Dengan demikian, strategi wacananya tidak sekadar membela diri, tetapi membentuk realitas baru bahwa masa lalu tak lagi relevan jika dibalut citra baru yang populer, didukung kekuasaan politik, dan dijamin media.

Transformasi citra politik Prabowo Subianto dari figur militer ke sosok politisi sipil menjadi bagian dari strategi yang sangat terencana dalam kontestasi politik pasca-2019. Seperti yang diungkapkan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, perubahan gaya politik Prabowo mencerminkan upaya transisi dari gaya kepemimpinan militeristik yang tertutup menjadi lebih terbuka, ramah, dan mudah diakses oleh publik. Dulu, Prabowo sering diasosiasikan sebagai tokoh yang sulit diajak komunikasi, eksklusif, dan penuh tekanan. Kini, ia tampil lebih hangat, dekat dengan media, serta aktif membangun relasi dengan kelompok pembuat konten dan pemilih muda. Menurut Adi, transformasi

ini belum pernah dilakukan Prabowo sebelumnya, dan dilakukan secara bertahap agar citra barunya sejalan dengan karakter politisi sipil lainnya.

Dalam konteks representasi politik, perubahan ini menunjukkan bagaimana identitas politik tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk secara performatif melalui praktik komunikasi, simbolik, dan media. Citra Prabowo yang dahulu sarat dengan nuansa kuasa dan ketegangan militer kini digantikan oleh citra “gemoy”, humoris, dan luwes sebuah strategi representasi untuk mengaburkan masa lalu yang otoriter dan membuka ruang legitimasi baru sebagai pemimpin nasional yang bisa diterima oleh berbagai segmen masyarakat.

2. Peran Media dan Mediasi Wacana

Peran media dan mediasi wacana, media memiliki peran sentral dalam memediasi wacana HAM dalam debat capres. Media mainstream seperti televisi dan portal berita online berperan dalam menentukan bagian mana dari pernyataan capres yang diangkat menjadi tajuk utama. Pada 2019, media lebih fokus pada kontroversi dan konflik dalam debat, termasuk tuduhan pelanggaran HAM. Sebaliknya, pada 2024, fokus pemberitaan lebih diarahkan pada stabilitas, komitmen terhadap negara, dan kerja sama lintas partai. Sementara itu, media sosial menjadi arena kontestasi wacana yang lebih cair dan masif. Di platform seperti Twitter dan TikTok, pernyataan capres terkait isu HAM menjadi bahan diskusi, meme, bahkan kampanye digital. Pola mediasi ini turut menentukan sejauh mana publik terpapar dan membentuk persepsi terhadap isu yang dibicarakan.

Pembingkaian isu-isu HAM oleh media menunjukkan variasi yang signifikan. Tidak semua media - baik dalam bentuk berita daring, jurnal, artikel opini, maupun platform media sosial - menampilkan narasi yang seragam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terkait dengan Prabowo Subianto. Terdapat perbedaan dalam cara media membingkai isu tersebut; ada yang menampilkan narasi yang cenderung kritis dan menyoroti rekam jejak Prabowo di masa lalu, ada pula yang

menampilkan narasi yang membela atau menormalisasi citranya. Perspektif yang berbeda ini menciptakan ruang pro dan kontra dalam opini publik. Media tertentu secara aktif membentuk persepsi publik melalui pemilihan diksi, penyajian visual, dan pemingkiaan. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak lagi hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor diskursif yang berperan dalam konstruksi makna sosial. Dalam konteks ini, media memiliki kekuatan untuk memperkuat atau mendistorsi representasi isu HAM dan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsikan Prabowo sebagai aktor politik.

Analisis wacana media memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam berbagai ranah. Bagi jurnalis dan praktisi media, pemahaman terhadap kekuatan wacana menjadi dasar penting untuk menghasilkan konten yang lebih etis, bertanggung jawab, serta tidak memperkuat bias atau ketimpangan sosial. Bagi pendidik dan pembuat kebijakan, analisis ini memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan literasi media masyarakat, agar publik tidak hanya menjadi konsumen informasi pasif, melainkan mampu mengevaluasi dan mengkritisi isi media secara aktif dan reflektif. Sementara itu, bagi masyarakat umum, keterampilan analisis wacana media dapat memperkuat kapasitas berpikir kritis dan meningkatkan kesadaran terhadap bagaimana informasi dikonstruksi serta disebarluaskan.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa analisis wacana media bukanlah proses yang netral atau bebas dari nilai. Analisis ini memiliki orientasi politis dan etis yang jelas. Seperti yang ditegaskan oleh van Dijk “Analisis wacana kritis mengambil posisi eksplisit dan dengan demikian ingin memahami, mengekspos, dan pada akhirnya menentang ketidaksetaraan sosial.” Oleh karena itu, seorang analis wacana perlu bersikap reflektif terhadap posisi ideologis dan asumsi yang mendasari analisisnya, serta menyadari peran strategis yang mereka mainkan dalam dinamika produksi dan reproduksi makna sosial di ruang publik.

Respons masyarakat sipil terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden, baik pada Pilpres 2019 maupun 2024, tidak lepas dari bayang-bayang masa lalunya yang dituding terlibat dalam pelanggaran HAM berat, khususnya kasus penculikan aktivis 1997–1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara tegas menyoroti bahwa ketidakhadiran proses peradilan terhadap dugaan keterlibatan Prabowo merupakan cerminan dari kultur impunitas yang masih kuat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut KontraS, kondisi ini mencerminkan adanya privilege politik yang membuat aktor dengan catatan pelanggaran HAM tetap bisa menikmati posisi elite dalam panggung kekuasaan, bahkan mencalonkan diri sebagai presiden.

Kekecewaan juga disuarakan oleh keluarga korban pelanggaran HAM berat, yang menilai kembalinya Prabowo ke bursa capres sebagai bentuk ketidakadilan dan kelumpuhan sistem akuntabilitas negara. Sebanyak 23 LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa sempat menyerukan agar masyarakat tidak memilih kandidat yang terindikasi memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Namun seiring waktu, suara kolektif ini terdengar makin melemah, terutama menjelang Pilpres 2019 dan 2024. Meskipun gaung perlawanan terhadap impunitas masih ada, suara masyarakat sipil cenderung kalah oleh dominasi narasi politik elektoral dan pencitraan di media arus utama.

Kelompok masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia (HAM) secara konsisten menuntut agar pemerintahan Prabowo Subianto tidak menempuh jalan pintas melalui mekanisme non-yudisial dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu suara yang paling lantang berasal dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melalui pernyataan staf Divisi Impunitas, Jessenia Destarini Asmoro, yang menegaskan bahwa penuntasan pelanggaran HAM harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mekanisme ini dianggap satu-satunya

jalur yang sah untuk memastikan akuntabilitas negara dan keadilan bagi korban.

Gerakan masyarakat sipil seperti Aksi Kamisan, yang telah berlangsung setiap hari Kamis sejak 18 Januari 2007 di depan Istana Negara, menjadi simbol perlawanan diam namun tegas terhadap praktik impunitas. JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan), sebagai penggerak utama Aksi Kamisan, secara rutin menyampaikan surat kepada presiden yang sedang menjabat termasuk kepada Prabowo jika ia resmi menjabat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan, bukan rekonsiliasi atau penyelesaian politik belaka.

Dalam analisis wacana Van Dijk, posisi masyarakat sipil ini mencerminkan keberadaan wacana tandingan (counter-discourse) terhadap narasi dominan negara yang cenderung mengaburkan atau menegosiasikan ulang makna keadilan HAM. Meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses ruang media arus utama atau panggung politik formal, masyarakat sipil tetap memproduksi wacana alternatif yang menekankan pentingnya akuntabilitas, keadilan transisional, dan pemenuhan hak korban. Ini sekaligus menantang dominasi aktor politik yang membingkai HAM sebagai isu pembangunan atau stabilitas semata

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Utama

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi wacana politik Prabowo Subianto dalam debat capres Pemilu 2019 dan 2024, dengan fokus pada isu hak asasi manusia (HAM), menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk. Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial-politik, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam strategi wacana Prabowo dari tahun 2019 ke 2024.

Pada 2019, Prabowo cenderung bersikap defensif, menghindar, dan membingkai isu HAM sebagai tudingan personal yang harus dibantah. Posisi politiknya sebagai oposisi, serta tekanan media dan kelompok HAM, membuat narasinya bersifat reaktif dan apologetik. Sebaliknya, dalam debat 2024, Prabowo lebih aktif membingkai HAM dalam kerangka pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai bagian dari pemerintah dan pemilik akses kekuasaan, ia mengatur ulang narasi untuk merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin nasional yang tegas, solutif, dan peduli rakyat. Narasi HAM pun diposisikan bukan sebagai hak fundamental warga negara, melainkan sebagai produk dari keberhasilan negara mengelola ekonomi dan keamanan.

Perubahan ini tidak hanya mencerminkan strategi diskursif, tetapi juga mengungkap dimensi ideologis dan relasi kuasa yang lebih dalam. Prabowo menggunakan posisinya sebagai Menteri Pertahanan untuk memperkuat legitimasi politiknya, mengelola citra melalui media, serta menggeser wacana publik tentang masa lalu. Penggunaan citra “gemoy” dan gaya komunikasi populis memperlihatkan usaha membentuk identitas baru yang lebih inklusif, untuk merebut suara generasi muda yang

mendominasi pemilih. Dalam proses ini, suara masyarakat sipil yang menuntut akuntabilitas HAM mengalami marginalisasi, dan isu HAM direduksi menjadi elemen elektoral semata.

Secara teoritik, penelitian ini menunjukkan relevansi dan ketajaman pendekatan Van Dijk dalam mengungkap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam kontestasi politik. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis isi ujaran, tetapi mampu membongkar konteks sosial dan struktur kognisi yang melatarbelakanginya. Selain itu, temuan ini juga memperkuat teori representasi dan framing analysis dalam konteks politik elektoral Indonesia, bahwa identitas politik bersifat performatif dan dapat direkonstruksi melalui strategi komunikasi dan media.

Secara empiris, skripsi ini menyumbang pemahaman baru tentang bagaimana aktor politik menggunakan wacana untuk membangun legitimasi di tengah kontroversi masa lalu. Transformasi wacana Prabowo memperlihatkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih rentan terhadap manipulasi simbolik, normalisasi impunitas, dan pengaburan tanggung jawab atas pelanggaran HAM. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya membaca politik tidak hanya dari segi institusi atau kebijakan, tetapi dari produksi dan reproduksi makna melalui bahasa. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian analisis wacana politik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika representasi, kekuasaan, dan legitimasi dalam ruang publik yang demokratis namun sarat mediasi simbolik.

2. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada sumber data yang digunakan, yaitu hanya bersumber dari tayangan debat capres tahun 2019 dan 2024 yang diunggah melalui platform YouTube. Meskipun video debat tersebut merupakan dokumentasi resmi dan autentik dari pernyataan langsung kandidat, tetapi pendekatan ini menyisakan celah dalam menangkap dimensi konteks yang lebih luas, seperti respons langsung publik, framing media, serta dinamika diskursif di ruang-ruang lain seperti

media cetak, daring, maupun media sosial. keterbatasan ini berdampak pada ruang analisis, terutama dalam dimensi kognisi sosial dan konteks sosial-politik, karena interpretasi yang dilakukan lebih banyak mengandalkan pendekatan tekstual semata. Implikasinya, hasil analisis menjadi lebih deskriptif dan interpretatif tanpa verifikasi lebih lanjut terhadap persepsi publik secara langsung maupun reaksi media secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, A. N. (2018). Pengaruh Teknik Debat Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Pinrang Kabupaten Pinrang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asril, S. (2018, December 19). *Ini Jadwal Debat Pilpres 2019, dari Tanggal Hingga Tema*. KOMPAS.com; Kompas.com. Retrieved January 9, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/19/17590871/ini-jadwal-debat-pilpres-2019-dari-tanggal-hingga-tema>
- Cliff, T., Ruhukail, J., Pustakawan, P., Transformasi, T., & Jurnal, quot; (2003). *Transformasi Dunia Perpustakaan* (pp. 1–8). <https://repository.radenfatah.ac.id/24081/3/BAB%20II.pdf>.
- detikcom, T. (2019, March 31). *Jokowi vs Prabowo di Debat Keempat, Siapa yang Rebut Hati Netizen?* Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-4490838/jokowi-vs-prabowo-di-debat-keempat-siapa-yang-rebut-hati-netizen>
- Fitria Chusna Farisa. (2023). Gaduh Format Debat Capres-Cawapres 2024, Bagaimana Aturan Menurut UU? Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. Retrieved January 9, 2025, <https://doi.org/1030381/gaduh-format-debat-capres-cawapres-2024-bagaimana-aturan-menurut-uu>
- Hamdi, S. (2024). Strategi Dan Gaya Debat Gibran Di Pilpres 2024. *Tata Kelola: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10 (4). <https://www.bbcnews.com> (2019, January 18). *Debat Pilpres: “datar” sampai saling tuding penegakkan hukum dan penindakan korupsi - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46903006.amp>
- <https://www.bbcnews.com> (2019, May 22). *Hasil pemilu 2019: Perjalanan politik Prabowo sejak 2004, kekalahan dan peluangnya pada 2024 - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48350151.amp>
- <https://youtu.be/zB0RvKA2kw?si=wHq5VGtqjJkCtYls>
- <https://www.youtube.com/live/E6G85GvVdzw?si=R-ORlpMfAJBcqbi8>
- Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan 23 (2021): 79–94.

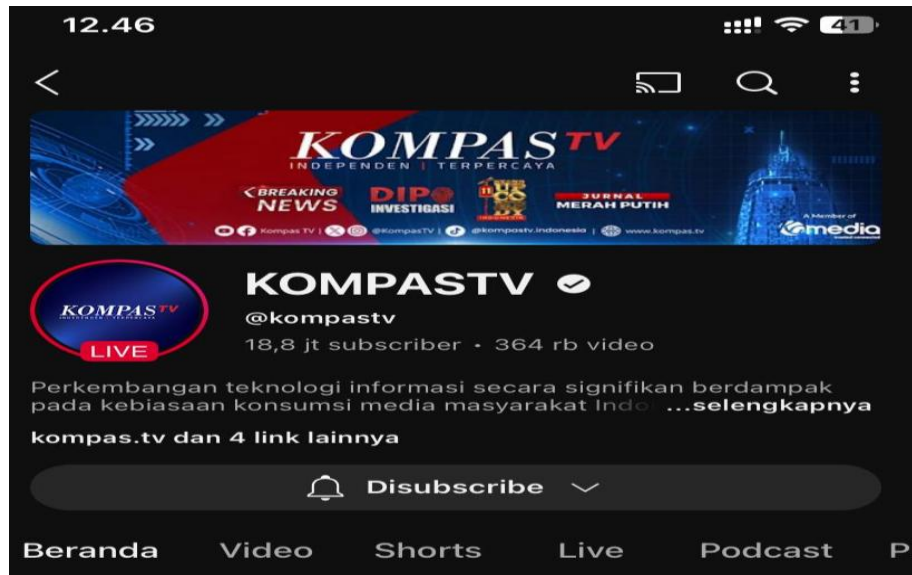
- Irfan Fathurohman. (2019, July). *Prabowo Ingin Gerindra Tetap Oposisi, Begini Alasannya*. IDN Times.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/prabowo-ingin-gerindra-tetap-oposisi-begini-alasannya?page=all>
- Isa, A. (2024). Retorika Prabowo Subianto dalam Debat Pertama Pemilihan Presiden 2024. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 16(2), 143-167.
- Iskandar, F. (2020). Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 31-38.
- Iskandar, F. (2020). Analisis Wacana Politik Debat Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 31-38.
- Jo, B., & Debora, Y. (2023, December 12). *Daftar Stasiun TV dan Radio yang Menyiarkan Debat Pilpres 2024*. Tirto.id; Tirto.id. Retrieved January 9, 2025, <https://tirto.id/daftar-stasiun-televisi-radio-menyiarkan-debat-pilpres-2024-gTeV>
- Mahmud, E., Morelent, Y., & Ahadiat, E. Analisis Wacana Kritis Model Teun A Van Dijk Pada Pemberitaan Tribunpadang. Com: Debat Capres Jokowi Dan Prabowo Dalam Pilpres 2019. *Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1).
- Maidana, M. "Alacrity: Journal Of Education." *Journal Of Education* 1.2 (2021): 20-29.
- Mubarak, H. Z. (2024, January 10). *Memaknai Debat Politik*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/kolom/d-7130865/memaknai-debat-politik>
- Muhammad Fatoni. (2019, January 9). *Jadwal Debat Capres dan Cawapres 2019, Siaran Langsung dan Tema Tiap Debat*. Tribunjogja.com. <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/09/jadwal-debat-capres-dan-cawapres-2019-siaran-langsung-dan-tema-tiap-debat?page=3>
- Mulyawan, I. W. (2010). Struktur Wacana Iklan Media Cetak Kajian Stuktur Van Dijk (Doctoral dissertation, Udayana University).

- Nur, M. F., & Aziz, A. (2023, October 26). *Perubahan Sikap Prabowo di Pilpres 2024, dari Galak jadi Humoris*. Tirto.id; Tirto.id. <https://tirto.id/perubahan-sikap-prabowo-di-pilpres-2024-dari-galak-jadi-humoris-gRxw>
- Octovina, R. A., Agustino, L., & Kartini, D. S. (2022). Strategi Kampanye Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Debat Calon Presiden pada Tahun 2019. *PERSPEKTIF*, 11(1), 385-393.
- Putra, G. A., & Esfandari, D. A. (2014). Pengaruh pesan politik Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Debat Capres Di SCTV Pada 9 Juni 2014 terhadap persepsi mahasiswa Telkom University Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2011-2012.
- Ragam Info. (2023, August 13). *Pengertian Transformasi dan Contohnya dalam Kehidupan*. Kumparan. <https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-transformasi-dan-contohnya-dalam-kehidupan-20yyzhAyrAw>
- Rahayu, L. F., Maulana, E., Safitri, S., Haq, M. I., & Ramadhani, L. S. (2024). Pengaruh Debat Capres Dalam Merebut Pemilih Mengambang Dalam Pemilu 2024. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(2), 127-132
- Ratnaningsih,, D. (2019). *Analisis Wacana Kirtis Sebuah Teori dan Implementasi*. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Ricky, H. (2014). Perbandingan retorika Prabowo Subianto dan Joko Widodo dalam debat calon presiden 2014 (Studi kasus retorika debat calon presiden 2014 mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1-13.
- Sadikin, M., Ramdhani, M., & Tayo, Y. (2020). Representasi Goyangan Prabowo Dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019 Putaran Pertama. *Jurnal Pustaka Komunikasi* , 3 (2), 179-190.
- Setiawan, E. (2024). *Arti kata transformasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/transformasi>
- Simarmata, Mai Yuliastri, and Saptiana Sulastri. "Pengaruh keterampilan berbicara menggunakan metode debat dalam mata kuliah Berbicara Dialektik pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak." *Jurnal Pendidikan Bahasa* 7.1 (2018): 49-62.

- Tintien Koerniawati. Cliff Johanes Ruhukail, “Persepsi Pustakawan Terhadap Transformasi,” Jurnal
- TKN Sindir Emosi Prabowo di Debat Capres*. (2019, April). Nasional; cnnindonesia.com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190402000358-32-382710/tkn-sindir-emosi-prabowo-di-debat-capres>
- Wayan Mulyawan, I. (n.d.). *Struktur Wacana Iklan Media Cetak Kajian Struktur Van Djik*. Retrieved January 9, 2025, from <https://media.neliti.com/media/publications/229497-struktur-wacana-iklan-media-cetak-kajian-6603b41a.pdf>
- Widayanti, C., & Fridiyanti, Y. N. (2023). Analisis Pengaruh Debat Calon Presiden 2024 Pertama Terhadap Elektabilitas Calon Presiden Perspektif Pandangan Masyarakat. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 1720-1731.
- Wikipedia*,
https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13088&keywords=. Accessed 11 June 2024.
- Wikipedia*, https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13182. Accessed 11 June 2024.
- Yasa, I. N. (2021). *Teori Analisis Wacana Kritis*. Pustaka Larasana.

LAMPIRAN

1. Akun youtube Kompas TV



2. Debat Capres 2019



3. Debat Capres 2024



4. Debat Capres 2024



5. Visi Misi dan anggota debat capres 2024



DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM 2024



1



CALON PRESIDEN
**H. ANIES RASYID
BASWEDAN, Ph.D**

CALON WAKIL PRESIDEN
**R. A. MUHAIMIN
ISKANDAR, Dr. (H.C.)**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



**VISI
INDONESIA ADIL MAKMUR
UNTUK SEMUA**

MISI

1. Menastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedutatan air;
2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendorong koperasi Indonesia berkelas di tingkat domestik dan internasional;
3. Menwujudkan kualitas ekologi berkelanjutan untuk generasi mendatang;
4. Mengembangkan kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan;
5. Menwujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya;
6. Menwujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa;
7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia;
8. Memulihkan kualitas demokrasi, mengakhiri hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa pandang pilih, serta menyelaraskan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

2



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
**GIBRAN RAKABUMING
RAKA**

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



**VISI
BERSAMA INDONESIA MAJU
MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

MISI

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui transisi ganda, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengisian peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Meningkatkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Mengembangkan dari desa dan kota untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemerataan komunikasi;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, jilid, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3



CALON PRESIDEN
**H. GANJAR PRANOWO,
S.H., M.P.**

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



**VISI
GERAK CEPAT MENUJU
INDONESIA UNGGUL**

MISI

1. Memulihkan Indonesia yang sehat, tertib, dan sejahtera;
2. Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi;
3. Ekonomi yang tangguh dan berdaya;
4. Meningkatkan keamanan dan ketertahanan antarmuka dari ancaman;
5. Ekosistem digital yang mengoptimalkan akses internet cepat dan terjangkau;
6. Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
7. Demokrasi terwujud melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan lokal berlandaskan supremasi hukum;
8. Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional, serta pertahanan yang tangguh dan modern.

DAFTAR PASANGAN CALON

DAFTAR PASANGAN CALON

6. Visi Misi dan anggota debat capres 2019



DAFTAR PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

01



CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL









VISI
 "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong-royong"

MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

02



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL






VISI
 "Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur
bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di
bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta
menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku,
agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

MISI

1. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.
3. Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

1. Ketua
TTD
ARIEF BUDIMAN

2. Anggota
TTD
PRAMONO UBAID TANTHOWI

5. Anggota
TTD
HASYIM ASY'ARI

3. Anggota
TTD
WAHYU SETIAWAN

6. Anggota
TTD
VIRYAN

4. Anggota
TTD
ILHAM SAPUTRA

7. Anggota
TTD
EVI NOVIDA GINTING MANIK

 KPU Republik Indonesia
  @KPU_RI
  @KPU_ID
  www.kpu.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Siti Hotijah
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 07 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gg. Dahlia RT 11/RW 01 Jaraksari
Wonosobo
No. WhatsApp : 085792210759
Email : Sitihotijahh79@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Fatah Jaraksari : Tahun 2008-2010
2. SD 2 Jaraksari Wonosobo : Tahun 2010-2016
3. Mts Darul Faizin : Tahun 2016-2019
4. MAN Sampang : Tahun 2019-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota dan Pengurus PMII Rayon Fisip UIN Walisongo Semarang tahun 2021
2. Pengurus PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang Tahun 2024
3. Staf Ahli DEMA UIN Walisongo Semarang 2022
4. Anggota PSDM DEMA UIN Walisongo Semarang 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan semestinya

Semarang, 8 Juni 2025

Siti Hotijah
NIM: 2106016012